



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.290, 2009

DEPARTEMEN KEHUTANAN. Rencana. Kerja.  
Pelaksanaan

**PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA**

Nomor P.59/Menhut-II/2009

**TENTANG**

**RENCANA KERJA (RENJA)**

**DEPARTEMEN KEHUTANAN TAHUN 2010**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) mengamanatkan setiap Kementerian/Lembaga Negara menyusun Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-KL) sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) atau Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Negara (Renstra-KL);
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Rencana Kerja (Renja) Departemen Kehutanan Tahun 2010;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);



8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2009 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2010;
9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan;
10. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Kehutanan;
11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.27/Menhut-II/2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kehutanan 2006-2025;
12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 28/Menhut-II/2006 tentang Sistem Perencanaan Kehutanan;
13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.64/Menhut-II/2008 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 80);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG RENCANA KERJA (RENJA) DEPARTEMEN KEHUTANAN TAHUN 2010.**

**Pasal 1**

Rencana Kerja (Renja) Departemen Kehutanan Tahun 2010 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

**Pasal 2**

Renja Departemen Kehutanan ini adalah acuan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran seluruh satuan kerja lingkup Departemen Kehutanan tahun anggaran 2010.

**Pasal 3**

Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Kehutanan ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 September 2009  
MENTERI KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

H. M.S. KABAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 8 September 2009  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATALATTA

**LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR** : P.59/Menhut-II/2009  
**TANGGAL** : 8 September 2009

**TENTANG**

**RENCANA KERJA (RENJA) DEPARTEMEN KEHUTANAN TAHUN 2010**

## KATA PENGANTAR

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan yang lebih berdaya dan berhasil guna, serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan kehutanan, maka disusun Rencana Kerja (Renja) Departemen Kehutanan Tahun 2010. Renja ini merupakan gambaran garis besar dari langkah-langkah pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan yang dirumuskan pada tujuan dan sasaran untuk setiap program dan kegiatan Departemen Kehutanan yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2010. Selanjutnya Renja ini menjadi acuan seluruh unit kerja pada jajaran Departemen Kehutanan dalam menyusun Renja unit kerja masing-masing, sebagai implementasi yang lebih rinci dari pelaksanaan tugas dan fungsi Departemen Kehutanan.

Berdasarkan hirarki perencanaan, Renja Departemen Kehutanan Tahun 2010 adalah pelaksanaan tahun pertama dari Rencana Strategis (Renstra) Departemen Kehutanan Tahun 2010-2014, yang disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014. Dalam hal ini, RPJMN tersebut merupakan pelaksanaan periode lima tahun kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Tahun 2004-2025 yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007. Mengingat RPJMN Tahun 2010-2014 yang merupakan RKP Kabinet periode tersebut belum ditetapkan, sedangkan Renja K/L Tahun 2010 harus ditetapkan pada tahun 2009, maka penetapan Renja Dephut Tahun 2010 ini mendahului penetapan Renstra Tahun 2010-2014, dan sifatnya melanjutkan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan pada Renstra Tahun 2005-2009.

Sebagai dokumen lembaga Renja ini ditetapkan dengan Peraturan Menteri Kehutanan. Guna tercipta satu kesatuan yang utuh dari pola dan mekanisme perencanaan, diinstruksikan kepada seluruh pimpinan unit kerja pada jajaran Departemen Kehutanan serta instansi kehutanan di daerah agar didalam menyusun rencana kerja instansi, secara konsisten mengacu pada dokumen Renja Departemen Kehutanan Tahun 2010 ini. Kiranya Tuhan YME senantiasa memberikan petunjuk guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam Renja ini.

**MENTERI KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA,**

**H.M.S. K A B A N**

## DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Landasan Pembangunan Kehutanan .....	1
B. Posisi dan Ruang Lingkup Pembangunan Kehutanan ....	2
C. Alur Penyusunan dan Asumsi.....	4
D. Sistematis Renja Tahun 2010 .....	5
BAB II PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2008 DAN PERKIRAAN PENCAPAIAN RENJA TAHUN 2009 .....	7
A. Pemberantasan Pencurian Kayu di Hutan Negara dan Perdagangan Kayu Ilegal.....	8
B. Revitalisasi Sektor Kehutanan Khususnya Industri Kehutanan .....	12
C. Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Hutan .....	15
D. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Dalam dan sekitar Kawasan Hutan .....	20
E. Pemantapan Kawasan Hutan.....	22
F. Pendukung Kebijakan Prioritas .....	25
BAB III VISI, MISI DAN SASARAN TAHUN 2010 .....	27
A. Visi dan Misi.....	27
B. Isu-isu strategis .....	23
C. Sasaran Pembangunan Tahun 2010 .....	31
BAB IV RENCANA KERJA TAHUN 2010 .....	33
A. Prioritas dan fungsi Pembangunan Kehutanan .....	33
B. Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja .....	35
C. Pembiayaan.....	54
BAB V PENUTUP .....	56
LAMPIRAN .....	58

### RINGKASAN EKSEKUTIF

Renja ini disusun berdasarkan kondisi saat ini dan permasalahan serta isu-isu strategis dalam pembangunan kehutanan ke depan. Dalam Renja ini juga disusun formulasi visi dan misi pembangunan kehutanan dalam lima tahun kedepan (2010-2014) yang merupakan acuan dalam menetapkan sasaran, program dan kegiatan beserta indikator kinerjanya. Meskipun demikian pernyataan visi dan misi tersebut masih bersifat indikatif karena belum didasarkan atas visi dan misi yang terumuskan dalam Rencana Strategis (Renstra) Departemen Kehutanan Tahun 2010-2014, yang akan ditetapkan setelah ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014.

Guna mencapai tujuan misi yang ditetapkan dalam Renstra Departemen Kehutanan Tahun 2010-2014, maka ditetapkan kebijakan strategis yaitu: 1) Melanjutkan upaya-upaya perlindungan dan pengamanan hutan guna meminimalisir kegiatan pencurian kayu di hutan negara, perambahan kawasan hutan serta perdagangan dan peredaran hasil hutan illegal serta tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi, 2) Pemantapan status hukum dan peningkatan kapasitas pengelolaan kawasan hutan, 3) Rehabilitasi hutan yang terdegradasi dan lahan kritis di luar kawasan hutan guna meningkatkan daya dukung dan fungsi daerah aliran sungai (DAS), 4) Pemantapan penyelenggaraan konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya, 5) Peningkatan produksi hasil hutan guna memperkuat daya saing ekonomi domestik, dan 6) Pemantapan kelembagaan pengelolaan sumberdaya hutan, dan pengembangan Iptek serta kapasitas SDM Kehutanan.

Berdasarkan struktur pembangunan nasional yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2010 yang memiliki thema "Pemulihan Perekonomian Nasional dan Pemeliharaan Kesejahteraan Rakyat", pembangunan sektor kehutanan "diposisikan" pada prioritas pembangunan keempat, yaitu *Pemulihan Ekonomi Yang Didukung Oleh Pembangunan Pertanian, Infrastruktur dan Energi* pada Sub Prioritas *Pertumbuhan Ekonomi*, dan prioritas kelima, yaitu *Peningkatan Kualitas Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Kapasitas Penangan Perubahan Iklim*. Pada prioritas pembangunan nasional yang keempat, untuk sektor kehutanan terdapat satu fokus kegiatan, yaitu Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. Sedangkan pada prioritas pembangunan yang

kelima terdapat tiga fokus pembangunan sektor kehutanan, yaitu 1) Peningkatan Kapasitas Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim dan Bencana Alam Lainnya, 2) Peningkatan Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Alam dan Kualitas Daya Dukung Lingkungan, dan 3) Peningkatan Pengelolaan Sumberdaya Air Terpadu.

Sejalan dengan thema pembangunan nasional, dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2010 Departemen Kehutanan akan menyelenggarakan 11 (sebelas) program, dengan uraian ringkas sebagai berikut:

1. Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik, dengan indikator kinerja utama pelaksanaan program adalah terselenggaranya administrasi pemerintahan pada satuan-satuan kerja lingkup Departemen Kehutanan sebanyak 269 unit kerja.
2. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara, yang bertujuan untuk meningkatkan efektifitas sistem pengawasan dan audit serta akuntabilitas kinerja guna mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan bebas KKN.
3. Program Penelitian dan Pengembangan Iptek, guna tersedianya data dan informasi teknologi, modeling, pedoman, hasil kajian dan hasil rekayasa alat terkait dengan landsekap hutan, pengelolaan hutan alam, pengelolaan hutan tanaman, pengelolaan biodiversitas, budidaya hasil hutan bukan kayu, pengelolaan DAS, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, pengolahan hasil hutan dan kebijakan kehutanan, serta penerapan hasil litbang berupa gelar teknologi, penerbitan jurnal dan penyelenggaraan seminar.
4. Program Pemantapan Keamanan Dalam Negeri, guna menekan sampai seminimal mungkin praktek-praktek kejahatan dan pelanggaran hukum di bidang kehutanan. Indikator kinerja utama pelaksanaan Program Pemantapan Keamanan Dalam Negeri Tahun 2010 adalah menurunnya tindak pidana dibidang kehutanan sebesar 50% dari tindak pidana yang terjadi tahun 2009.
5. Program Pemantapan Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan, dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan hutan produksi dalam penyediaan produk-produk hasil hutan berupa kayu dan non kayu, baik dari hutan alam maupun hutan tanaman, pengembangan revitalisasi industri pengolahan hasil hutan, serta pengendalian peredaran dan perdagangan hasil hutan. Selain itu pelaksanaan program tersebut bertujuan meningkatkan pemantapan kawasan hutan guna mendukung

prakondisi pengelolaan sumberdaya hutan. Indikator kinerja utama program tersebut antara lain terbentuknya/penetapan 10% dari kawasan hutan produksi menjadi areal kesatuan pengelolaan hutan produksi (KPHP), 10% produksi penebangan bersertifikat sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK), peningkatan produksi hasil hutan sebanyak 1% dari tingkat tahun 2009, pembuatan tanaman HTI dan HTR baru seluas 800.000 Ha, peningkatan PNBPN dari pemanfaatan kayu sebesar 5% dibanding penerimaan tahun 2009, pembuatan tanda batas luar kawasan hutan sepanjang 2.000 Km, pembuatan tanda batas fungsi kawasan hutan sepanjang 1.400 Km, penetapan wilayah KPHP dan KPHL di 4 propinsi, penetapan wilayah KPHK sebanyak 20 unit atau propinsi.

6. Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam, dengan indikator kinerja utama berupa menurunnya jumlah *hotspot* (titik api) sampai dengan dampak asap tidak mengganggu tingkat kesehatan masyarakat setempat serta tidak mengganggu negara tetangga, penyelesaian kasus perambahan di kawasan konservasi sebanyak 20%, populasi spesies kunci yang terancam punah minimal stabil atau bertambah sesuai kemampuan biologis dan habitat yang tersedia, 50% pemegang ijin Pemanfaatan Pariwisata Alam (IPPA) dapat berusaha dengan sehat, dan kapasitas kelembagaan satuan kerja lingkup PHKA yang terorganisir dengan baik meningkat 20% menjadi 40%.
7. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumberdaya Alam, yang bertujuan untuk memulihkan fungsi dan daya dukung DAS serta mengembangkan usaha perekonomian masyarakat melalui usaha dibidang kehutanan. Indikator kinerja utama program tersebut adalah penyusunan Rencana Pengelolaan DAS Terpadu untuk 18 unit DAS prioritas, pengembangan sumber benih pada 6 region, penanaman pohon dalam rangka rehabilitasi hutan dan lahan seluas 100.000 hektar, penetapan areal kerja hutan kemasyarakatan (HKm) seluas 420.000 hektar, dan fasilitasi penanaman pohon dalam rangka penghijauan lingkungan dalam kerangka "Indonesia Menanam" sebanyak 320 juta batang.
8. Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup, dengan indikator kinerja utama terbentuknya 26 unit masyarakat produktif mandiri, terbentuknya 80 unit model penyuluhan di kabupaten/kota yang sudah terbentuk Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (P3K), terbentuknya 20 unit model



penyuluhan responsif jender di kabupaten/kota yang sudah terbentuk Badan Pelaksana P3K, dan pemberdayaan masyarakat di 33 provinsi.

9. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup, dengan indikator kinerja utama pelaksanaan program tersebut adalah pembuatan rencana makro kawasan sebanyak 1 judul, pembuatan informasi produk domestik regional bruto (PDRB) hijau pada 17 propinsi, penggunaan teknologi penginderaan jauh untuk pemetaan penutupan lahan pada kawasan hutan KPH di 25 lokasi, dan terbangunnya jaringan data spatial kehutanan antara pusat dan beberapa model di daerah.
10. Program Pendidikan Kedinasan, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan diklat kehutanan dalam rangka pengembangan profesionalisme dan kemampuan SDM kehutanan yang berada pada Departemen Kehutanan dan instansi kehutanan daerah serta masyarakat. Indikator kinerja program berupa pendidikan dan pelatihan bagi 5.530 orang peserta, pendidikan jenjang S3 bagi pegawai Departemen Kehutanan dengan lulusan sebanyak 15 orang, dan pendidikan jenjang S2 bagi pegawai Departemen Kehutanan dengan lulusan sebanyak 50 orang.
11. Program Pendidikan Menengah, dengan indikator kinerja program antara lain lulusan pendidikan sekolah menengah kejuruan (SMK) Kehutanan sebanyak 40 orang, penyelenggaraan pendidikan kelas I sebanyak 288 orang, kelas II sebanyak 288 orang dan kelas III sebanyak 168 orang. Untuk mencapai kinerja utama di atas akan dilakukan kegiatan penyelenggaraan pendidikan sekolah menengah kejuruan (SMK) kehutanan pada 5 unit yang berada di Kadipaten, Pekanbaru, Makassar, Samarinda dan Manokwari.

Pembiayaan untuk pelaksanaan 11 program diuraikan di atas dalam Rencana Kerja Departemen Kehutanan Tahun 2010 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Alokasi pagu sementara RAPBN Bagian Anggaran 029 Departemen Kehutanan Tahun 2010 adalah sebesar Rp.3.158.827,5 juta.

## BAB I PENDAHULUAN

### **A. Landasan Pembangunan Kehutanan**

Pembangunan kehutanan di Indonesia saat ini diselenggarakan berdasarkan mandat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 yaitu pengurusan sumberdaya hutan sebagai satu kesatuan ekosistem.

Terdapat tiga dimensi utama dalam penyelenggaraan pengurusan sumberdaya hutan. Pertama adalah keberadaan lahan yang diperuntukkan sebagai kawasan hutan dalam luasan yang cukup dan sebaran spasial yang proporsional. Entitas yang mencirikan dimensi kawasan adalah pemantapan status hukum kawasan hutan serta tersedianya data dan informasi kondisi dan potensi sumberdaya hutan yang menjadi prasyarat dalam pengelolaan hutan lestari. Dimensi kedua berupa keberadaan wujud biofisik hutan berupa tumbuhan dan satwa serta wujud abiotik yang berada pada lahan yang diperuntukkan sebagai kawasan hutan dengan kualitas dan kuantitas yang tinggi. Entitas yang mencirikan dalam pengelolaan biofisik hutan adalah pemanfaatan sumberdaya hutan berupa manfaat langsung dan tidak langsung baik berupa lahan maupun hasil-hasilnya, dan konservasi sumberdaya alam termasuk perlindungan dan pengamanan hutan, serta upaya-upaya rehabilitasi hutan dan lahan yang telah terdegradasi agar fungsinya dapat terpulihkan kembali. Dimensi ketiga adalah tata kelola sumberdaya hutan baik menyangkut aspek kelola ekonomi, kelola ekologi atau lingkungan maupun kelola sosial, yang menjadi ciri dan fungsi sumberdaya hutan sebagai sistem penyangga kehidupan. Dimensi yang menjadi mandat penyelenggaraan pengurusan sumberdaya hutan di atas diimplementasikan dalam empat upaya pokok yaitu 1) perencanaan hutan, 2) pengelolaan hutan, 3) penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, serta penyuluhan, dan 4) pengawasan dan pengendalian, yang secara keseluruhan ditujukan guna mewujudkan pengelolaan hutan lestari untuk kesejahteraan masyarakat.

Posisi strategis sumberdaya hutan dalam konteks pembangunan nasional memiliki dua fungsi utama, yaitu yang pertama peran hutan dalam pembangunan ekonomi terutama dalam menyediakan barang dan jasa yang memberikan kontribusi terhadap pembangunan perekonomian nasional. Yang kedua adalah peran hutan didalam pelestarian lingkungan hidup

dengan menjaga keseimbangan sistem tata air dan udara sebagai unsur utama daya dukung lingkungan didalam sistem penyangga kehidupan.

Berdasarkan prinsip keutuhan, keterpaduan dan berkelanjutan, maka penyelenggaraan pembangunan kehutanan tahun 2010 masih melanjutkan kebijakan prioritas pembangunan kehutanan 2004-2009, yaitu 1) pemberantasan pencurian kayu di hutan negara dan perdagangan kayu ilegal, 2) revitalisasi sektor kehutanan khususnya industri kehutanan, 3) rehabilitasi dan konservasi sumberdaya hutan, 4) pemberdayaan ekonomi masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan, dan 5) pemantapan kawasan hutan. Kesenambungan penetapan sasaran pembangunan kehutanan tahun 2010 dari tahun-tahun sebelumnya menjadi pertimbangan utama dalam penetapan sasaran pembangunan tahun 2010 yang merupakan tahun pertama dari pembangunan tahun 2010-2014 yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Departemen Kehutanan Tahun 2010-2014.

Sesuai dengan tatanan sistem perencanaan pembangunan nasional dimana Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) menjadi acuan utama dalam penetapan Rencana Kerja (Renja) K/L, maka Renja Departemen Kehutanan Tahun 2010 mengacu pada Renstra Departemen Kehutanan Tahun 2010-2014. Dalam kaitannya dengan tata waktu penetapan rencana pembangunan nasional, dimana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014 belum ditetapkan (akan ditetapkan pada bulan Januari 2010), maka penyusunan Renja Departemen Kehutanan Tahun 2010 baru mengacu pada draft Renstra Departemen Kehutanan Tahun 2010-2014, yang akan ditetapkan setelah ditetapkannya RPJMN. Selain mengacu pada draft Renstra Departemen Kehutanan yang penyusunannya dilakukan secara paralel dengan penyusunan Renja ini, penyusunan Renja Departemen Kehutanan Tahun 2010 ini mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2010 yang ditetapkan berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2009.

## **B. Posisi dan Ruang Lingkup Pembangunan Kehutanan**

Rencana kerja pembangunan kehutanan tahun 2010 merupakan bagian integral dari rangkaian penyelenggaraan pembangunan kehutanan yang dituangkan di dalam rencana kerja lima tahunan yaitu Renstra Departemen Kehutanan Tahun 2010-2014. Renja Departemen Kehutanan Tahun 2010 merupakan pedoman dan arahan didalam penyelenggaraan tahun pertama

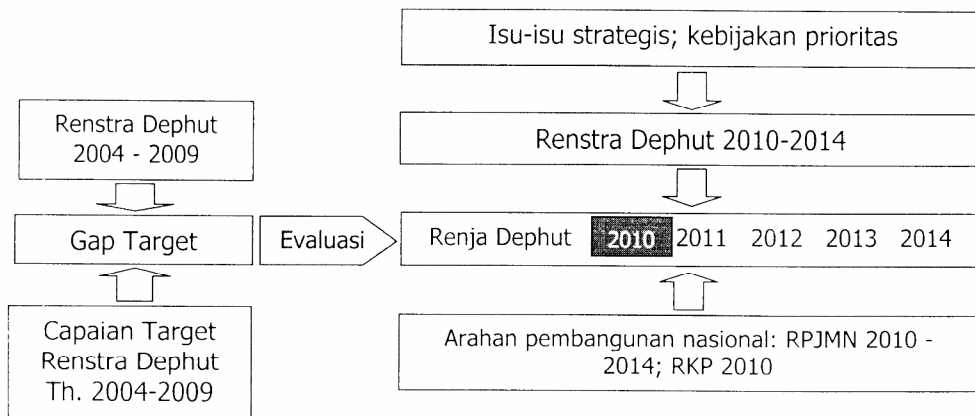
dari Renstra Departemen Kehutanan Tahun 2010–2014. Guna tetap menjaga keberlanjutan proses penyelenggaraan pembangunan kehutanan, maka penetapan sasaran, program dan kegiatan, mengacu pada hasil-hasil pencapaian pelaksanaan pembangunan yang dituangkan dalam Renstra Departemen Kehutanan Tahun 2004-2009 beserta Renja tahunannya. Disamping itu, terdapat beberapa tantangan yang menjadi “pengarus-utamaan” dalam penetapan sasaran pada Renja Tahun 2010 Departemen Kehutanan, antara lain:

1. Belum semua kawasan hutan dikelola oleh unit-unit pengelolaan, khususnya pada kawasan hutan produksi dan hutan lindung.
2. Masih tingginya gangguan keamanan hutan baik terhadap kawasan maupun hasil-hasilnya, termasuk ancaman terhadap bencana kebakaran hutan.
3. Meningkatnya perhatian masyarakat terhadap upaya-upaya konservasi sumberdaya alam, khususnya dalam konteks pelestarian jenis-jenis flora dan fauna serta lingkungan abiotiknya.
4. Luasnya lahan kritis termasuk sangat kritis yang berdampak pada menurunnya daya dukung DAS, terutama dalam kaitannya dengan sistem tata air dalam konteks bencana banjir dan kekeringan.
5. Meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap konsumsi barang/produk hasil hutan dan jasa hutan seperti pariwisata alam dan jasa lingkungan.
6. Kesenjangan yang sangat besar antara *supply* dan *demand* bahan baku industri kehutanan, khususnya kayu, yang belum secara optimal disediakan dari hutan tanaman industri, disamping masih rendahnya efisiensi produksi industri hasil hutan.
7. Hasil hutan bukan kayu (HHBK) serta produk dari hutan rakyat dan hutan kemasyarakatan belum secara nyata mendorong berkembangnya ekonomi masyarakat.
8. Minat investasi di bidang kehutanan yang kurang kondusif karena sering terhambat oleh permasalahan tenurial, tumpang tindih peraturan (pusat dengan daerah), dan kurangnya insentif permodalan, perpajakan dan retribusi.
9. Kurangnya data informasi kehutanan yang terintegrasi sesuai dengan kebutuhan para pihak.
10. Kapasitas kelembagaan kehutanan yang masih terbatas termasuk kapasitas sumberdaya manusia, baik pada tatanan pemerintah terutama pemerintah kabupaten/kota, serta masyarakat khususnya yang berada di dalam dan sekitar kawasan hutan.

Perumusan lingkup pembangunan kehutanan yang dituangkan dalam Renja Departemen Kehutanan Tahun 2010, dilakukan berdasarkan arahan prioritas pembangunan nasional sektor kehutanan dalam RPJMN Tahun 2010-2014 serta berpedoman pada RKP Tahun 2010. Dengan mempedomani arahan pembangunan tersebut disusun struktur program dan kegiatan pembangunan sektor kehutanan di dalam Renja Departemen Kehutanan Tahun 2010. Berdasarkan struktur program dan kegiatan, ditetapkan indikator pencapaian program dan kegiatan berupa indikator keluaran (*output*) dan indikator hasil (*outcome*), yang selanjutnya akan menjadi acuan dalam menetapkan pendanaannya, yang secara keseluruhan akan dilaksanakan oleh satuan-satuan kerja lingkup Departemen Kehutanan di pusat dan di daerah.

### C. Alur Penyusunan dan Asumsi

Guna menjaga kesinambungan penetapan pencapaian hasil-hasil pembangunan di bidang kehutanan, maka proses penetapan sasaran pembangunan kehutanan tahun 2010 diformulasikan dalam kerangka pikir sebagaimana bagan di bawah.



Asumsi yang mendasari kerangka pikir tersebut meliputi:

1. Kebijakan Nasional dalam RPJMN 2010 – 2014 dan RKP 2010 menjadi acuan dalam perumusan Renstra Departemen Kehutanan Tahun 2010-2014 dan Renja Departemen Kehutanan Tahun 2010.
2. Kebijakan Prioritas Pembangunan Kehutanan tahun 2004-2009 tetap menjadi dasar pelaksanaan.

3. Renja Departemen Kehutanan Tahun 2010 menjadi acuan seluruh unit/satuan kerja lingkup Departemen Kehutanan.
4. Tersedia input proses berupa sumber daya manusia (SDM) pelaksana dan dana.
5. Ketersediaan regulasi untuk mendukung struktur program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.
6. Monitoring evaluasi pembangunan kehutanan berjalan efektif.
7. Stabilitas politik, keamanan dan sosial tepat terjaga.

#### **D. Sistematika Renja Tahun 2010**

Ruang lingkup isi Renja Departemen Kehutanan adalah sebagai berikut:

KATA PENGANTAR, merupakan pengantar umum Menteri Kehutanan.

BAB I. PENDAHULUAN, yang merupakan penjelasan secara garis besar dari materi Renja. Bab Pendahuluan memuat Landasan Pembangunan Kehutanan, Posisi dan Ruang Lingkup Pembangunan Kehutanan, Alur Penyusunan dan Asumsi, dan Sistematika Renja Tahun 2010.

BAB II. PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2008 DAN PERKIRAAN PENCAPAIAN RENCANA KERJA TAHUN 2009, yang merupakan gambaran umum pencapaian hasil-hasil kegiatan yang dilaksanakan oleh Departemen Kehutanan pada Tahun 2008 lalu, dan perkiraan pencapaian hasil kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan 2009. Bab II memuat ikhtisar evaluasi pelaksanaan kebijakan prioritas pembangunan kehutanan yang dilaksanakan oleh Departemen kehutanan, meliputi:

1. Pemberantasan Pencurian Kayu di Hutan Negara dan Perdagangan Kayu Ilegal
2. Revitalisasi Sektor Kehutanan Khususnya Industri Kehutanan
3. Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Hutan
4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Dalam dan Sekitar Kawasan Hutan
5. Pemantapan Kawasan Hutan
6. Pendukung Kebijakan Prioritas

BAB III. VISI, MISI DAN SASARAN TAHUN 2010. Bab ini menyajikan arahan visi, misi serta sasaran strategis pembangunan kehutanan yang dilaksanakan oleh Departemen Kehutanan Tahun 2010-2014. visi, misi dan sasaran strategis dalam Bab ini masih bersifat

indikatif karena masih mengacu pada rancangan/konsep Renstra Departemen Kehutanan Tahun 2010-2014, dimana Renstra definitifnya akan ditetapkan setelah ditetapkan RPJMN Tahun 2010-2014. dalam Bab ini juga disajikan isu-isu strategis yang menjadi dasar acuan dalam menetapkan sasaran tahun 2010, yang pada intinya merupakan indikator kinerja utama dari 11 program yang dilaksanakan Departemen Kehutanan Tahun 2010.

BAB IV. RENCANA KERJA TAHUN 2010. Bab IV pada Renja ini adalah uraian dari hasil-hasil yang ingin dicapai oleh Departemen Kehutanan pada Tahun 2010. Penyajian materi rencana kerja adalah berdasarkan prioritas dan fungsi Pembangunan Kehutanan, serta program, kegiatan dan indikator kinerja. Pada Bab ini sudah dapat diketahui program dan kegiatan serta satuan-satuan yang menjadi ukurannya dari rencana yang ingin dilaksanakan dan dicapai pada tahun 2010, serta gambaran umum dukungan pembiayaan yang bersumber dari APBN Tahun 2010.

BAB V. PENUTUP, merupakan gambaran umum kondisi pelaksanaan Renja Departemen Kehutanan Tahun 2010, serta arah dari dokumen Renja ini dalam tugas dan fungsi Departemen Kehutanan.

## BAB II

PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2008 DAN PERKIRAAN  
PENCAPAIAN RENCANA KERJA TAHUN 2009

Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Departemen Kehutanan Tahun 2008 merupakan pelaksanaan tahun keempat dari Rencana Strategis (Renstra) Departemen Kehutanan Tahun 2004-2009, sedangkan pelaksanaan Renja Tahun 2009 merupakan tahun terakhir dari Renstra tersebut. Gambaran pencapaian hasil pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Departemen Kehutanan Tahun 2008 dan perkiraan pencapaian pelaksanaan Renja Tahun 2009 sangat penting dan strategis sebagai bagian dari pencapaian *output* (keluaran) dan *outcome* (hasil) atas program dan kegiatan-kegiatan yang akan dicapai dalam lima tahun yang ditetapkan dalam Renstra Departemen Kehutanan Tahun 2004-2009.

Dalam kaitan di atas, pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan yang ditetapkan dalam Renstra Departemen Kehutanan Tahun 2004-2009 akan menjadi acuan dalam penetapan program dan kegiatan-kegiatan dalam Renstra Departemen Kehutanan Tahun 2010-2014. Disamping itu, Renstra Departemen Kehutanan Tahun 2010-2014 disusun dengan mengacu pada kerangka kebijakan-kebijakan serta program dan kegiatan prioritas pembangunan nasional yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) Tahun 2010-2014. Sedangkan realisasi pencapaian pelaksanaan Renja Departemen Kehutanan Tahun 2008 dan perkiraan pencapaian pelaksanaan Renja Tahun 2009, akan menjadi acuan dan tolak ukur dalam penetapan *output* (keluaran) dan *outcome* (hasil) dari Renja Departemen Kehutanan Tahun 2010.

Kemajuan pelaksanaan pembangunan kehutanan yang dituangkan dalam Renja Departemen Kehutanan Tahun 2008 dan perkiraan pencapaian pelaksanaan Renja Tahun 2009 merupakan gambaran dari pencapaian pelaksanaan 5 (lima) kebijakan prioritas pembangunan kehutanan, yang telah dijabarkan lebih lanjut di dalam berbagai program dan kegiatan-kegiatan pembangunan sektor kehutanan. Realisasi pelaksanaan Renja tahun 2008 dan perkiraan pencapaian Renja Tahun 2009 tersebut adalah sebagai berikut:



### **A. Pemberantasan Pencurian Kayu di Hutan Negara dan Perdagangan Kayu Illegal**

Kebijakan proiritas di atas dilaksanakan melalui 2 (dua) program, yaitu 1) Program Pemantapan Keamanan Dalam Negeri, dan 2) Program Pemantapan Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan.

Program Pemantapan Keamanan Dalam Negeri, yang merupakan salah satu fungsi ketertiban dan keamanan, dimaksudkan untuk meningkatkan keamanan kawasan hutan dan hasil hutan guna menjamin hak-hak negara dan masyarakat atas manfaat sumberdaya hutan. Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini meliputi pengamanan hutan yang lebih ditekankan pada penguatan kelembagaan pengamanan hutan dan operasi-operasi pengamanan hutan.

Penguatan kelembagaan pengamanan hutan meliputi aspek pengembangan kemampuan personil pengamanan hutan baik personil pemerintah maupun pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengamanan hutan. Sampai dengan akhir tahun 2008, sebanyak 1.000 orang personil Polhut telah dilakukan peningkatan kemampuan dan kapasitasnya untuk menjadi personil Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat (SPORC). Target jumlah pembentukan SPORC pada tahun 2008 telah sesuai dengan rencana yang ditetapkan dalam Renstra, sehingga untuk tahun 2009 tidak dilakukan lagi kegiatan pembentukan personil baru anggota SPORC. Basis kerja satuan ini terdapat pada 11 brigade di 11 propinsi yang rawan kejahatan kehutanan, yaitu Propinsi Papua, Papua Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, DKI Jakarta, Sumatera Selatan, Jambi, Riau, dan Sumatera Utara. Meskipun Brigade SPORC tersebut berada pada 11 propinsi, namun fungsional tugasnya dapat dilakukan secara lintas propinsi sesuai dengan eskalasi kebutuhan pengamanan hutan dan hasil hutan. Disamping pembentukan satuan khusus, satuan pengamanan hutan Polhut "reguler" senantiasa tetap ditingkatkan kemampuannya melalui pembinaan serta pendidikan dan pelatihan (diklat), baik diklat aspek kepolisian maupun diklat teknis kehutanan yang relevan dengan tugas dan fungsinya.

Untuk tugas-tugas penyidikan atas tindak pidana kejahatan di bidang kehutanan, sampai dengan akhir tahun 2008 terdapat 732 orang tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang secara aktif melakukan tugas-tugas penyidikan. Sedangkan untuk tahun 2009 diharapkan dapat

diadakan pembentukan dan pengangkatan personil baru tenaga PPNS sebanyak 60 orang. PPNS tersebut utamanya untuk ditempatkan pada satuan-satuan kerja di lingkup Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA).

Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya perlindungan dan pengamanan hutan, pada tahun 2008 telah dibentuk 30 unit pengaman hutan swakarsa di 30 lokasi. Sedangkan untuk tahun 2009 diharapkan dapat dibentuk sebanyak 10 unit kelompok pengaman hutan swakarsa (masyarakat mitra polhut/MMP). Guna melakukan kegiatan pengamanan, personil pada unit-unit MMP ini telah dilakukan kegiatan pembinaan termasuk pendidikan dan pelatihan, yang tugas dan fungsinya lebih ditekankan pada aspek pengamanan preventif dan persuasif. Untuk meningkatkan koordinasi petugas di lapangan, telah dibentuk Forum Komunikasi PPNS sebagai wadah bagi PPNS Kehutanan untuk meningkatkan koordinasi dan kerjasama, serta saling bertukar informasi dan pengetahuan di 7 lokasi, yaitu Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Riau, Sumatera Selatan, dan Sumatera Utara.

Ditingkat lapangan, pengamanan hutan dilakukan melalui berbagai operasi pengamanan baik yang bersifat pre-emptif, preventif maupun represif. Untuk tahun 2008, operasi pengamanan pre-emptif dan preventif dilakukan melalui kegiatan patroli pengamanan. Sedangkan kegiatan-kegiatan pengamanan represif telah dilakukan operasi reguler sebanyak 350 kali dan operasi gabungan sebanyak 15 kali di propinsi-propinsi yang rawan pencurian kayu dengan melibatkan anggota SPORC, PPNS dan anggota Kepolisian. Untuk kegiatan pro yustisia telah dilakukan penyidikan dan pemberkasan lengkap sebanyak 227 kasus, diantaranya 73 kasus telah dilimpahkan kepada pengadilan (status P.21), dan vonis pengadilan sebanyak 27 kasus. Untuk tahun 2009, perkiraan pencapaian hasil kegiatan di atas adalah untuk operasi reguler sebanyak 350 kali dan operasi gabungan sebanyak 150 kali. Sedangkan pro yustisia diharapkan telah dilakukan penyidikan dan pemberkasan lengkap sampai dengan P.21 sebanyak 75% dari keseluruhan kasus baru, dan penyelesaian 25% tunggakan kasus.

Dalam rangka meningkatkan kapasitas pengamanan hutan, upaya-upaya pembinaan kelembagaan dilakukan antara lain melalui kerjasama dengan aparat pengamanan fungsional, yaitu Polri, TNI AL dan Kejaksaan baik ditingkat pusat, propinsi maupun kabupaten/kota. Kerjasama

kelembagaan utamanya meliputi kegiatan-kegiatan operasi pengamanan, pembinaan kemampuan personil dan penanganan perkara.

Guna mengoptimalkan upaya-upaya penanggulangan kejahatan kehutanan telah dilakukan sosialisasi Inpres Nomor 4 Tahun 2005. Selain itu telah dilakukan penyusunan rancangan penyempurnaan peraturan-peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2004, antara lain:

1. Peraturan Menteri Kehutanan tentang Sarana dan Prasarana Perlindungan Hutan.
2. Peraturan Menteri Kehutanan tentang Pelaksanaan Pengurusan Barang Bukti.
3. Peraturan Menteri Kehutanan tentang Pakaian Seragam, Atribut dan Perlengkapan Diri Polisi Kehutanan (Polhut).
4. Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam tentang Prosedur Tetap Penggunaan Sarana dan Prasarana Mobilitas Polisi Kehutanan (Polhut).
5. Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam tentang Kodefikasi Sarana Mobilitas Polhut

Untuk menanggulangi kejahatan yang bersifat transnasional, telah dilakukan diplomasi antara negara serta kerjasama antara pemerintah dengan non pemerintah, antara lain Kerjasama bilateral tentang Pemberantasan Illegal Logging (RI-USA dan RI-Australia), Kerjasama Regional (ASEAN-FLEGT dan ASEAN-WEN), dan Kerjasama Internasional (UNODC dan UNCTOC).

Program kedua dari implementasi kebijakan prioritas Pemberantasan Pencurian Kayu di Hutan Negara dan Perdagangan Kayu Illegal adalah Program Pemantapan Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan. Pelaksanaan program ini dimaksudkan untuk meningkatkan upaya-upaya penertiban peredaran hasil hutan melalui pelaksanaan penatausahaan hasil hutan (PUHH) guna menjamin hak-hak negara atas hasil hutan. Kegiatan yang dilakukan pada program ini adalah Pengendalian Peredaran Hasil Hutan. Upaya-upaya yang telah dilakukan pada tahun 2008 adalah:

1. Pembuatan dan pengendalian distribusi dokumen Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (SKSKB) di seluruh propinsi (33 propinsi). Untuk tahun 2008 dokumen SKSKB telah dikirimkan ke Dinas-Dinas

Kehutanan Propinsi sebanyak 748.000 set. Sisa dokumen berupa blanko yang masih berada di tempat penyimpanan di Jakarta adalah 257.139 set. Sebelum diberlakukannya Peraturan Menteri Kehutanan No. P.55/Menhut-II/2007, rata-rata setiap tahun dilakukan pencetakan blanko dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) sebanyak 2.000.000 set. Dengan diberlakukannya peraturan tersebut, maka kebutuhan pencetakan blanko dokumen SKSHH berupa SKSKB menjadi berkurang. Hal ini karena Peraturan Menteri Kehutanan tersebut telah mengalihkan tugas dan tanggung jawab kepada perusahaan pemegang Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dari Hutan Alam (IUPHHK-HA) dan Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) untuk mencetak sendiri dokumen Faktur Angkutan Kayu Bulat (FAKB), Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO), Faktur Angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu (FAHHBK) dan Surat Angkutan Lainnya (SAL) berdasarkan prinsip *self assesment* untuk melakukan pengangkutan kayu bulat, olahan dan hasil hutan bukan kayu (HHBK). Untuk pengangkutan kayu milik rakyat digunakan dokumen legalitas berupa blanko dokumen Surat Keterangan Angkutan Asal Usul Kayu (SKAU), dimana sejak tahun 2006 dokumen tersebut dicetak oleh Departemen Kehutanan. Namun setelah diterbitkannya Peraturan Menteri Kehutanan No. P.51/Menhut-II/2007, sejak tahun 2008 dokumen SKAU dicetak dan didistribusikan oleh Dinas Kehutanan Propinsi.

2. Pembuatan dan operasionalisasi sistem informasi penatausahaan hasil hutan (PUHH) dan iuran kehutanan secara *on-line* antara perusahaan pemegang ijin, instansi kehutanan mulai dari kabupaten, propinsi sampai dengan nasional, sebanyak 1 unit sistem informasi. Dalam jangka panjang sistem PUHH akan disempurnakan dengan pengembangan sistem informasi PUHH/PSDH-DR *on-line* yang telah dibangun sejak tahun 2006. Pada tahun 2007 sistem ini dikembangkan dengan dilengkapi *handheld*, *barcode printer* dan pita *barcode* yang ditempatkan di sejumlah IUPHHK-HA dengan dukungan dari proyek *Forest Law Enforcement Governance and Trade (FLEGT-Support Project)* bantuan Uni Eropa. Tahun 2008 dilakukan uji coba sistem dimana status data sampai dengan saat ini sudah *on-line* di Website <http://puhh.dephut.go.id>. Untuk aspek legalitas telah disusun dan diajukan draft Peraturan Menteri Kehutanan tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SI-PUHH) *on-line*.

3. Pembentukan dan penyegaran tenaga teknis pengawas/penguji hasil hutan baik kayu maupun non kayu melalui pendidikan dan pelatihan, serta pembinaan tenaga teknis pengujian, baik dari unsur masyarakat, perusahaan, dan pengawas penguji pada instansi kehutanan di tingkat kabupaten/kota, propinsi dan pusat.
4. Pengawasan pengukuran dan pengujian atas seluruh hasil hutan berupa kayu bulat, kayu olahan dan non kayu di seluruh propinsi (33 propinsi)
5. Penyempurnaan peraturan perundang-undangan di bidang penatausahaan hasil hutan.

#### **B. Revitalisasi Sektor Kehutanan Khususnya Industri Kehutanan**

Kebijakan prioritas Revitalisasi Sektor Kehutanan Khususnya Industri Kehutanan Tahun 2008 dan Tahun 2009 dilaksanakan melalui Program Pemantapan Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan. Sedangkan kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam program ini adalah:

1. Pengelolaan hutan produksi yang tidak dibebani hak/ijin pemanfaatan
2. Pengembangan pengelolaan pemanfaatan hutan alam
3. Pengembangan hutan tanaman dan hutan tanaman rakyat (HTR)
4. Restrukturisasi industri primer kehutanan.

Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan produksi yang tidak dibebani hak/ijin pemanfaatan, telah dilakukan upaya-upaya dalam rangka penyiapan areal hutan produksi yang tidak dibebani hak/ijin pemanfaatan tersebut untuk dapat dikelola dalam bentuk unit-unit pemanfaatan. Disamping itu, telah dilakukan perancangan kawasan-kawasan hutan produksi untuk dikelola dalam kesatuan pengelolaan hutan produksi (KPHP). Dalam tahun 2008 telah dilakukan penyiapan areal hutan produksi yang dapat dikelola dalam unit pemanfaatan dengan menyusun rancangan awal pembangunan KPHP model di 10 provinsi.

Untuk pelaksanaan kegiatan pengembangan pengelolaan pemanfaatan hutan alam, sampai dengan Desember 2008 terdapat 308 unit ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan produksi alam (IUHHK-HA) dengan areal kerja seluas 26.171.601 Ha. Dibandingkan dengan kondisi bulan yang sama tahun 2007, jumlah unit IUPHHK tersebut menurun sebanyak 16 unit (4,9%) dengan penurunan areal kerja seluas 2.099.442 Ha (7,4%).

Dari jumlah unit dan luasan areal kerja IUPHHK hutan alam di atas, tingkat produksi kayu bulat pada tahun 2008 adalah sebanyak 4.610.077 m<sup>3</sup>. Tingkat produksi tersebut menurun sebanyak 1.827.607,54 m<sup>3</sup> (28,4%) dibandingkan kondisi yang sama tahun 2007. Disamping itu pada tahun 2008 terdapat produksi kayu bulat dari tebangan lainnya (pemanfaatan kayu dan ijin sah lainnya) sebanyak 2.746.015 m<sup>3</sup>. Secara keseluruhan untuk tahun 2009 prakiraan tingkat produksi kayu bulat dari hutan alam adalah sebanyak 9,1 juta m<sup>3</sup>. Guna meningkatkan produktivitas dari hutan produksi alam melalui sistem TPTI, maka sampai dengan tahun 2008 telah dilakukan sistem silvikultur intensif (silin) di 25 lokasi IUPHHK-HA dengan areal luas 52.301,33 ha. Selain dengan pengembangan sistem silin tersebut, pembinaan hutan produksi alam bekas tebangan telah dilakukan penanaman pengayaan pada areal seluas 16.792,51 ha. Terkait dengan rangkaian kegiatan pengembangan pemanfaatan hutan produksi alam oleh pemegang IUPHHK di atas, jumlah investasi kumulatif sampai dengan tahun 2008 adalah sebesar Rp.9,53 triliun, yakni berdasarkan 152 unit pemegang IUPHHK yang menyampaikan laporan investasi.

Untuk kegiatan pembinaan pengembangan hutan tanaman industri (HTI), pada tahun 2008 terdapat 227 unit ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman (IUPHHK-HT)/HTI dengan areal kerja seluas 10.039.052 ha, yang terdiri dari kategori Surat Keputusan (SK) unit HTI definitif sebanyak 165 unit dengan luas 7.154.832 ha, SK sementara sebanyak 32 unit dengan luas 633.675 ha, dan SK pencadangan sebanyak 30 unit dengan luas 2.250.545 ha. Untuk tahun 2009 diharapkan terdapat 32 unit HTI SK sementara dengan luas 633.675 ha yang ditetapkan sebagai SK definitif.

Dengan luasan areal izin di atas, tingkat produksi kayu bulat dari HTI pada tahun 2008 adalah sebesar 22.321.885 m<sup>3</sup>. Sedangkan nilai investasi HTI sampai dengan tahun 2008 dari 32 unit perusahaan pemegang IUPHHK-HT/HTI yang melaporkan investasi adalah sebesar Rp.12,05 triliun.

Guna meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat serta pengembangan produksi hasil hutan kayu, telah dikembangkan pola hutan tanaman rakyat (HTR) yang dilaksanakan oleh masyarakat/kelompok masyarakat termasuk koperasi di luar badan usaha milik swasta (BUMS) dan badan usaha milik negara (BUMN). Sampai dengan akhir tahun 2009, diharapkan terdapat pencadangan areal HTR seluas

149.284,27 ha. Investasi berupa penyaluran dana kredit bergulir untuk pembangunan HTI (masyarakat) dan HTR akan dilakukan oleh Badan Layanan Umum (BLU) Departemen Kehutanan.

Berkenaan dengan kegiatan industri pengolahan hasil hutan, sampai dengan tahun 2008 terdapat 227 unit industri pengolahan kayu dengan kapasitas > 6.000 m<sup>3</sup>/tahun. Total kapasitas izin produksi dari unit-unit industri tersebut adalah sebanyak 23.404.642 m<sup>3</sup>/tahun. Dari kegiatan industri pengolahan kayu tersebut terdapat penyerapan tenaga kerja langsung sebanyak 205.305 orang, sedangkan jumlah kumulatif nilai investasinya adalah kurang lebih sebesar Rp.16,56 trilyun. Jenis industri pengolahan kayu tunggal dan terpadu masing-masing dapat dideskripsikan sebagai berikut:

No	Jenis Industri	Jumlah (Unit)	Kapasitas Izin Produksi (m <sup>3</sup> /tahun)	Jumlah Tenaga Kerja (orang)	Nilai Investasi (Rp.)
A.	Industri Tunggal				
1.	Plywood	30	2.588.948	41.882	2.756.512.345.955
2.	Penggergajian kayu	91	1.877.910	29.421	1.056.927.441.911
3.	Veneer	28	1.001.000	12.561	469.266.041.872
4.	Wood Chips	11	6.303.096	1.693	1.646.483.388.947
	Total A.	160	11.770.954	85.557	5.929.189.218.685
B.	Industri terpadu				
1.	Plywood + penggergajian Kayu	44	7.749.627	90.335	7.551.382.780.947
2.	Plywood + Veneer	3	332.500	2.082	392.047.946.120
3.	Plywood + LVL	2	614.000	3.434	399.667.341.000
4.	Plywood + penggergajian Kayu + Veneer	7	1.083.761	11.883	371.076.498.456
5.	Plywood + Veneer + LVL	2	278.000	2.130	166.000.000.000
6.	Plywood + penggergajian Kayu + Veneer + LVL	1	281.400	497	670.899.566.516
7.	Plywood + penggergajian Kayu + Chips	2	903.500	7.143	844.592.173.826
8.	Penggergajian Kayu + Veneer	5	227.000	2.193	79.966.255.904
9.	Penggergajian Kayu + wood chips	1	163.900	52	153.120.000.000
	Total B.	67	11.633.688	119.748	10.629.112.562.769
	Total A. dan B.	227	23.404.642	205.305	16.558.301.781.454

Gambaran tingkat produksi kayu olahan dalam negeri pada tahun 2008 adalah:

1. Kayu lapis : 3.353.479,03 m<sup>3</sup>
2. Veneer : 427.257,92 m<sup>3</sup>
3. Kayu gergajian : 530.688,39 m<sup>3</sup>

- 4. Pulp : 4.784.733,06 ton
- 5. Chipswood : 278.320,60 m<sup>3</sup>

Dari tingkat produksi industri pengolahan di atas, jumlah volume dan nilai ekspor masing-masing komoditas adalah:

1. Kayu lapis sebanyak 2.727.209 m<sup>3</sup>, dengan nilai ekspor sebesar US\$.1.272.991.839
2. Veeneer sebanyak 21.535 ton, dengan nilai ekspor sebesar US\$.23.793.889
3. Kayu gergajian sebanyak 72.845 m<sup>3</sup>, dengan nilai ekspor sebesar US\$.42.594.815
4. Particleboard sebanyak 5.450 m<sup>3</sup>, dengan nilai ekspor sebesar US\$.964.575

### **C. Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Hutan**

Sampai dengan tahun 2008, lahan kritis di seluruh wilayah Indonesia tercatat seluas 51,03 juta Ha, meliputi kategori agak kritis seluas 31,53 juta Ha, kritis seluas 14,72 juta Ha, dan sangat kritis seluas 4,78 juta Ha. Sedangkan dalam 3 tahun terakhir laju degradasi hutan, yang meliputi deforestasi dan degradasi fungsi tercatat rata-rata seluas 1,08 juta Ha per tahun.

Berkaitan dengan kegiatan-kegiatan konservasi sumberdaya alam, sampai saat ini terdapat kawasan konservasi seluas 27,9 juta Ha (25 % dari luas kawasan hutan di Indonesia seluas 109,9 juta Ha). Kawasan konservasi tersebut meliputi taman nasional sebanyak 50 unit dengan luas 16,33 juta Ha, hutan konservasi (cagar alam, suaka margasatwa, taman buru, taman wisata alam, dan taman hutan raya) seluas 11,6 juta Ha, serta hutan lindung seluas 29,04 juta Ha. Pemanfaatan kawasan konservasi lebih banyak diarahkan pada pemanfaatan "produk" jasa dari ekosistem hutan yang secara garis besar berupa:

1. Jasa penyediaan untuk menghasilkan berbagai komoditas kebutuhan manusia termasuk obat-obatan, sumber genetik, air, dll,
2. Jasa pengaturan untuk menjaga kualitas iklim, udara, air, erosi dan mengontrol berbagai aspek biologis di muka bumi,
3. Jasa kultural dalam membentuk identitas budaya, hubungan sosial, peninggalan pusaka, wisata, dll, dan
4. Jasa pendukung dalam membentuk formasi tanah, produk oksigen, habitat, dan siklus mineral.



Pelaksanaan dari kebijakan prioritas Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Hutan dilakukan melalui dua program, yaitu 1) Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumberdaya Alam, dan 2) Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumberdaya Alam ditujukan untuk meningkatkan fungsi dan daya dukung Daerah Aliran Sungai (DAS) melalui kegiatan pengelolaan DAS yang utamanya berupa pemantapan perencanaan, monitoring dan evaluasi, koordinasi dan sinkronisasi tata guna lahan DAS, serta peningkatan kelembagaan pengelolaan DAS. Sedangkan Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam diarahkan untuk meningkatkan upaya-upaya konservasi melalui kegiatan perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan sumberdaya alam.

Dalam kaitannya dengan pengelolaan DAS pada tahun 2008 telah disusun rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan DAS. Implementasi pelaksanaan Peraturan Pemerintah tersebut, pada tahun 2009 akan disusun Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan DAS Terpadu yang akan ditetapkan dengan Peraturan Menteri Kehutanan. Berdasarkan pedoman tersebut diharapkan dapat tersusun Rencana Pengelolaan DAS terpadu untuk 36 unit DAS Prioritas. Secara keseluruhan, diharapkan seluruh DAS Prioritas di Indonesia sebanyak 108 dapat diselesaikan rencana Pengelolaan DAS terpadunya pada periode pelaksanaan Renstra Departemen Kehutanan Tahun 2010-2014.

Dalam rangka pemulihan kondisi dan fungsi lahan-lahan kritis, khususnya pada DAS prioritas, sejak tahun 2003 telah dicanangkan Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Gerhan). Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2008 adalah penanaman pada kawasan hutan (reboisasi) seluas 69.935 Ha. Sedangkan kegiatan rehabilitasi lahan di luar kawasan hutan melalui kegiatan penghijauan telah dilakukan pembuatan hutan rakyat seluas 43.557 Ha dan penghijauan lingkungan (pada lahan-lahan publik seperti sekolah, turus jalan, mesjid, taman kota) telah dilakukan penanaman sebanyak 11.683.121 batang. Dalam rangka kampanye menanam guna meningkatkan peran serta masyarakat dalam Gerhan, telah dilakukan penanaman dengan "thema" Indonesia Menanam, dan Wanita Menanam sebanyak 10 juta batang, serta penanaman oleh instansi pemerintah, swasta dan kelompok-kelompok/lembaga-lembaga masyarakat, dengan realisasi sebanyak 108.947.048 batang pohon. Disamping itu, guna memulihkan kerusakan lahan pasca kegiatan penambangan telah dilakukan upaya reklamasi

lahan bekas tambang seluas 21.380 Ha. Dengan demikian, secara keseluruhan dalam upaya rehabilitasi hutan dan lahan melalui kegiatan reboisasi, penghijauan dan reklamasi, pada tahun 2008 telah dilakukan penanam pada areal seluas 1.084.320,23 Ha. Tabel 1 menunjukkan luasan penanam hutan pada tahun 2008.

Tabel 1. Realisasi luas penanaman dalam rangka rehabilitasi hutan dan lahan tahun 2008

No.	Jenis kegiatan	Luas Tanaman (Ha)
1	Penanaman dalam rangka Gerhan	368.137
2	Penanaman pada areal Perum Perhutani	117.501
3	Pebuatan hutan tanaman industri (HTI)	305.465
4	Pembuatan tanaman pengayaan pada areal IUPHHK-HA	12.438
5	Pembuatan tanaman hutan meranti	12.182
6	Pembuatan tanaman dalam rangka silvikultur intensif (silin)	52.301
7	Pembuatan tanaman oleh pemerintah daerah dengan sumber dana bagi hasil (DBH) dana reboisasi (DR)	49.039
8	Pembuatan tanaman oleh pemerintah daerah dengan sumber dana alokasi khusus (DAK) bidang kehutanan	4.182
9	Pembuatan tanaman dalam rangka hutan kemasyarakatan (HKm)	132.388
10	Penanaman dalam angka rehabilitasi/ restorasi kawasan konservasi	30.687
	Jumlah	1.084.320

Selain kegiatan-kegiatan dalam bentuk penanaman, kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, utamanya kegiatan rehabilitasi lahan, telah dilakukan kegiatan-kegiatan pembuatan bangunan sipil teknis konservasi tanah dan air. Pencapaian kegiatan pada tahun 2008 antara lain pembuatan dam pengendali sebanyak 3 unit, dam penahan 22 unit, dan *gully plug* 50 unit. Sedangkan dalam rangka pengembangan kelembagaan rehabilitasi hutan dan lahan telah dilakukan penyusunan pedoman/ petunjuk teknis, bimbingan dan monitoring, serta fasilitasi penguatan

forum-forum dan kelompok kerja yang terkait dengan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan.

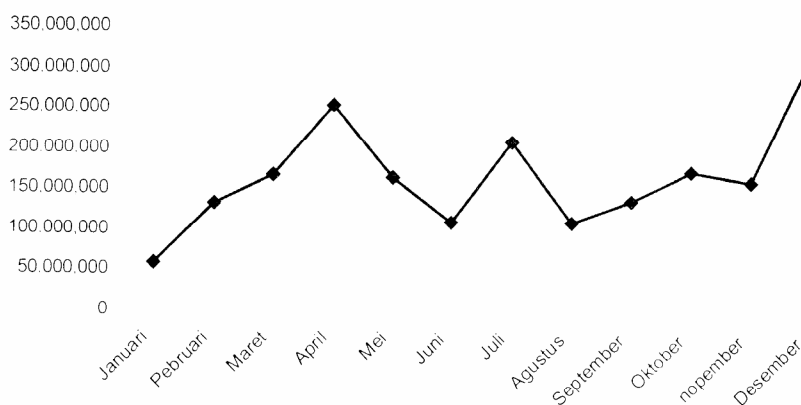
Berkenaan dengan kegiatan konservasi sumberdaya hutan dalam kerangka implementasi Kebijakan Prioritas Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Hutan, dalam tahun 2008 telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan dalam Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam, berupa pengendalian kebakaran hutan dan lahan, pengelolaan taman nasional termasuk taman nasional model dan kawasan konservasi lainnya, pengelolaan keanekaragaman hayati, dan pengembangan jasa lingkungan dan wisata alam.

Dalam rangka penanggulangan kebakaran hutan, dalam tahun 2008 tercatat sebanyak 30.616 hotspot, atau berkurang 19.24 % dari tahun 2007 dengan jumlah 37.909 hotspot. Upaya pengendalian kebakaran lahan dan hutan dilakukan melalui peningkatan kapasitas dan pematapan kelembagaan brigade pengendalian kebakaran hutan Manggala Agni, termasuk peningkatan sarana dan prasarana pemadaman, serta koordinasi pengendalian kebakaran hutan di tingkat pusat dan daerah, khususnya dilakukan pada daerah-daerah rawan kebakaran hutan. Kegiatan tersebut antara lain pembentukan regu Manggala Agni sebanyak 114 regu, pembangunan daerah operasi di 30 lokasi pada 10 propinsi rawan kebakaran lahan dan hutan, pembentukan Satuan Manggala Agni Reaksi Taktis (SMART), serta kampanye dan penyuluhan tentang pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Untuk menekan jumlah hotspot telah dilakukan pemantauan dan deteksi dini, peningkatan intensitas patroli udara dan pemadaman dini serta pengaktifan posko yang beroperasi selama 24 jam pada bulan-bulan rawan kebakaran.

Dalam rangka pengelolaan kawasan konservasi, sampai dengan akhir tahun 2008 telah dilakukan pengelolaan sebanyak 50 unit taman nasional dengan luas 16,33 juta Ha diantaranya 21 unit merupakan taman nasional model, cagar alam sebanyak 247 unit (4,6 juta Ha), suaka margasatwa sebanyak 77 unit ( 5,4 juta Ha), taman wisata alam sebanyak 123 unit seluas 1,03 juta ha, taman buru 14 unit (225 ribu Ha), dan taman hutan raya 22 unit ( 344 ribu Ha), yang tersebar di seluruh propinsi di Indonesia. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan antara lain pematapan kelembagaan, termasuk pengembangan taman nasional menjadi unit kesatuan pengelolaan hutan konservasi (KPHK), pengembangan pariwisata alam, perlindungan dan pengamanan,

restorasi, pemanfaatan potensi, dan pengembangan/pemberdayaan masyarakat.

Berkenaan dengan pengelolaan keanekaragaman hayati telah disusun Rencana Aksi guna penyelamatan spesies kunci satwa langka, seperti badak jawa, orangutan, gajah sumatera, gajah kalimantan, dan harimau sumatera, serta arahan strategis pengelolaan spesies prioritas. Selain itu, secara rutin dilakukan pembinaan/pemeliharaan habitat satwa guna menjaga kualitas hidup satwa-satwa yang dilindungi. Dalam kaitan dengan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar (TSL), dalam tahun 2008 telah dilakukan upaya penangkaran satwa liar seperti buaya, ular, kera ekor panjang, dan rusa. Guna penyelamatan satwa liar, telah dilakukan pelestarian eksitu satwa-satwa yang dilindungi di 34 unit Lembaga Konservasi (3 unit taman safari, 6 unit kebun binatang, 2 unit museum zoologi, 14 unit taman satwa dan 9 taman satwa khusus). Dari kegiatan pemanfaatan satwa liar telah dilakukan ekspor dengan nilai sebesar US\$.198.626,440 atau setara Rp.1.986.269.440 (1 US\$=Rp.10.000,-). Nilai ekspor ini menurun sebanyak 20 % dibandingkan dengan perolehan pada tahun 2007 sebesar Rp.2.372.088.544. Berdasarkan grafik tahunan, nilai penerimaan dari ekspor satwa liar pada tahun 2008 menunjukkan nilai penerimaan tertinggi sebesar equivalent Rp.315,97 juta adalah pada bulan Desember. Selanjutnya tiga urutan penerimaan bulanan terbesar adalah pada bulan April, Juli dan Desember. Grafik yang merupakan gambaran penerimaan dari pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar (TSL) pada tahun 2008 adalah sebagaimana pada Gambar 1 di bawah.



Gambar 1. Penerimaan pengangkutan TSL 2008 (Rp )

Dalam rangka pengembangan pariwisata alam, sampai dengan akhir tahun 2008 terdapat 25 unit Ijin (definitif) Pemanfaatan Pariwisata Alam (IPPA). Dari kegiatan pengembangan pariwisata alam telah diperoleh penerimaan negara yang berasal dari tiket masuk kunjungan wisatawan sebesar Rp.6.415.303.564. Jumlah tersebut meningkat sebesar 25% dibandingkan dengan penerimaan tahun 2007. Sedangkan prakiraan penerimaan negara dari kegiatan pariwisata alam di lingkup Departemen Kehutanan pada tahun 2009 adalah sebesar Rp.8.500.000.000, atau meningkat sebesar 32,5% dibandingkan penerimaan tahun 2008. Dari kegiatan pariwisata alam, selain dapat memberikan manfaat berupa penerimaan negara bukan pajak (PNBP), kegiatan tersebut telah memberikan manfaat ganda terhadap penerimaan daerah dan penerimaan masyarakat secara luas sebagai manfaat ganda (*multiplier effects*) jasa wisata alam yang memacu tumbuhnya jasa-jasa lainnya seperti jasa transportasi, hotel dan penginapan, makanan/minuman, industri khususnya kerajinan, dan lain-lain bentuk jasa, yang keseluruhannya merupakan nilai langsung dan tidak langsung kegiatan pariwisata wisata. Guna meningkatkan kapasitas pengelolaan pariwisata alam akan terus dilakukan pengembangan potensi pariwisata alam termasuk sarana dan prasarana, serta kapasitas pengelolaan termasuk promosi wisata.

#### **D. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Dalam dan Sekitar Kawasan Hutan**

Jumlah desa yang berhubungan dengan kawasan hutan saat ini tercatat sebanyak 31.957 desa, yang terdistribusi di dalam kawasan hutan sebanyak 1.305 desa (4,08%), tepi kawasan hutan sebanyak 7.943 (24,86%) dan di sekitar kawasan hutan sebanyak 22.709 (71,06%). Propinsi terbanyak untuk desa di dalam kawasan adalah Kalimantan Tengah (sebanyak 208 desa), dan Jawa Tengah (sebanyak 1.581 di tepi kawasan hutan dan 6.795 desa di sekitar kawasan hutan). Sedangkan jumlah penduduk yang berada di dalam kawasan hutan tercatat sekitar 1,8 juta jiwa.

Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung kebijakan prioritas Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Dalam dan Sekitar Kawasan Hutan, dilakukan melalui kegiatan pengembangan dan pemberdayaan perekonomian masyarakat (*community economic empowerment*) melalui pengembangan hutan kemasyarakatan, hutan rakyat, hutan desa, dan

pengembangan desa konservasi. Peningkatan usaha perekonomian masyarakat dilakukan melalui pengembangan komoditas kehutanan berupa kayu dan non kayu/hasil hutan bukan kayu (HHBK) seperti rotan, getah-getahan, buah-buahan, umbi-umbian, serta usaha jasa pariwisata alam.

Dalam rangka pengembangan hutan kemasyarakatan (HKm) dalam tahun 2008 telah dilakukan pengembangan pengelolaan HKm berupa penetapan areal HKm sebanyak 57 unit dengan areal seluas 8.811,06 ribu Ha, pemberian ijin HKm sebanyak 57 unit (8.811,06 ribu Ha), fasilitasi kemitraan HKm, fasilitasi masyarakat dalam pengelolaan HKm, serta fasilitasi pembentukan kelompok tani HKm. Usaha masyarakat di bidang kehutanan serta sejalan dengan upaya rehabilitasi lahan di luar kawasan hutan (penghijauan), telah dibuat hutan rakyat (HR) seluas 86.324 Ha yang dilakukan oleh 864 unit kelompok tani. Guna penguatan kapasitas kelembagaan kelompok tani dalam pengelolaan HR telah dilakukan peningkatan keterampilan petani dalam bentuk pelatihan dan penyuluhan masyarakat, pendampingan dan pembinaan kelompok tani HR sebanyak 360 unit, pembuatan rancangan model kemitraan HR sebanyak 40 unit rancangan, pembuatan HR kemitraan seluas 22.862 Ha yang terdiri dari 5.000 Ha yang didukung dana non APBN (kemitraan umum) dan 17.862 Ha dengan dukungan pembiayaan dari APBN (Gerhan).

Terkait dengan pengembangan hutan desa, telah dilakukan fasilitasi pengelolaan hutan desa untuk 1 unit lembaga, penetapan areal kerja hutan desa seluas 2.356 Ha, dan fasilitasi kemitraan hutan desa sebanyak 1 unit. Sedangkan dalam kaitannya dengan kegiatan pengembangan HHBK telah dibentuk sentra HHBK sebanyak 10 unit, penetapan HHBK unggulan sebanyak 6 jenis, fasilitasi produksi HHBK sebanyak 10 unit, penguatan kelembagaan petani HHBK, dan pengembangan kemitraan industri dan petani HHBK, serta mendorong pengembangan industri pengolahan HHBK.

Kegiatan pengembangan ekonomi masyarakat yang terkait dengan kegiatan usaha pemanfaatan hutan produksi telah dilakukan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) serta kegiatan bina desa hutan sebanyak 181 unit yang dilakukan melalui kemitraan dengan perusahaan pengelola dan pemegang ijin pemanfaatan hutan produksi. Terkait dengan kegiatan konservasi sumberdaya alam telah dilakukan pengembangan desa konservasi sebanyak 132 unit. Sedangkan guna

memberikan akses masyarakat terhadap usaha ekonomi dibidang kehutanan termasuk aspek permodalannya pada Departemen Kehutanan telah dibentuk Badan Layanan Umum (BLU) yang akan memberikan fasilitasi kelembagaan serta permodalan kepada masyarakat dalam pengembangan hutan tanaman industri (masyarakat) dan hutan tanaman rakyat (HTR). Untuk kegiatan tersebut, mulai tahun 2008 pada BLU telah disediakan dana usaha sebesar Rp.1,4 trilyun dan untuk tahun 2009 akan ditambah menjadi sebesar Rp.1,7 trilyun.

Secara struktur, kegiatan-kegiatan diuraikan di atas merupakan bagian dari pelaksanaan Program Pemantapan Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan, Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumberdaya Alam, dan Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam. Dalam konteks pembangunan kehutanan, ketiga program tersebut merupakan perangkat dalam rangka pelaksanaan kebijakan prioritas pembangunan kehutanan yang keempat yaitu Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Dalam dan Sekitar Kawasan Hutan.

#### **E. Pemantapan Kawasan Hutan**

Implementasi kebijakan prioritas pembangunan yang kelima yaitu Pemantapan Kawasan Hutan yang dilaksanakan melalui Program Pemantapan Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan dan Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup. Kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan Program Pemantapan Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan adalah pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan dan pembentukan wilayah pengelolaan dan perubahan kawasan hutan dengan kegiatan utama pembangunan kesatuan pengelolaan hutan (KPH). Sedangkan kegiatan-kegiatan yang merupakan pelaksanaan Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup, meliputi pengembangan rencana dan statistik kehutanan, inventarisasi hutan dan pengembangan informasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup serta perencanaan dan pembinaan prakondisi pengelolaan hutan.

Dalam rangka penetapan kawasan hutan, sampai dengan akhir tahun 2008 telah diselesaikan kajian terhadap perubahan kawasan hutan di 12 provinsi dan penyusunan draft peta penunjukkan kawasan hutan sebanyak 8 provinsi yaitu Riau dan Kalimantan Tengah serta 6 provinsi pemekaran. Sedangkan propinsi-propinsi yang belum dilakukan penyelesaian paduserasi dan penunjukkan kawasan hutan diharapkan

dapat diselesaikan dalam tahun 2009. Untuk kegiatan penataan batas kawasan hutan, hingga tahun 2007 telah dilakukan tata batas luar kawasan hutan sepanjang 167,1 ribu Km dan batas fungsi sepanjang 51,9 ribu Km. Sedangkan pencapaian tahun 2008, pembuatan batas kawasan hutan berupa pemancangan sementara tata batas sepanjang 759 Km dan pemancangan batas definitif tata batas sepanjang 180 Km. Tahun 2009, diharapkan dapat dilakukan penataan batas sepanjang 3.885 km. Terhadap tanda/pal batas yang telah mengalami kerusakan, pada tahun 2008 telah dilakukan rekonstruksi / pemasangan kembali / pemeliharaan tanda / pal batas luar sepanjang 3.313 Km.

Berkenaan dengan penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan di luar kehutanan, dalam tahun 2008 telah dilakukan penelaahan dan memberikan pertimbangan teknis sebanyak 30 unit lokasi. Jumlah tersebut meningkat 30,4% dibanding kegiatan yang sama pada tahun 2007. Sedangkan penyelesaian kompensasi penggunaan kawasan hutan dalam tahun 2008 telah dilakukan penyelesaian administrasi pada 109 lokasi atau 40% dari jumlah permohonan. Untuk tahun 2009 diharapkan dapat dilakukan penyelesaian kompensasi penggunaan lahan di 10 lokasi, identifikasi areal tambang untuk batubara, biji besi dan emas di 3 kabupaten, dan penelaahan penggunaan kawasan hutan di 10 lokasi. Untuk pelepasan kawasan hutan, hingga tahun 2007 dilakukan pelepasan untuk pemukiman transmigrasi sebanyak 256 unit (956,7 ribu Ha) dan tahap izin prinsip pelepasan sebanyak 436 unit dengan areal seluas 605.203,66 ha. Sedangkan untuk areal usaha budidaya perkebunan telah diterbitkan keputusan pelepasan kawasan hutan sebanyak 12 unit (228,2 ribu Ha) dan tahap pencadangan sebanyak 11 unit seluas 93,3 ribu Ha. Sedangkan pencapaian kegiatan tahun 2008, untuk areal usaha budidaya perkebunan sebanyak 8 unit.

Dalam rangka alih fungsi kawasan hutan, dalam tahun 2008 telah dilakukan pengkajian terpadu pada 8 lokasi dan dapat menyelesaikan tukar menukar kawasan hutan untuk pembangunan non kehutanan sebanyak 19 lokasi. Disamping itu, telah dilakukan penanganan permasalahan hukum bidang planologi kehutanan di 32 lokasi. Guna mengharmoniskan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan proses penggunaan kawasan hutan, dilakukan pemutakhiran dan konsiliasi data dengan pihak-pihak terkait melalui rapat koordinasi dan konsultasi.

Dalam rangka meningkatkan kapasitas dan pematapan pengelolaan kawasan hutan dan sebagai implementasi Peraturan Pemerintah Nomor



6 Tahun 2007 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan telah dilakukan proses pembentukan kesatuan pengelolaan hutan (KPH) khususnya Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan hutan Produksi (KPHP) di seluruh Indonesia kecuali DKI dan wilayah kerja Perum Perhutani di Pulau Jawa. Sedangkan untuk Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK), telah dimulai penyiapan rumusan kebijakan untuk transformasi unit-unit taman nasional menjadi KPHK. Progres pelaksanaan kegiatan sampai dengan tahun 2008 adalah pembuatan rancang bangun KPH sebanyak 23 provinsi, arahan pencadangan KPH (KPHP dan KPHL) oleh Kepala Badan Planologi Kehutanan sebanyak 15 provinsi, pengusulan penetapan wilayah KPH (KPHP dan KPHL) oleh gubernur kepada Menteri Kehutanan sebanyak 4 provinsi dan penetapan wilayah KPH (KPHP dan KPHL) oleh Menteri Kehutanan sebanyak 1 provinsi. Hingga tahun 2009, diharapkan dapat diselesaikan pembuatan rancang bangun KPH (sebanyak 27 provinsi), arahan pencadangan KPH (KPHP dan KPHL) sebanyak 27 provinsi, pengusulan penetapan wilayah KPH (KPHP dan KPHL) sebanyak 28 provinsi dan penetapan wilayah KPH (KPHP dan KPHL) oleh Menteri Kehutanan sebanyak 28 provinsi.

Implementasi pembangunan KPH di lapangan ditempuh melalui pendekatan pembangunan KPH model yang pada hakekatnya merupakan KPH persiapan menuju KPH yang operasional di lapangan. Target pembangunan KPH model dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 adalah satu unit tiap provinsi atau sebanyak 23 unit di 22 provinsi (khusus Provinsi Kalimantan Selatan terdapat 2 unit KPH) yang terdiri dari KPHK sebanyak 2 unit, KPHL 6 unit dan KPHP 15 unit. Dalam tahun 2009 akan diselesaikan pembangunan KPH model sebanyak 5 unit di 5 provinsi yang terdiri dari KPHL sebanyak 1 unit dan KPHP 4 unit.

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup, antara lain pengembangan rencana dan statistik kehutanan meliputi penyusunan rencana termasuk evaluasi dan analisis PDRB hijau sektor kehutanan, inventarisasi dan pengembangan informasi sumberdaya hutan tingkat nasional, tingkat wilayah dan tingkat unit pengelolaan, penyediaan data dasar antara lain berupa input dan updating data spasial, pembuatan peta tematik serta pengembangan

database pengukuhan kawasan hutan, serta pembangunan jaringan sistem informasi kehutanan.

#### **F. Pendukung Kebijakan Prioritas**

Guna memfasilitasi pelaksanaan lima kebijakan prioritas pembangunan kehutanan di atas, pada Departemen Kehutanan telah dilakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka mendukung pelaksanaan kebijakan dimaksud berupa penyelenggaraan tata administrasi pemerintahan, pengembangan SDM, penelitian dan pengembangan serta pengawasan dan pengendalian. Aspek-aspek penyelenggaraan dukungan pelaksanaan kebijakan prioritas tersebut dilaksanakan melalui Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik, Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara, Program Penelitian dan Pengembangan Iptek, dan Program Pendidikan Kedinasan.

Bagian dari pelaksanaan Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik adalah pelaksanaan tugas-tugas rutin administrasi pemerintahan berupa pembinaan dan pengembangan pegawai serta operasionalisasi perkantoran pada seluruh unit kerja di lingkup Departemen Kehutanan. Kegiatan-kegiatan lain yang merupakan fungsi pemerintahan umum antara lain pengembangan barang milik negara, pengelolaan administrasi keuangan, penyelenggaraan perencanaan, monitoring dan evaluasi, penyempurnaan dan pengembangan peraturan perundang-undangan serta organisasi, penyelenggaraan kerjasama internasional, pengembangan informasi kehutanan, pengendalian pembangunan kehutanan, serta pengembangan dan pembinaan standarisasi kehutanan dan lingkungan.

Guna menciptakan penyelenggaraan tata kelola administrasi pemerintahan dan pembangunan di lingkup Departemen Kehutanan, dalam tahun 2008 telah dilakukan audit kinerja dan audit khusus. Disamping itu, telah dilakukan review laporan keuangan dan tindak lanjut hasil audit.

Upaya-upaya dalam rangka penyediaan paket Iptek baik berupa informasi ilmiah dan teknologi terapan, untuk opsi masukan pembuatan kebijakan maupun perbaikan dalam berbagai aspek pengelolaan hutan, dilakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan (litbang) kehutanan. Pencapaian kegiatan litbang kehutanan tahun 2008 antara lain berupa penyediaan produk Iptek

untuk peningkatan kualitas hutan produksi, rehabilitasi lahan kritis, reklamasi lahan bekas tambang, peningkatan kualitas dan produksi hutan tanaman melalui bioteknologi dan pemuliaan tanaman hutan, pengelolaan DAS, pengelolaan kawasan konservasi dan pelestarian keanekaragaman hayati, pengembangan hutan rakyat, budidaya dan pemanfaatan HHBK, teknologi pengolahan hasil hutan, pemanfaatan jasa hutan terutama air dan karbon, serta informasi ilmiah yang terkait dengan dinamika ekosistem hutan dan sifat dasar hasil hutan. Guna memasyarakatkan hasil-hasil litbang kehutanan serta meningkatkan kualitas hasil litbang, dalam tahun 2008 telah dilakukan gelar teknologi, pameran, publikasi ilmiah, kerjasama kelitbangan, serta sertifikasi manajemen mutu organisasi dan laboratorium.

Guna memperkuat kapasitas masyarakat dalam pengelolaan hutan dilakukan upaya-upaya peningkatan pengetahuan, keterampilan serta sikap melalui kegiatan penyuluhan kehutanan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (PPK), sampai dengan tahun 2008 di tingkat propinsi telah terbentuk 21 unit Badan Koordinasi Penyuluhan, sedangkan di tingkat kabupaten/kota telah terbentuk Badan Penyuluhan pada 223 kabupaten/kota. Selain itu, untuk meningkatkan kapasitas penyuluhan, kepada seluruh pejabat fungsional Penyuluh Kehutanan diberikan biaya/dana operasional bulanan serta peningkatan sarana dan prasarana penyuluhan berupa kendaraan operasional roda 2 (motor) serta perangkat media penyuluhan.

Dalam rangka meningkatkan kualitas SDM dalam pengelolaan hutan antara lain dilakukan melalui proses pendidikan dan pelatihan (diklat). Kegiatan diklat yang diselenggarakan oleh Departemen Kehutanan ditujukan bagi pegawai Departemen Kehutanan, pegawai kehutanan pada satuan kerja perangkat daerah kehutanan (propinsi dan kabupaten/kota), pegawai pada instansi pemerintah terkait di luar Departemen Kehutanan, serta masyarakat yang menjadi para pihak pada sektor kehutanan. Pencapaian kegiatan diklat dalam tahun 2008 berupa pendidikan formal tingkat menengah kejuruan kehutanan sebanyak 120 orang, lulusan jenjang magister pada berbagai disiplin ilmu, dan lulusan jenjang doktoral. Sedangkan untuk peningkatan keterampilan melalui kegiatan diklat, telah dilakukan diklat bagi pegawai dan non pegawai pada berbagai bentuk diklat keterampilan teknis dan keterampilan administratif termasuk kapasitas kepemimpinan.

### BAB III VISI, MISI, DAN SASARAN TAHUN 2010

Penetapan Visi dan Misi Penyelenggaraan Rencana Kerja Kehutanan Departemen Kehutanan Tahun 2010 didasarkan dan mengacu pada kebijakan umum pembangunan nasional serta tugas dan fungsi yang menjadi embanan Departemen Kehutanan. Didalam Renja Departemen Kehutanan Tahun 2010, pernyataan visi dan misi pembangunan kehutanan yang diselenggarakan oleh Departemen Kehutanan masih bersifat indikatif. Hal ini dikarenakan di dalam struktur perencanaan tahunan diperlukan adanya landasan teknis yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra), sedangkan dalam penyusunan dan penetapan Renja Departemen Kehutanan Tahun 2010 ini Renstra Departemen Kehutanan Tahun 2010-2014 belum ditetapkan, dengan mengingat RPJMN Tahun 2010-2014 belum ditetapkan dan akan ditetapkan pada bulan Januari 2010.

#### A. Visi dan Misi

Visi pembangunan kehutanan yang diselenggarakan Departemen Kehutanan adalah **Optimalisasi Pengurusan Hutan Guna Mewujudkan Hutan Lestari untuk Sebesar-besar Kesejahteraan Masyarakat.**

Untuk mewujudkan visi di atas, ditetapkan misi pembangunan kehutanan tahun 2010-2014 sebagai berikut:

1. Memantapkan kepastian status kawasan kawasan hutan serta kualitas data dan informasi kehutanan guna mewujudkan prakondisi pengelolaan sumberdaya hutan secara optimal.
2. Meningkatkan produksi dan diversifikasi produk hasil hutan dan jasa kehutanan yang berdaya saing, serta memperkuat struktur industri kehutanan.
3. Memantapkan penyelenggaraan perlindungan dan konservasi sumberdaya alam, serta menurunkan gangguan keamanan hutan dan hasil hutan.

4. Memelihara dan meningkatkan fungsi dan daya dukung daerah aliran sungai (DAS) sehingga dapat meningkatkan optimalisasi fungsi ekologi, ekonomi dan sosial pengelolaan DAS.
5. Meningkatkan ketersediaan produk teknologi dasar dan terapan serta kompetensi SDM dalam mendukung penyelenggaraan pengurusan hutan secara optimal.
6. Memantapkan kelembagaan penyelenggaraan tata kelola kehutanan Departemen Kehutanan.

Penetapan misi di atas, dimaksudkan untuk mencapai arahan sasaran strategis pembangunan kehutanan tahun 2010-2014 meliputi:

1. Tersedianya teknologi dasar dan terapan pengelolaan sumberdaya hutan, serta dukungan informasi kebijakan pengelolaan hutan lestari.
2. Meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM kehutanan guna mendukung penyelenggaraan pengurusan hutan secara efisien.
3. Tata batas kawasan hutan sepanjang 17.000 km untuk mendukung penetapan 80% kawasan hutan yang telah tata batas temu gelang.
4. Penetapan wilayah KPH disetiap provinsi dan terbentuknya 20% kelembagaan KPH di seluruh Indonesia.
5. Penambahan luas ijin usaha hutan tanaman dari 7,2 juta Ha menjadi 15 juta Ha (gross) dan penanaman hutan tanaman sebesar 70% dari luas ijin usaha atau terdapat penambahan penanaman seluas 5 juta Ha sehingga kumulatif menjadi seluas 10 juta Ha, serta 50 unit manajemen hutan tanaman bersertifikat pengelolaan hutan lestari (PHL).
6. Peningkatan sebesar 5% produksi hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan, peningkatan sebesar 50% unit IUPHHK bersertifikat PHPL, peningkatan sebesar 50% produksi dari tebangan bersertifikat sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK), 30 unit unit usaha jasa ekowisata, 5 unit usaha jasa kelola air, 2 unit usaha jasa karbon.
7. Sebanyak 75% industri pengolahan hasil hutan kayu (IPHHK) berbahan baku kayu diameter kecil/hutan tanaman/limbah, peningkatan 50% sebesar produk IPHHK bersertifikat SVLK dan peningkatan sebesar 10% efisiensi penggunaan bahan baku industri.
8. Peningkatan sebesar 25% PNBK kayu dan bukan kayu dan terimplementasikannya sistem informasi penatausahaan hasil hutan (SIM PUHH) secara *on-line*.

9. Sebanyak 75% DAS prioritas telah memiliki rencana pengelolaan DAS terpadu.
10. Tersedianya areal pengelolaan hutan kemasyarakatan seluas 2 juta Ha, penambahan 50% areal hutan rakyat, 200 unit hutan desa, fasilitas pengembangan sentra HHBK
11. Penanaman areal rehabilitasi hutan dan lahan serta fasilitasi penanaman lahan kritis dengan areal tanaman seluas 5 juta Ha.
12. Terkelolanya konservasi ekosistem, tumbuhan dan satwa liar sebagai potensi pemanfaatan sumber plasma nutfah di dalam dan di luar unit pengelolaan hutan lestari.
13. Menurunnya tingkat perambahan lahan dalam kawasan hutan, *illegal logging*, dan *wildlife trafficking* sampai dengan batas minimal daya dukung sumberdaya hutan, menurunnya tingkat konflik manusia satwa, serta terkendalinya kebakaran lahan dan hutan secara efektif.
14. Meningkatnya kapasitas, efisiensi dan efektivitas tata kelola pemerintahan pada unit-unit kerja lingkup Departemen Kehutanan.

Guna mencapai sasaran-sasaran di atas, maka ditetapkan kebijakan prioritas pembangunan kehutanan tahun 2010-2014 sebagai berikut:

1. Melanjutkan upaya-upaya perlindungan dan pengamanan hutan guna meminimalisir kegiatan pencurian kayu di hutan negara, perambahan kawasan hutan serta perdagangan dan peredaran hasil hutan illegal serta tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi.
2. Pemantapan status hukum dan peningkatan kapasitas pengelolaan kawasan hutan.
3. Rehabilitasi hutan yang terdegradasi dan lahan kritis di luar kawasan hutan guna meningkatkan daya dukung dan fungsi daerah aliran sungai (DAS).
4. Pemantapan penyelenggaraan konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya
5. Peningkatan produksi hasil hutan guna memperkuat daya saing ekonomi domestik.
6. Pemantapan kelembagaan pengelolaan sumberdaya hutan, dan pengembangan Iptek serta kapasitas SDM Kehutanan.

## **B. Isu-Isu Strategis**

Didalam penyelenggaraan pembangunan kehutanan kedepan terdapat beberapa isu-isu strategis yang berkembang pada tatanan global, nasional maupun lokal. Beberapa isu strategis yang menjadi dasar dalam penetapan sasaran pembangunan kehutanan yang dilaksanakan Departemen Kehutanan Tahun 2010 antara lain:

1. Intensitas dan frekuensi bencana alam berupa banjir dan tanah longsor yang mengindikasikan rendahnya fungsi DAS di dalam pengaturan tata air.
2. Kawasan hutan belum dikelola dalam kesatuan manajemen sesuai dengan fungsinya masing-masing (konservasi, lindung, dan produksi).
3. Meningkatnya kebutuhan lahan untuk kegiatan pembangunan di luar sektor kehutanan sehingga mendorong semakin banyaknya permintaan alih fungsi kawasan hutan.
4. Masih maraknya praktek-praktek illegal/kejahatan di sektor kehutanan seperti pembalakan, perambahan kawasan hutan dan perdagangan kayu serta hasil hutan lainnya, dan peredaran dan perdagangan tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi, yang antara lain disebabkan masih terbatasnya dukungan dengan sistem, personel, sarana dan prasarana yang memadai.
5. Sering terjadi konflik "manusia-satwa" yang mengakibatkan belum terjaminnya kelestarian spesies kunci satwa liar yang dilindungi.
6. Kesenjangan antara potensi hutan dengan kapasitas terpasang industri pengolahan hasil hutan. Disatu pihak produksi dari hutan tanaman dan hutan rakyat belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan pasokan bahan baku industri hasil hutan.
7. Masih rendahnya efisiensi industri kehutanan.
8. Pengelolaan/pemanfaatan sumberdaya hutan dalam kerangka perubahan iklim, khususnya efektivitas perumusan pendanaan terkait dengan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
9. Belum optimalnya kapasitas kelembagaan dan penyediaan produk Iptek serta masih rendahnya kualitas SDM dalam pengelolaan sumberdaya hutan.

## **C. Sasaran Stategis Pembangunan Tahun 2010**

Sasaran strategis pembangunan kehutanan Tahun 2010 disusun dengan mengacu pada Sasaran Strategis Tahun 2010-2014 dengan tetap

memperhatikan embanan tugas umum pemerintahan dan pembangunan yang terepresentasi dari program-program Departemen Kehutanan, prioritas pembangunan kehutanan tahun 2010, serta harmonisasi penyelenggaraan pembangunan kehutanan Pusat dan Daerah. Sasaran startegis pembangunan kehutanan 2010 adalah sebagai berikut:

1. Optimaliasasi penyelenggaraan tata pemerintahan dan pembangunan sektor kehutanan opada 269 unit kerja lingkup Departemen Kehutanan.
2. Meningkatkan efektifitas sistem pengawasan dan audit serta akuntabilitas kinerja guna mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan bebas KKN.
3. Tersedianya data dan informasi teknologi, modeling, pedoman, hasil kajian dan hasil rekayasa alat terkait dengan landsekap hutan, pengelolaan hutan alam, pengelolaan hutan tanaman, pengelolaan biodiversitas, budidaya hasil hutan bukan kayu, pengelolaan DAS, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, pengolahan hasil hutan dan kebijakan kehutanan, serta penerapan hasil litbang berupa gelar teknologi, penerbitan jurnal dan penyelenggaraan seminar.
4. Menurunnya tindak pidana dibidang kehutanan sebesar 50% dari tindak pidana yang terjadi tahun 2009.
5. Terbentuknya/penetapan 10% dari kawasan hutan produksi menjadi areal kesatuan pengelolaan hutan produksi (KPHP).
6. 10% produksi penebangan bersertifikat sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK).
7. Peningkatan produksi hasil hutan sebesar 1%.
8. Pembuatan tanaman HTI dan HTR baru seluas 800.000 Ha.
9. Peningkatan PNBP pemanfaatan kayu sebesar 5%.
10. Pembuatan tanda batas luar kawasan hutan sepanjang 2.000 Km dan tanda batas fungsi kawasan hutan sepanjang 1.400 Km.
11. Penetapan wilayah KPHP dan KPHL di 4 propinsi dan penetapan wilayah KPHK sebanyak 20 unit.
12. Menurunnya jumlah *hotspot* (titik api) sampai dengan dampak asap tidak mengganggu tingkat kesehatan masyarakat setempat serta tidak mengganggu negara tetangga.
13. Penyelesaian kasus perambahan di kawasan konservasi sebanyak 20%.



14. Populasi spesies kunci yang terancam punah minimal stabil atau bertambah sesuai kemampuan biologis dan habitat.
15. 50% pemegang ijin Pemanfaatan Pariwisata Alam (IPPA) berusaha secara sehat.
16. Rencana Pengelolaan DAS Terpadu untuk 18 unit DAS prioritas.
17. Penanaman pohon dalam rangka rehabilitasi hutan dan lahan seluas 100.000 hektar.
18. Penetapan areal kerja hutan kemasyarakatan (HKm) seluas 420.000 hektar.
19. Fasilitasi penanaman pohon dalam rangka penghijauan lingkungan dalam kerangka "Indonesia Menanam" sebanyak 320 juta batang.
20. Terbentuknya 80 unit model penyuluhan di kabupaten/kota yang sudah terbentuk Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (P3K).
21. Terbentuknya 20 unit model penyuluhan responsif jender di kabupaten/kota yang sudah terbentuk Badan Pelaksana P3K.
22. Penggunaan teknologi penginderaan jauh untuk pemetaan penutupan lahan pada kawasan hutan KPH di 25 lokasi
23. Pendidikan dan pelatihan bagi 5.530 orang peserta
24. Lulusan pendidikan sekolah menengah kejuruan (SMK) Kehutanan sebanyak 40 orang.

BAB IV  
RENCANA KERJA TAHUN 2010

**A. Prioritas dan Fungsi Pembangunan Kehutanan**

Terkait dengan isu-isu kehutanan nasional dan global serta realita tantangan pembangunan kehutanan masa kini dan mendatang, maka di dalam konteks pembangunan nasional di bidang sumberdaya alam dan lingkungan hidup, prioritas pembangunan sektor kehutanan di dalam RPJMN Tahun 2010-2014 diarahkan pada tiga upaya pokok, yaitu 1) konservasi sumberdaya air, 2) peningkatan daya dukung lingkungan, dan 3) adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Selanjutnya dalam struktur RKP Tahun 2010 yang memiliki thema "Pemulihan Perekonomian Nasional dan Pemeliharaan Kesejahteraan Rakyat", pembangunan sektor kehutanan "diposisikan" sebagai berikut:

1. Termasuk dalam dua, dari lima, prioritas pembangunan nasional, yaitu:
  - a. Prioritas pembangunan keempat, *Pemulihan Ekonomi Yang Didukung Oleh Pembangunan Pertanian, Infrastruktur dan Energi* pada Sub Prioritas *Pertumbuhan Ekonomi*. Arah pembangunan sektor kehutanan pada prioritas pembangunan tersebut adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kegiatan-kegiatan proses produksi hasil hutan berupa produk kayu dan produk non kayu (hasil hutan bukan kayu/HHBK) serta produk-produk industri pengolahan hasil hutan, serta produk jasa lingkungan. Proses produksi tersebut baik menyangkut aspek teknis budidaya maupun dan aspek kelembagaan, termasuk dalam kerangka upaya-upaya peningkatan produksi hasil hutan yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat.
  - b. Prioritas pembangunan kelima, *Peningkatan Kualitas Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Kapasitas Penangan Perubahan Iklim*. Pembangunan sektor kehutanan pada prioritas pembangunan ini diarahkan guna mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui perlindungan hutan dan konservasi sumberdaya alam beserta ekosistemnya, serta peningkatan fungsi dan daya dukung daerah aliran sungai (DAS).
2. Pada prioritas pembangunan nasional yang keempat, untuk sektor kehutanan terdapat satu fokus kegiatan pembangunan nasional, yaitu

*Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.* Fokus pembangunan tersebut lebih diarahkan untuk mendorong dan meningkatkan fungsi ekonomi dalam pemanfaatan sumberdaya hutan, khususnya dalam kaitan dengan produksi hasil hutan, termasuk penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari pemanfaatan sumberdaya hutan.

Kegiatan-kegiatan sektor kehutanan yang menjadi prioritas dalam fokus pembangunan dimaksud terdiri dari:

- a. Pengembangan pengelolaan pemanfaatan hutan alam.
  - b. Penguatan dan penatagunaan kawasan hutan.
  - c. Pembangunan kesatuan pengelolaan hutan (KPH)
  - d. Pengembangan hutan tanaman dan hutan tanaman rakyat.
  - e. Restrukturisasi industri primer kehutanan.
3. Pada prioritas pembangunan nasional yang kelima terdapat tiga fokus pembangunan sektor kehutanan, meliputi:
- a. *Peningkatan Kapasitas Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim dan Bencana Alam Lainnya*, dengan satu kegiatan prioritas yaitu:
    - Pengendalian kebakaran hutan.
  - b. *Peningkatan Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Alam dan Kualitas Daya Dukung Lingkungan*, dengan kegiatan-kegiatan prioritas terdiri dari:
    - Pengamanan kawasan hutan.
    - Pengelolaan Taman Nasional Model.
    - Rehabilitasi lahan kritis DAS prioritas.
  - c. *Peningkatan Pengelolaan Sumberdaya Air Terpadu*, dengan satu kegiatan prioritas nasional, yaitu:
    - a. Pengelolaan DAS

Kegiatan-kegiatan lain pada sektor kehutanan yang dilaksanakan oleh Departemen Kehutanan tahun 2010 yang tidak termasuk di dalam kegiatan prioritas nasional, akan menjadi kegiatan prioritas bidang pembangunan sumberdaya alam dan lingkungan hidup, serta kegiatan-kegiatan prioritas Departemen Kehutanan.

Sejalan dengan thema pembangunan nasional dalam RKP Tahun 2010 dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sektor kehutanan, Rencana Kerja (Renja) Departemen Kehutanan Tahun 2010 akan menyelenggarakan 5 (lima) fungsi pembangunan yang terdiri dari 11 (sebelas) program. Fungsi dan program tersebut meliputi:

1. Fungsi Pelayanan Umum yang terdiri dari 3 (tiga) program, yaitu:
  - a. Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik
  - b. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara
  - c. Program Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek).
2. Fungsi Ketertiban dan Keamanan yang terdiri dari 1 (satu) program, yaitu Program Pemantapan Keamanan Dalam Negeri.
3. Fungsi Ekonomi, terdiri dari 1 (satu) program, yaitu Program Pemantapan Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan.
4. Fungsi Lingkungan Hidup, meliputi 4 (empat) program yaitu:
  - a. Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam
  - b. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumberdaya Alam
  - c. Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup
  - d. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup.
5. Fungsi Pendidikan, meliputi 2 (dua) program yaitu:
  - a. Program Pendidikan Kedinasan
  - b. Program Pendidikan Menengah

#### **B. Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja**

1. Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik

Program di atas bertujuan untuk menyelenggarakan fungsi dan meningkatkan kualitas tata kelola tugas umum pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakan oleh Departemen Kehutanan. Indikator kinerja utama pelaksanaan program ini adalah terselenggaranya administrasi pemerintahan pada satuan-satuan kerja lingkup Departemen Kehutanan sebanyak 269 unit kerja.

Pada Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik, pada tahun 2010 akan dilaksanakan sebanyak 19 jenis kegiatan, yang keseluruhan kegiatan-kegiatan tersebut merupakan kegiatan penunjang/pendukung program-program teknis yang dilaksanakan oleh Departemen Kehutanan. Kegiatan-kegiatan dan indikator kinerja pelaksanaan kegiatan pada program di atas adalah:

- a. Pengelolaan gaji, honorarium dan tunjangan untuk 17.697 orang pegawai Departemen Kehutanan di pusat dan daerah.
- b. penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran dilingkup Departemen Kehutanan sebanyak 269 unit kerja
- c. Pelayanan publik pada satuan-satuan kerja lingkup Departemen Kehutanan.
- d. Pembinaan koordinasi pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan untuk unit-unit kerja lingkup Departemen Kehutanan.
- e. Pembangunan/pengadaan/peningkatan sarana dan prasarana kerja pada unit-unit kerja lingkup Departemen Kehutanan di pusat dan di daerah, berupa tanah, gedung, peralatan dan mesin, jaringan dan sarana transportasi.
- f. Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan negara di seluruh unit-unit kerja pada Departemen Kehutanan, melalui penyempurnaan sistem pengelolaan keuangan, penyempurnaan sistem perbendaharaan, pemantapan sistem pelaporan keuangan, dan peningkatan kapasitas SDM pengelola keuangan negara.
- g. Pembinaan dan pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga dan pengelolaan perlengkapan berupa penerapan sistem akuntansi barang milik negara di seluruh satuan kerja, peningkatan kapasitas tenaga/personil pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta operasionalisasi tata usaha dan rumah tangga departemen.
- h. Pembinaan hukum dan organisasi dalam rangka pengembangan dan penyempurnaan peraturan perundangan, pengembangan kelembagaan dan perangkat organisasi lingkup Departemen Kehutanan, serta pendampingan dan bantuan hukum.
- i. Penyelenggaraan pembinaan informasi publik, antara lain penyebarluasan materi informasi dan penyuluhan kehutanan di media cetak dan elektronika, kunjungan jurnalistik, kunjungan DPR RI, siaran pers dan pameran bidang kehutanan.
- j. Pembinaan dan pengembangan perencanaan program dan administrasi dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan yang dituangkan dalam dokumen perencanaan dan pelaporan, dokumen penganggaran serta dokumen pelaporan pada satuan-satuan kerja lingkup Departemen Kehutanan. Disamping itu, pelaksanaan

- kegiatan tersebut dimaksudkan untuk menjamin ketepatan waktu mekanisme perencanaan dan pelaporan.
- k. Penatausahaan anggaran dan penyelenggaraan perbendaharaan dilakukan dalam rangka penyusunan laporan keuangan secara berjenjang dalam sistem akuntansi keuangan pemerintah, serta pengembangan dan penyempurnaan mekanisme dan sistem perbendaharaan.
  - l. Penyelenggaraan pengembangan sumberdaya manusia (SDM) dilakukan antara lain dalam rangka pengembangan kapasitas dan kualitas sumberdaya manusia di lingkup Departemen Kehutanan khususnya pengembangan kapasitas penyuluhan kehutanan.
  - m. Pengembangan SDM dan administrasi kepegawaian, yang dimaksudkan untuk melakukan pembinaan dan pengembangan pegawai, termasuk penyelenggaraan administrasi kepegawaian dan pengembangan kompetensi kepegawaian di lingkup Departemen Kehutanan.
  - n. Penerapan sistem pengelolaan administrasi keuangan, yang diarahkan untuk pemantapan penanganan tata kelola keuangan di lingkup Departemen Kehutanan, serta penyelenggaraan administrasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan bagi hasil pemanfaatan sumberdaya alam di bidang kehutanan (dana reboisasi, provisi sumberdaya hutan, dll).
  - o. Pembinaan/penyelenggaraan kerjasama internasional yang diarahkan untuk pengembangan kerjasama luar negeri dalam berbagai aspek pengelolaan sumberdaya hutan di Indonesia. Pengembangan kerjasama luar negeri dilakukan baik dalam lingkup bilateral, regional maupun multilateral. Selain itu kegiatan tersebut dilaksanakan guna memberikan fasilitasi dalam diplomasi luar negeri termasuk fasilitasi perwakilan Indonesia di luar negeri yang menangani bidang kehutanan.
  - p. Penyelenggaraan/peningkatan akuntansi pemerintah dan kekayaan milik negara (KMN), yang dilakukan melalui pengembangan sistem informasi manajemen dalam rangka penyusunan laporan akuntansi keuangan dan barang milik negara.

- q. Kerjasama antar instansi pemerintah/swasta/lembaga, yang dilakukan guna meningkatkan kerjasama kemitraan khususnya dalam rangka penyelenggaraan penyuluhan kehutanan.
- r. Pengendalian pembangunan kehutanan, dimaksudkan guna meningkatkan kinerja proses perencanaan dan evaluasi pembangunan kehutanan mulai tingkat daerah dan regional sampai dengan tingkat pusat. Disamping itu, melalui kegiatan ini akan dilakukan fasilitasi, koordinasi dan konsultasi pembangunan kehutanan yang bersifat tematik.
- s. Pembinaan standardisasi dan lingkungan, yang diarahkan untuk pengembangan dan penerapan sandar nasional Indonesia (SNI) di bidang kehutanan, sosialisasi/penataran SNI, sertifikasi standard dan pengendalian lingkungan di bidang kehutanan.

## 2. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara

Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara bertujuan untuk meningkatkan efektifitas sistem pengawasan dan audit serta akuntabilitas kinerja guna mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan bebas KKN.

Pada program di atas akan dilaksanakan satu kegiatan yaitu Penyelenggaraan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara, dengan indikator keluaran utama berupa laporan hasil audit (LHA) reguler sebanyak 220 laporan, laporan tindak lanjut hasil audit sebanyak 60 laporan, 33 laporan audit khusus, serta pengembangan kapasitas tenaga audit/fungsional auditor melalui diklat dan bimbingan teknis sebanyak 120 orang.

## 3. Program Penelitian dan Pengembangan Iptek

Pelaksanaan Program di atas bertujuan untuk menyediakan produk Iptek dasar dan terapan dalam rangka pengelolaan hutan dan menyediakan sistem dukungan pembuatan kebijakan pengelolaan hutan serta penguatan dan pematapan institusi, sumberdaya manusia, evaluasi, diseminasi hasil, kerjasama dan jejaring kerja, serta sarana prasarana litbang.

Indikator kinerja utama pelaksanaan Program Penelitian dan Pengembangan Iptek pada Departemen Kehutanan Tahun 2010 adalah

tersedianya data dan informasi teknologi, modeling, pedoman, hasil kajian dan hasil rekayasa alat terkait dengan landsekap hutan, pengelolaan hutan alam, pengelolaan hutan tanaman, pengelolaan biodiversitas, budidaya hasil hutan bukan kayu, pengelolaan DAS, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, pengolahan hasil hutan dan kebijakan kehutanan, serta penerapan hasil litbang berupa gelar teknologi, penerbitan jurnal dan penyelenggaraan seminar.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada program di atas adalah Administrasi dan Kesekretariatan, Sistem Penunjang dan Penerapan Hasil Litbang Kehutanan, Penelitian dan Pengembangan Kehutanan, dan Perencanaan, Evaluasi, Kerjasama dan Peningkatan Sarana Litbang.

a. Penelitian dan Pengembangan Kehutanan

Hasil-hasil dari pelaksanaan penelitian dan pengembangan kehutanan antara lain tersedianya data dan informasi teknologi, modelling, pedoman, hasil kajian dan hasil rekayasa alat terkait dengan landsekap hutan, pengelolaan hutan alam, pengelolaan hutan tanaman, pengelolaan biodiversitas, hasil hutan bukan kayu, pengelolaan DAS, perubahan iklim, pengolahan hasil hutan dan kebijakan kehutanan.

b. Penerapan Hasil Litbang Kehutanan

Pelaksanaan kegiatan Penerapan Hasil Litbang Kehutanan adalah untuk penyebarluasan dan pemanfaatan hasil-hasil litbang. Indikator keluaran pelaksanaan kegiatan tersebut adalah penyelenggaraan gelar teknologi sebanyak 20 unit, pembuatan jurnal hasil litbang sebanyak 6 jurnal, dan penyelenggaraan seminar/ekspose hasil litbang sebanyak 20 kali.

c. Perencanaan, Evaluasi, Kerjasama dan Peningkatan Sarana Litbang

Kegiatan perencanaan, evaluasi, kerjasama dan peningkatan sarana litbang dimaksudkan untuk memantapkan dan meningkatkan penyelenggaraan litbang. Indikator keluaran penting dari kegiatan tersebut berupa pembuatan dokumen-dokumen perencanaan pada 20 unit kerja lingkup Badan Litbang Kehutanan, sertifikasi manajemen mutu (ISO 9001-2000) pada 5 unit kerja, dan penyelenggaraan kerjasama kelitbang dengan 8 mitra luar negeri dan 14 mitra dalam negeri.



#### 4. Program Pemantapan Keamanan Dalam Negeri

Program ini bertujuan menekan sampai seminimal mungkin praktek-praktek kejahatan dan pelanggaran hukum di bidang kehutanan. Praktek kejahatan dan pelanggaran tersebut yang terjadi di dalam kawasan berupa pencurian hasil hutan serta tumbuhan dan satwa liar (TSL) yang dilindungi di hutan negara, serta perambahan/penguasaan lahan secara illegal di dalam kawasan hutan. Sedangkan yang terjadi di luar kawasan hutan berupa peredaran, pengangkutan, perdagangan hasil hutan (kayu, non kayu dan TSL) secara illegal.

Indikator kinerja utama pelaksanaan Program Pemantapan Keamanan Dalam Negeri Tahun 2010 adalah menurunnya tindak pidana dibidang kehutanan sebesar 50% dari tindak pidana yang terjadi tahun 2009. Program ini akan dilakukan dengan satu kegiatan yaitu Pengamanan Kawasan Hutan dengan indikator kinerja kunci berupa:

- a. Kegiatan pengamanan preventif sebanyak 924 kali,
  - b. Operasi pengamanan represif/gabungan sebanyak 462 kali,
  - c. Operasi pengamanan represif TSL sebanyak 946 kali,
  - d. Penanganan perambahan hutan di 12 propinsi,
  - e. Partisipasi masyarakat dalam pengamanan hutan melalui aktivitas pengamanan swakarsa (Masyarakat Mitra Polhut) meningkat 10% dibandingkan dengan aktivitas yang sama tahun 2009,
  - f. Berkas lengkap sebanyak 75% kasus baru dan 25% tunggakan kasus,
  - g. Penanganan kasus tindak pidana kehutanan sebanyak 15 kali,
  - h. Sosialisasi dan kampanye pengamanan hutan pada 77 unit kerja.
- Disamping itu akan dilaksanakan upaya-upaya pembinaan kemampuan (binpuan) tenaga pengamanan hutan (polhut dan PPNS) dalam bentuk pendidikan dan pelatihan sebanyak 320 orang, serta pengembangan kerjasama dalam rangka pengamanan hutan dengan pembentukan 33 kelompok Masyarakat Mitra Polhut (MMP).

#### 5. Program Pemantapan Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan

Program Pemantapan Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan hutan produksi dalam penyediaan produk-produk hasil hutan berupa kayu dan non kayu, baik dari hutan alam maupun hutan tanaman, pengembangan revitalisasi industri pengolahan hasil hutan, serta pengendalian peredaran dan perdagangan hasil hutan. Selain itu pelaksanaan program tersebut

bertujuan meningkatkan pemantapan kawasan hutan guna mendukung prakondisi pengelolaan sumberdaya hutan.

Indikator kinerja utama pelaksanaan program untuk tahun 2010 yang terkait dengan produksi kehutanan adalah terbentuknya/penetapan 10% dari kawasan hutan produksi menjadi areal kesatuan pengelolaan hutan produksi (KPHP), tersedianya calon areal pemanfaatan hasil hutan di 26 provinsi, 10% produksi penebangan bersertifikat sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK), peningkatan produksi hasil hutan sebanyak 1% dari tingkat tahun 2009, pembuatan tanaman HTI dan HTR baru seluas 800.000 Ha, peningkatan PNB dari pemanfaatan kayu sebesar 5% dibanding penerimaan tahun 2009. Sedangkan, indikator program yang terkait dengan pemantapan kawasan hutan adalah pembuatan tanda batas luar kawasan hutan sepanjang 2.000 Km, pembuatan tanda batas fungsi kawasan hutan sepanjang 1.400 Km, penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan non kehutanan, untuk tahun 2010 diharapkan dapat diperoleh PNB sebesar Rp 200 Milyar, penetapan wilayah KPHP dan KPHL di 4 propinsi, penetapan wilayah KPHK sebanyak 20 unit atau propinsi. Dalam rangka menciptakan prakondisi pengelolaan pengelolaan hutan yang lebih efektif, pada tahun 2010 diharapkan dapat dilakukan penetapan kawasan hutan untuk 2 provinsi (Riau dan Kepri), dan terbentuknya lembaga/unit organisasi yang mengelola kesatuan pengelolaan hutan (KPH) baik untuk hutan konservasi, hutan lindung maupun hutan produksi sebanyak 20 unit.

Pelaksanaan program Pemantapan Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan di atas akan dilakukan 9 (sembilan) kegiatan, terdiri dari:

- a. Pengelolaan hutan produksi yang tidak dibebani hak/ijin pemanfaatan.

Pelaksanaan kegiatan di atas diarahkan untuk melakukan penataan kawasan hutan produksi yang saat ini belum/tidak ada unit pengelolanya, sehingga menjadi layak sebagai unit pengelolaan areal kerja ijin usaha pemanfaatan hasil hutan. Indikator keluaran kunci untuk pelaksanaan kegiatan tersebut antara lain terbentuknya / penetapan 10% dari kawasan hutan produksi menjadi areal kesatuan pengelolaan hutan produksi (KPHP), tersedianya calon areal pemanfaatan hasil hutan di 26 provinsi, dan pengembangan rencana investasi pada 8 propinsi.

b. Pengembangan pengelolaan pemanfaatan hutan alam

Kegiatan pengembangan pengelolaan pemanfaatan hutan alam ditujukan untuk meningkatkan kinerja pengelolaan hutan alam produksi secara lestari serta dalam rangka penyediaan produk hasil hutan untuk industri pengolahan dalam negeri. Indikator keluaran pelaksanaan kegiatan tersebut antara lain peningkatan hasil hutan sebanyak 1% dari tingkat produksi tahun 2009, unit IUPHHK-HA yang bersertifikat pengelolaan hutan alam produksi lestari (PHAPL) meningkat sebesar 10% dari keadaan tahun 2009, dan 10% produksi penebangan pada hutan alam produksi bersertifikat SVLK.

c. Pengembangan hutan tanaman dan hutan tanaman rakyat

Kegiatan di atas diarahkan untuk meningkatkan kinerja pengelolaan hutan tanaman industri (HTI) dan pengembangan pembangunan / pembuatan hutan tanaman rakyat (HTR). Indikator keluaran untuk kegiatan dimaksud antara lain pembuatan tanaman HTI dan HTR baru seluas 800.000 ha sehingga sampai dengan akhir tahun 2010 diharapkan akan terdapat 5,3 juta ha areal tanaman HTI dan HTR, dimana dari luasan tanaman tersebut diharapkan dapat memenuhi 60% kebutuhan bahan baku industri perkayuan dalam negeri. Dari luasan di atas diantaranya berupa HTI masyarakat yang dilaksanakan oleh kelompok masyarakat dan koperasi seluas 24.000 Ha, dan pengembangan / pembuatan HTR seluas 69.000 Ha.

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan hutan tanaman industri lestari, pada tahun 2010 diharapkan akan terdapat 10 unit IUPHHK-HT yang memperoleh sertifikasi pengelolaan hutan lestari.

d. Restrukturisasi industri primer kehutanan

Kegiatan restrukturisasi industri primer kehutanan dimaksudkan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengolahan hasil hutan pada industri primer kehutanan. Indikator keluaran pelaksanaan kegiatan dimaksud antara lain produk industri hasil hutan yang bersertifikat SVLK meningkat 10% dari perkiraan keadaan tahun 2009, evaluasi terhadap 15 unit IPHHK dengan kapasitas di atas 6.000 m<sup>3</sup> per tahun, dan tersedianya data dan informasi industri pengolahan hasil hutan kayu (IPHHK) pada di 10 propinsi, serta meningkatnya pemenuhan bahan baku kayu dari HTI menjadi sebesar 15% dari tahun 2009, dan meningkatnya jumlah industri primer hasil hutan sebanyak 20 unit.

e. Pengendalian peredaran hasil hutan

Pengendalian peredaran hasil hutan dimaksudkan untuk menciptakan tertib peredaran dan perdagangan hasil hutan sesuai dengan peraturan yang berlaku guna menjamin ha-hak negara atas pemanfaatan sumberdaya hutan. Indikator keluaran utama dari kegiatan tersebut antara lain meningkatnya penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari pemanfaatan kayu sebesar 5% dibanding penerimaan tahun 2009, implementasi operasionalisasi sistem informasi manajemen penatausahaan hasil hutan (SIMPUHH) secara on line di 60 unit manajemen IUPHHK dan IPHHK sehingga data dan informasi peredaran hasil hutan akurat dan tepat waktu, dan tersosialisasikannya SVLK di 32 provinsi.

f. Pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan

Pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan ditujukan untuk menciptakan prakondisi pengelolaan kawasan hutan yang mantap dari aspek legal maupun fisik di lapangan. Indikator keluaran kegiatan di atas antara lain penyelesaian penunjukan kawasan hutan di seluruh propinsi, pembuatan tanda batas luar kawasan hutan sepanjang 2.000 kilometer, pembuatan tanda batas fungsi sepanjang 1.400 km, penyiapan penetapan kawasan hutan yang sudah ditata batas temu gelang di 33 provinsi, pembuatan database kawasan hutan sebanyak 1 paket/set, dan penyelesaian perubahan fungsi dan pelepasan kawasan hutan seluas 600 ribu hektar.

Dalam kaitannya dengan penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan non kehutanan, untuk tahun 2010 diharapkan dapat diperoleh PNBP sebesar Rp.200 milyar.

g. Pembangunan kesatuan pengelolaan hutan (KPH)

Kegiatan pembangunan KPH yang meliputi KPH konservasi (KPHK), KPH lindung (KPHL) dan KPH produksi (KPHP) diarahkan untuk menciptakan sistem pengelolaan kawasan hutan berdasarkan unit-unit manajemen secara lestari baik pada kawasan hutan konservasi, hutan lindung maupun hutan produksi. Untuk tahun 2010, kegiatan di atas akan dilaksanakan dengan indikator keluaran berupa penetapan wilayah KPHP dan KPHL di 4 provinsi, penetapan wilayah KPHK sebanyak 20 unit atau provinsi, penetapan kelembagaan KPHP dan KPHL sebanyak 20 unit dan penetapan kelembagaan KPHK

sebanyak 20 unit. Guna mendorong pembentukan dan beroperasinya KPH tersebut akan dilakukan pengumpulan data dan informasi serta penyiapan tenaga pengelola melalui diklat.

h. Penilaian kelayakan usaha dan evaluasi kegiatan pembuatan HTR

Kegiatan di atas dimaksudkan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap sumber permodalan dalam rangka pengembangan usaha di bidang kehutanan berupa pembuatan HTR. Indikator keluaran utama dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah penilaian kelayakan usaha, evaluasi kegiatan usaha serta penguatan kapasitas kelembagaan usaha berupa bimbingan teknis sebanyak 8 kali, dan pelatihan pendampingan pembangunan HTR sebanyak 12 kali.

i. Penyusunan anggaran, penyaluran dan pengembalian pinjaman pembangunan HTR

Kegiatan penyusunan rencana anggaran dan penyaluran pinjaman dimaksudkan untuk menciptakan unit lembaga keuangan penyelenggara pengelolaan dana yaitu Badan Layanan Umum (BLU), serta menyelenggarakan administrasi penyaluran dana dalam rangka pembangunan HTR. Indikator keluaran pelaksanaan kegiatan tersebut antara lain penyusunan Rencana Biaya dan Anggaran (BLU) sebanyak 1 judul dan penyaluran kredit usaha sebesar Rp.1.700 milyar kepada kelompok-kelompok usaha, penyempurnaan sistem pembiayaan, serta monitoring dan evaluasi pengelolaan dana pinjaman pada 20 lokasi.

6. Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam

Program di atas dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas kualitas pengelolaan kawasan-kawasan konservasi melalui upaya-upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya. Indikator kinerja utama untuk tahun 2010 dari pelaksanaan program tersebut adalah menurunnya jumlah *hotspot* (titik api) sampai dengan dampak asap tidak mengganggu tingkat kesehatan masyarakat setempat serta tidak mengganggu negara tetangga, penyelesaian kasus perambahan di kawasan konservasi sebesar 20% dari total areal perambahan, populasi spesies kunci yang terancam punah minimal stabil atau bertambah sesuai kemampuan biologis dan habitat yang tersedia, 50% pemegang Ijin Pemanfaatan Pariwisata Alam (IPPA) telah dapat berusaha dengan sehat dan

meningkatnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), kapasitas kelembagaan satuan kerja lingkup PHKA yang terorganisir dengan baik meningkat dengan signifikan dari angka 20% menjadi 40% di akhir tahun 2010, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari aktivitas wisata alam sebesar Rp.11,3 milyar dan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar (TSL) sebesar Rp. 2,5 milyar.

Untuk mencapai indikator kinerja utama program di atas akan dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

a. Pengendalian kebakaran hutan

Kegiatan pengendalian hutan yang diarahkan untuk melakukan tindakan pencegahan, pemadaman serta penanganan pasca kebakaran lahan dan hutan. Indikator keluaran pelaksanaan kegiatan tersebut adalah pengendalian dini terjadinya kebakaran lahan dan hutan antara lain melalui penyuluhan kepada masyarakat dan patroli pengendalian kebakaran. Upaya pengendalian dini tersebut dilakukan guna menekan jumlah jumlah *hotspot* (titik api) di seluruh wilayah Indonesia sampai dengan dampak asap tidak mengganggu tingkat kesehatan masyarakat khususnya pada daerah-daerah rawan kebakaran lahan dan hutan di Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi, serta tidak mengganggu negara tetangga.

Dalam rangka mencegah perluasan areal kebakaran dilakukan operasi-operasi pemadaman baik dari darat maupun dari udara. Guna meningkatkan efektifitas dan kapasitas kegiatan penanggulangan kebakaran lahan dan hutan dilakukan penyempurnaan sarana dan prasarana, koordinasi antar instansi/lembaga terkait, serta pembentukan dan peningkatan kemampuan brigade Anggala Agni termasuk Satuan Manggala Agni Reaksi Taktis (SMART) dan pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA) sebanyak 163 kelompok di daerah-daerah rawan kebakaran lahan dan hutan.

b. Pengelolaan taman nasional dan kawasan konservasi lainnya

Kegiatan pengelolaan taman nasional dan kawasan konservasi lainnya (kawasan pelestarian alam/KPA, kawasan suaka alam/KSA, taman buru/TB dan hutan lindung/HL) diarahkan pada upaya-upaya peningkatan kapasitas kelembagaan pada unit-unit kerja pengelola kawasan konservasi. Indikator keluaran pelaksanaan kegiatan

tersebut antara lain pengelolaan taman nasional berbasis resort dalam menjaga kawasan dan nilai hutan pada 40 unit resort, pengembangan sarana dan prasarana pariwisata alam termasuk promosi wisata, identifikasi dan pemeliharaan/peningkatan kualitas habitat satwa-satwa migran pada 6 unit Balai/Balai Besar Taman Nasional dan Balai/Balai Besar Konservasi Sumberdaya Alam, serta penyelesaian perambahan kawasan konservasi serta penyelesaian batas partisipatif kawasan pelestarian alam/kawasan suaka alam di 3 lokasi.

c. Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya

Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya ditekankan pada upaya-upaya penyelamatan populasi tumbuhan dan satwa liar terutama untuk jenis-jenis yang dilindungi dan terancam punah, baik pada habitat asli di alam (insitu) maupun di luar habitat asli (eksitu). Indikator keluaran kegiatan pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya antara lain pembangunan data base pengelolaan 5 spesies satwa terancam punah, pengelolaan peredaran dan pemanfaatan satwa sebanyak 700 spesies, pembinaan habitat dalam kerangka peningkatan populasi sebanyak 10 spesies satwa liar, penyelesaian "konflik" manusia dan satwa liar, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari pemanfaatan TSL sebesar Rp.2,5 milyar.

d. Pengembangan jasa lingkungan dan wisata alam

Pelaksanaan kegiatan pengembangan jasa lingkungan dan wisata alam dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan kawasan konservasi termasuk areal wisata alam guna memberikan manfaat baik langsung maupun tidak langsung kepada negara dan masyarakat. Indikator keluaran kegiatan tersebut adalah penyusunan rencana pengembangan potensi jasa lingkungan dan wisata alam dalam mendukung pembangunan wilayah dan perekonomian masyarakat, bimbingan, pembinaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan ijin pariwisata alam pada 10 ijin pemanfaatan pariwisata alam (IPPA), pengembangan sarana dan prasarana wisata alam, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari kegiatan wisata alam sebesar Rp.11,335 milyar. Selain itu, indikator keluaran yang diharapkan antara lain menyiapkan perangkat peraturan perundangan yang mengadopsi kearifan lokal, kemitraan, dan pengembangan

ekonomi produktif masing-masing sebanyak 1 judul, pengembangan data dan informasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat pada 15 unit pelaksana teknis (UPT) Ditjen PHKA, pelatihan masyarakat sebanyak 2 kali/jenis, peningkatan usaha HHBK pada 5 unit pelaksana teknis Ditjen PHKA, koordinasi pengembangan daerah penyangga kawasan konservasi pada 3 unit pelaksana teknis, pembuatan model desa konservasi sebanyak 60 unit, dan pemberian insentif terhadap masyarakat yang berprestasi dalam melaksanakan kegiatan konservasi.

e. Pengelolaan taman nasional model

Kegiatan pengelolaan taman nasional model ditujukan untuk membentuk *benchmarking* pola pengelolaan taman nasional yang efektif dan optimal sesuai dengan karakteristik alam dan potensi kawasan. Indikator keluaran kegiatan ini antara lain pembinaan habitat satwa kunci di 10 unit taman nasional, restorasi dan rehabilitasi pada 10 unit taman nasional dan studi *trust fund* pada 5 unit taman nasional. Selain itu, 3 unit taman nasional dijadikan *piloting* pengembalian pinjaman luar negeri melalui skema *debt swap for nature*, yaitu Taman Nasional Gunung Leuseur, Taman Nasional Kerinci Seblat, dan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan.

7. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumberdaya Alam

Pelaksanaan program di atas bertujuan untuk memulihkan fungsi dan daya dukung DAS serta mengembangkan usaha perekonomian masyarakat melalui usaha dibidang kehutanan. Indikator kinerja utama pelaksanaan program tersebut adalah penyusunan Rencana Pengelolaan DAS Terpadu untuk 18 unit DAS prioritas, pengembangan sumber benih pada 6 region, penanaman pohon dalam rangka rehabilitasi hutan dan lahan seluas 100.000 hektar, dan penetapan areal kerja hutan kemasyarakatan (HKm) seluas 420.000 hektar.

Untuk mencapai indikator kinerja utama pelaksanaan program di atas akan dilaksanakan kegiatan-kegiatan berupa:

a. Rehabilitasi lahan kritis DAS prioritas

Kegiatan rehabilitasi lahan DAS kritis dimaksudkan untuk melakukan upaya-upaya pemulihan kondisi lahan-lahan kritis baik di dalam maupun di luar kawasan hutan guna meningkatkan kualitas fungsi



dan daya dukung DAS. Indikator keluaran kegiatan tersebut adalah penanaman lahan kritis pada kawasan hutan (reboisasi) seluas 100.000 Ha, penanaman pada lahan milik di luar kawasan hutan (penghijauan) melalui pembuatan hutan rakyat seluas 313.600 Ha, rehabilitasi hutan mangrove seluas 56.000 Ha, serta fasilitasi rehabilitasi lahan oleh pemerintah daerah (propinsi dan kabupaten / kota) termasuk yang pendanaannya bersumber dari dana bagi hasil dana reboisasi (DBH DR) dan dana alokasi khusus (DAK) dengan luas 57.000 Ha.

Dalam rangka kampanye Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Gerhan) akan dilakukan fasilitasi penanaman pohon dalam rangka penghijauan lingkungan dalam kerangka "Indonesia Menanam" sebanyak 320 juta batang. Selanjutnya guna melakukan upaya-upaya konservasi tanah dan air akan dilakukan fasilitasi pembuatan berbagai bangunan sipil teknis berupa dam pengendali, dam penahan, gully plug, embung, sumur resapan, dll, sebanyak 4.500 unit.

- b. Perencanaan dan pembinaan rehabilitasi lahan dan perhutanan sosial  
Kegiatan di atas diarahkan pada upaya untuk pemantapan pengembangan perbenihan tanaman hutan yang dilakukan sejalan dengan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan. Indikator keluaran pelaksanaan kegiatan tersebut antara lain pembinaan dan pengembangan sumber benih seluas 4.500 Ha, pembangunan kebun benih / sumber benih seluas 1.000 Ha, pengendalian dan pengawasan peredaran benih tanaman hutan serta fasilitasi usaha perbenihan pada 6 region, dan pembinaan tenaga-tenaga penguji dan pengawas penguji benih tanaman hutan.
- c. Pengelolaan daerah aliran sungai (DAS)  
Kegiatan pengelolaan DAS dimaksudkan untuk meningkatkan koordinasi, harmonisasi dan konsultasi dalam kerangka pemanfaatan lahan pada areal DAS. Indikator keluaran pelaksanaan kegiatan tersebut antara lain penyusunan rencana pengelolaan DAS terpadu untuk 18 unit DAS prioritas, terbentuk dan berfungsinya forum DAS tingkat nasional sebanyak 1 unit, tingkat propinsi 10 unit dan tingkat kabupaten/kota sebanyak 3 unit. Disamping itu akan dilakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan DAS oleh unit pelaksana teknis (UPT) Balai Pengelolaan DAS (BPDAS). Dalam rangka pemantapan

kelembagaan pengelolaan DAS akan dilakukan pengembangan sistem informasi dan data base DAS termasuk penyusunan dan penerbitan peraturan perundang-undangan serta pedoman/petunjuk teknis pengelolaan DAS. Guna melakukan pemantauan air sungai akan dilakukan pengamatan termasuk pada sungai-sungai yang telah dilakukan pemasangan stasiun pengamatan air sungai (SPAS) sebanyak 168 unit sungai.

d. Perencanaan dan pengembangan hutan kemasyarakatan (HKm).

Kegiatan di atas dimaksudkan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pemanfaatan sumberdaya hutan guna dapat meningkatkan perekonomian masyarakat melalui usaha di bidang kehutanan. Indikator keluaran kegiatan tersebut antara lain penetapan 420.000 Ha areal kerja HKm, fasilitasi 4 unit kemitraan HKm, penetapan 400.000 Ha areal kerja hutan desa, dan fasilitasi 50 unit kemitraan hutan desa.

e. Pengembangan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK)

Kegiatan pengembangan pemanfaatan HHBK diarahkan untuk membuka / menciptakan peluang usaha masyarakat dalam kegiatan produksi komoditas hasil hutan non kayu. Indikator keluaran dari kegiatan ini antara lain penetapan dan fasilitasi 10 jenis HHBK unggulan dan pembentukan 2 unit kelompok/lembaga usaha HHBK *solution center*.

f. Perencanaan, pembangunan dan kelembagaan hutan rakyat

Kegiatan di atas dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas lahan milik masyarakat melalui budidaya komoditas tanaman hutan khususnya jenis kayu-kayuan. Pelaksanaan kegiatan tersebut sejalan dengan upaya rehabilitasi lahan kritis pada lahan milik di luar kawasan hutan serta meningkatkan pendapatan masyarakat. Indikator utama kinerja tahun 2010 untuk kegiatan ini adalah pembuatan hutan rakyat seluas 50.000 Ha pada lahan kritis di DAS prioritas. Tujuan dari pembuatan hutan rakyat antara lain untuk produksi kayu yang bernilai ekonomi tinggi untuk menjadi bahan baku industri pengolahan kayu yang berada di sekitar areal hutan rakyat.

8. Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup

Program ini bertujuan untuk pengembangan kemampuan kelembagaan masyarakat dalam mendorong kemandirian guna meningkatkan produktivitas dalam kegiatan di bidang kehutanan. Indikator kinerja utama pelaksanaan program ini adalah terbentuknya 26 unit masyarakat produktif mandiri, terbentuknya 80 unit model penyuluhan di kabupaten / kota yang sudah terbentuk Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (P3K), terbentuknya 20 unit model penyuluhan responsif jender di kabupaten/kota yang sudah terbentuk Badan Pelaksana P3K, dan pemberdayaan masyarakat di 33 provinsi.

Guna mencapai indikator kinerja utama pelaksanaan program di atas, selanjutnya akan dilakukan kegiatan-kegiatan berupa:

a. Pembinaan koordinasi/pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan

Kegiatan ini dimaksudkan untuk membangun koordinasi dan memantau kegiatan penyuluhan di bidang kehutanan di tiap provinsi. Indikator keluaran yang diharapkan adalah terselenggaranya penilaian lomba PKA di 33 provinsi.

b. Pengembangan pendidikan SDM

Kegiatan di atas diarahkan untuk meningkatkan kapasitas penyuluh kehutanan yang dilakukan melalui pelatihan penjenjangan penyuluh kehutanan sebanyak 3 angkatan dan pelatihan PKSM sebanyak 1 angkatan.

c. Kerjasama antar instansi pemerintah/swasta/lembaga

Kegiatan ini ditujukan untuk menjembatani dukungan para pihak terhadap kegiatan penyuluhan. Indikator keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya 3 dokumen *memorandum of understanding* (MOU) kerjasama kemitraan penyuluhan kehutanan untuk fasilitasi pengembangan HPHA, perguruan tinggi, LSM dan instansi terkait.

d. Pemberdayaan masyarakat sasaran

Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat sehingga dapat didorong peran aktifnya dalam pembangunan kehutanan. Indikator keluaran kegiatan ini antara lain terbentuknya 80 unit model penyuluhan di kabupaten/kota yang

sudah terbentuk Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (P3K), terbentuknya 26 kelompok masyarakat produktif mandiri (KUP dan SPKP/PPKSM/forum desa), terbentuknya 20 unit model penyuluhan responsif jender di kabupaten/kota yang sudah terbentuk Badan Pelaksana P3K dan pemberdayaan masyarakat sasaran di 33 provinsi melalui pendampingan KMPM/KUP/SPKP, peningkatan ketrampilan masyarakat, KMDM, pengembangan percontohan pemberdayaan masyarakat, dll.

e. Pembinaan dan penyelenggaraan penyuluhan kehutanan

Kegiatan di atas diarahkan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan, penyempurnaan sistem, dan pengembangan perangkat termasuk sarana dan penyuluhan kehutanan. Kegiatan tersebut akan menghasilkan keluaran antara lain berupa penerbitan majalah penyuluhan kehutanan, pengembangan materi radio, kampanye kebijakan pembangunan kehutanan, temu karya/sarasehan pemenang lomba PKA, dan kontes pohon dan temu wicara gubernur/bupati/walikota penggerak pembangunan kehutanan dengan menteri kehutanan. Indikator keluaran lainnya yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan di atas adalah penyelenggaraan operasionalisasi penyuluhan kehutanan di 33 provinsi berupa penyediaan biaya operasional penyuluhan (BOP), administrasi umum, peningkatan kapasitas SDM, pengembangan materi diklat dan lain-lain.

f. Peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan sumberdaya lama hutan (SDAH) dan ekosistemnya

Kegiatan ini diharapkan dapat mendukung pengelolaan kawasan-kawasan konservasi melalui upaya penguatan kapasitas kelembagaan di Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA). Indikator keluaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah tersedianya peraturan pemerintah, peraturan menteri kehutanan, keputusan Dirjen di bidang perlindungan hutan dan konservasi sumberdaya alam, sosialisasi peraturan perundang-undangan sebanyak 10 kali, prakondisi pembentukan unit organisasi BKSDA di Provinsi Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Banten, Sulawesi Barat, Gorontalo, dan Maluku Utara di 6 UPT, pembentukan 3 unit organisasi setingkat pos (eselon V) di Kepulauan Kapoposang, Kepulauan Pieh, dan Pulau Marsegu, peningkatan sarana prasarana

fisik pengelolaan kawasan konservasi (kantor seksi, resort dan pos jaga) sebanyak 45 unit, dan peningkatan kualitas SDM pejabat fungsional Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) pada 77 unit UPT.

9. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup

Program di atas bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dalam penyediaan data dan informasi pengelolaan hutan serta akses terhadap penggunaan dan pemanfaatan informasi. Indikator kinerja utama pelaksanaan program tersebut adalah pembuatan rencana makro kawasan sebanyak 1 judul, pembuatan informasi produk domestik regional bruto (PDRB) hijau pada 17 propinsi, penggunaan teknologi penginderaan jauh untuk pemetaan penutupan lahan pada kawasan hutan KPH di 25 lokasi, terbangunnya jaringan data spasial kehutanan antara pusat dan beberapa model di daerah, serta penerimaan PNPB penggunaan kawasan hutan sebesar Rp.200 milyar. Untuk mencapai indikator kinerja utama program dimaksud akan dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

a. Pengembangan rencana dan statistik kehutanan

Kegiatan pengembangan rencana dan statistik kehutanan diarahkan untuk menyiapkan penataan ruang kawasan hutan wilayah I dan II di 33 provinsi dan fasilitasi penyiapan penataan ruang kawasan hutan di tingkat provinsi, serta penyajian data dan informasi kehutanan melalui media website selama 12 bulan. Pelaksanaan kegiatan tersebut akan menghasilkan keluaran dengan indikator berupa rencana makro sebanyak 1 judul, rencana kehutanan tingkat nasional (RKTN) sebanyak 1 judul, review RKTN sebanyak 1 judul, informasi PDRB hijau pada 15 propinsi, norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) penataan ruang kawasan ruang, operasionalisasi jaringan informasi sebanyak 1 unit di pusat selama 12 bulan, dan statistik kehutanan sebanyak 8 judul.

b. Inventarisasi hutan dan pengembangan informasi SDA dan LH

Kegiatan di atas diarahkan untuk menyediakan data potensi sumberdaya hutan, pengembangan dan penataan perpetaan, dan pengembangan informasi sumberdaya hutan. Indikator keluaran dari kegiatan tersebut antara lain inventarisasi SDH dan sosial budaya di 12 lokasi sebanyak 2 provinsi, penggunaan teknologi penginderaan

jauh untuk pemetaan penutupan lahan pada kawasan hutan KPH di 25 lokasi, data tematik kehutanan yang terkini sesuai dengan PDTK sebanyak 2 tema, dan terbangunnya jaringan data spasial pusat sebanyak 1 paket.

c. Perencanaan dan pembinaan prakondisi pengelolaan hutan

Kegiatan perencanaan dan pembinaan prakondisi pengelolaan hutan ditekankan pada upaya-upaya untuk melakukan penanganan proses-proses yang terkait dengan penggunaan kawasan hutan. Indikator keluaran dari kegiatan tersebut antara lain penyiapan areal penggunaan kawasan hutan sebanyak 60% dari permohonan, pemrosesan ijin penggunaan kawasan hutan sebanyak 1 paket, data digital penggunaan kawasan hutan sebanyak 100 set dan data PNBK penggunaan kawasan hutan sebesar Rp.200 milyar.

10. Program Pendidikan Kedinasan

Program di atas ini bertujuan meningkatkan kualitas penyelenggaraan diklat kehutanan dalam rangka pengembangan profesionalisme dan kemampuan SDM kehutanan yang berada pada Departemen Kehutanan dan instansi kehutanan daerah serta masyarakat. Indikator kinerja utama pelaksanaan program berupa pendidikan dan pelatihan bagi 5.530 orang peserta, pendidikan jenjang S3 bagi pegawai Departemen Kehutanan dengan lulusan sebanyak 15 orang, pendidikan jenjang S2 bagi pegawai Departemen Kehutanan dengan lulusan sebanyak 50 orang dan administrasi diklat kehutanan sebanyak 1 paket. Untuk mencapai kinerja utama program tersebut akan dilaksanakan melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan kehutanan dengan indikator keluaran utama berupa penyelenggaraan:

- a. Diklat prajabatan sebanyak 820 orang peserta
- b. Diklat kepemimpinan sebanyak 130 orang peserta
- c. Diklat teknis dan administrasi sebanyak 3.000 orang peserta
- d. Diklat fungsional sebanyak 700 orang peserta
- e. Diklat non pegawai sebanyak 800 orang peserta
- f. Karyasiswa lulus pendidikan jenjang S3 sebanyak 15 orang
- g. Karyasiswa lulus pendidikan jenjang S2 sebanyak 50 orang
- h. Penyempurnaan sarana diklat pada 9 unit kerja.

### 11. Program Pendidikan Menengah

Program Pendidikan Menengah Kehutanan bertujuan untuk menyediakan tenaga teknis kehutanan tingkat menengah yang profesional dan memiliki kemampuan teknis yang tinggi. Indikator kinerja utama pelaksanaan program tersebut adalah lulusan pendidikan sekolah menengah kejuruan (SMK) Kehutanan sebanyak 40 orang, kelas I sebanyak 288 orang, kelas II sebanyak 288 orang dan kelas III sebanyak 168 orang. Untuk mencapai kinerja utama di atas akan dilakukan kegiatan penyelenggaraan pendidikan sekolah menengah kejuruan (SMK) kehutanan di 5 unit yang berada di Kadipaten, Pekanbaru, Makassar, Samarinda dan Manokwari. Indikator keluaran utama dari pendidikan menengah di atas adalah:

- a. Peserta pendidikan kelas 1 sebanyak 288 orang siswa
- b. Peserta pendidikan kelas 2 sebanyak 288 orang siswa
- c. Peserta pendidikan kelas 3 sebanyak 168 orang siswa
- d. Siswa lulusan SMK Kehutanan sebanyak 40 orang siswa
- e. Pengembangan tenaga pendidikan pada 5 unit kerja
- f. Pengembangan program pendidikan menengah kejuruan kehutanan sebanyak 1 paket
- g. Penyempurnaan serta sarana dan prasarana pendidikan pada 5 unit kerja.

### C. Pembiayaan

Pembiayaan untuk pelaksanaan 11 program dan kegiatan-kegiatan diuraikan dalam Rencana Kerja Departemen Kehutanan Tahun 2010 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Alokasi pagu sementara RAPBN Bagian Anggaran 029 Departemen Kehutanan Tahun 2010 adalah Rp.3.158.827,5 juta, dengan perincian sebagaimana tabel di bawah.

Tabel 3. Alokasi pagu sementara RAPBN Tahun 2010 BA.029 Departemen Kehutanan \*)

No.	Program	Pembiayaan (Rp. juta)
1	Penerapan Kepemerintahan Yang Baik	1.150.386,4
2	Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Apartur Negara	19.362,1
3	Penelitian dan Pengembangan IPTEK	110.826,6

No.	Program	Pembiayaan (Rp. juta)
4	Pemantapan Keamanan Dalam Negeri	105.028,7
5	Pemantapan Pemanfaatan Potensi SDH <sup>**)</sup>	322.652,5
6	Perlindungan dan KSDA	442.525,4
7	Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan SDA	747.792,6
8	Pengembangan Kapasitas Pengelolaan SDA dan LH	87.486,7
9	Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan LH	110.146,7
10	Pendidikan Kedinasan	53.953,6
11	Pendidikan Menengah	25.000,0
	Jumlah	3.175.161,3

*Catatan:*

<sup>\*)</sup> Alokasi pagu sementara RAPBN Bagian Anggaran 029 Departemen Kehutanan Tahun 2010.

<sup>\*\*)</sup> Tidak termasuk alokasi pembiayaan untuk pembangunan HTI dan HTR oleh Badan Layanan Umum (BLU) yang bersumber dari APBN di luar Bagian Anggaran 029 Departemen Kehutanan Tahun 2010.



## BAB V P E N U T U P

Renja Departemen Kehutanan Tahun 2010 berlaku sejak tanggal 1 Desember 2010 sampai dengan 31 Desember 2010. Meskipun Renja Tahun 2010 merupakan pelaksanaan tahun pertama dari periode pembangunan tahun 2010-2014, namun penyusunan Renja ini belum mengacu ada Renstra Departemen Kehutanan Tahun 2010-2014. Hal ini dikarenakan secara formal RPJMN Tahun 2010-2014 yang merupakan rencana kerja bagi Presiden terpilih masa kabinet tahun 2010-2014 akan ditetapkan sekitar bulan Januari 2010, setelah pelantikan Presiden terpilih untuk masa kabinet tersebut. Disatu pihak RPJMN merupakan dokumen utama yang menjadi acuan dalam penyusunan Renstra Kelemnterian/Lembaga (K/L) termasuk Departemen Kehutanan. Oleh karena itu, format struktur Renja Departemen Kehutanan Tahun 2010 ini belum mengacu pada stuktur perencanaan pembangunan yang ditetapkan pada pedoman restrukturisasi program dan kegiatan yang merupakan bagian dari reformasi perencanaan pembangunan nasional. Namun demikian, secara substansi tentunya Renja Departemen Kehutanan ini sangat memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian melalui revisi setelah Renstra Departemen Kehutanan Tahun 2010-2024 tetapkan dengan mengacu pada pola restrukturisasi program dan kegiatan.

Sebagai satu kesatuan dokumen perencanaan tahunan dan perencanaan lima tahun, maka untuk penyusunan Renja Departemen Tahun 2010 pada BAB III disusun indikatif sebagai arahan visi, misi, dan sasaran strategis pembangunan kehutanan tahun 2010-2010 yang akan dilaksanakan tahun 2010. Berdasarkan rumusan tersebut maka ditetapkan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan beserta indikator kinerja utama untuk setiap program dan indikator keluaran untuk setiap kegiatan. Apabila struktur perencanaan dalam Renja ini berbeda dengan struktur perencanaan yang ditetapkan dalam Renstra Departemen Kehutanan Tahun 2010-2014 yang akan ditetapkan kemudian berdasarkan RPJMN Tahun 2010-2014, maka terhadap struktur perencanaan dalam Renja ini dimungkinkan untuk dilakukan penyesuaian / revisi sebagaimana diuraikan di atas.

Keberhasilan pencapaian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Departemen Kehutanan Tahun 2010 ini, akan sangat ditentukan oleh kapasitas dan kualitas kinerja pimpinan serta jajaran

pelaksana pada seluruh unit-unit kerja di lingkup Departemen Kehutanan baik di tingkat pusat maupun di daerah. Untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian dalam pelaksanaan rencana kerja tersebut maka secara berkala perlu dilakukan monitoring dan evaluasi, serta pengawasan dan pengendalian yang dituangkan dalam dokumen pelaporan termasuk pelaporan hasil audit kinerja.

Pada akhirnya diharapkan bahwa keseluruhan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pembangunan pada sektor kehutanan yang dilaksanakan oleh Departemen Kehutanan pada tahun 2010, dapat memberikan kontribusi yang nyata bagi penyelenggaraan pemerintahan serta keberhasilan pelaksanaan pembangunan nasional di segala bidang. Dengan kerja keras, etos dan budaya kerja yang tinggi serta keseriusan seluruh penyelenggara pemerintahan dan pembangunan pada jajaran Departemen Kehutanan, maka harapan yang dikemukakan di atas akan dapat terwujud, dalam kerangka kelestarian hutan dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

**MENTERI KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA,**

**H.M.S. K A B A N**

# LAMPIRAN

**L A M P I R A N**  
**RENCANA KERJA DEPARTEMEN KEHUTANAN TAHUN 2010**

Keterangan :

- \*.) *Prioritas pembangunan nasional [termasuk \*\*] dan \*\*\*]*
- \*\*.) *Prioritas pembangunan bidang pembangunan sumberdaya alam dan lingkungan hidup [termasuk \*\*]*
- \*\*\*.) *Prioritas pembangunan K/L Departemen Kehutanan*

FUNGSI/ SUB FUNGSI/ PROGRAM	KEGIATAN (Kode dan Nama)	INDIKATOR		ANGGARAN (Rp.)	PENANGGUNG JAWAB
		KELUARAN (OUTPUT)	HASIL (OUTCOME)		
<b>PELAYANAN UMUM</b>					
<b>LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, KEUANGAN DAN FISKAL SERTA URUSAN LUAR NEGERI</b>					
Penerapan Kepemerintahan Yang Baik	Indikator kinerja utama: Terselenggaranya administrasi pemerintahan pada satuan-satuan kerja lingkup Departemen Kehutanan sebanyak 269 unit, terpenuhinya hak-hak pegawai berupa gaji dan tunjangan untuk sebanyak 17.697 orang, dan rekrutmen pegawai negeri sipil (PNS) sebanyak 1.000 orang.	0001 Pengelolaan gaji, honorarium dan tunjangan	Terpenuhinya gaji & tunjangan Pegawai Negeri Sipil dan upah lingkup Departemen Kehutanan di pusat maupun Unit Pelaksana Teknis di daerah sebanyak 17.967 orang - Terpenuhinya biaya operasional penyuluh kehutanan di 33 propinsi	1.150.386.400.000	- Sekjen Dephut - Injen Dephut - Dirjen lingkup Dephut - Ka. Badan lingkup Dephut
			Tata pemerintahan kehutanan berjalan lancar	663.952.600.000	- Sek. Ditjen - Sek. Itjen - Sek. Badan - Ka. Pusat - Ka. Biro Umum dan Organisasi - Kapusinfo - Kapusluh - Karopeg

FUNGSI/ SUB FUNGSI / PROGRAM	KEGIATAN (Kode dan Nama)	INDIKATOR		ANGGARAN (Rp.)	PENANGGUNG JAWAB
		KELUARAN (OUTPUT)	HASIL (OUTCOME)		
	0002 Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran	Terpenuhinya kebutuhan rutin operasional dan pemeliharaan peralatan perkantoran pada 269 unit kerja lingkup Departemen Kehutanan baik pusat maupun di daerah	Sarana dan prasarana kantor terpelihara dan pelaksanaan tugas berjalan baik dan lancar	222.691.800.000	- Sek. Ditjen - Sek. Itjen - Sek. Badan - Ka. Pusat - Ka. Biro Umum - Karo Hukum dan Organisasi - Kapusinfo - Kapusluh - Karopeg
	0003 Pelayanan publik / birokrasi	<p>Tertaksananya Pelayanan publik/birokrasi pada Biro Kepegawaian :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan formasi peg.utk 2.650 peg</li> <li>- Peraturan formasi pegawai, 1 dokumen</li> <li>- Proses seleksi CPNS sbmyk 10.000 orang</li> <li>- Penempatan 1.000 orang PNS baru</li> <li>- Ujian dinas untuk 300 orang</li> <li>- Kenaikan pangkat untuk 3.000 orang</li> <li>- Peningkatan pegawai utk 1.200 orang</li> <li>- Pemberhentian dan pensiun pegawai untuk 500 orang</li> <li>- Alih tugas untuk 1.000 orang</li> </ul> <p>Publik atau birokrasi terlayani dalam hal informasi dalam bentuk :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Buku-buku informasi, 8 judul</li> <li>- Booklet, poster dan leaflet, 12 judul</li> <li>- Advertorial, 5 kali</li> <li>- Dialog di TV, 6 kali</li> <li>- Feature di TV, 9 kali</li> <li>- Issue strategis, 20 kali</li> <li>- Jumpa pers, 15 kali</li> </ul>	Lancarnya pelayanan publik pada Biro Kepegawaian	35.546.890.000 7.084.143.000	Ka. Biro Kepegawaian
			Publik dan birokrasi mendapat informasi yang memadai dalam mendukung kebijakan Dephut dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan kehutanan	5.517.950.000	Ka. Pusat Informasi Kehutanan

FUNGSI/ SUB FUNGSI / PROGRAM	KEGIATAN (Kode dan Nama)	INDIKATOR		ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
		KELUARAN (OUTPUT)	HASIL (OUTCOME)		
		Penyelenggaraan/pembinaan informasi publik berupa penyebarluasan informasi melalui kegiatan : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pertemuan pimpinan Dephut dengan pemimpin redaksi media massa, 4 kali</li> <li>- Kunjungan jurnalistik, 4 lokasi</li> <li>- Dialog interaktif di radio, 8 kali</li> <li>- Pameran partisipasi, 10 kali</li> <li>- Pameran mandiri, 2 kali</li> <li>- Pertemuan multipihak, 2 kali</li> <li>- Sosialisasi kebijakan, 9 kali</li> <li>- Pertemuan Bekohumas, 1 kali</li> <li>- Sosialisasi transparansi, 2 kali</li> <li>- Pembuatan laporan dan rencana Pusdal, 20 judul</li> <li>- Fasilitasi koordinasi perencanaan pembangunan kesehatan regional, 4 regional</li> </ul>		4.259.257.000	Ka. Pusat Pengendalian Pembangunan Kesehatan Reg. I, II, III dan IV
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelayanan publik pada 19 satuan kerja lingkup Direktorat Jenderal Bina Produksi Kesehatan</li> </ul>	Tersusunnya laporan tahunan, LAKIP tahun 2009, Renja dan Renstra	13.880.086.000	Sek. Ditjen BPK
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rencana Kerja 2011, 1 buku</li> <li>- Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga 2011, 1 buku</li> <li>- PKPT, 2 buku</li> <li>- Peraturan bidang pengawasan, 5 dok.</li> <li>- Pembinaan wilayah di 10 provinsi</li> <li>- Rakorwasda/Rakorbanghut regional di 33 provinsi</li> <li>- Pemutakhiran data TL cengan Inspektorat Provinsi/Kab/Kota di 6 provinsi</li> </ul>	Terpenuhinya pelayanan publik dan birokrasi secara efisien  Terpenuhinya pelayanan publik pada Inspektorat Jenderal Departemen Kesehatan	2.206.487.000	Sek. Itjen
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rapat-rapat/koordinasi/konsultasi pada 14 satuan kerja lingkup Pusat Diklat Kesehatan</li> </ul>	Terpenuhinya pelayanan publik pada satuan-satuan kerja lingkup	2.631.407.000	Ka. Pusat Diklat Kesehatan

SUB FUNGSI / PROGRAM	KEGIATAN (Kode dan Nama)	INDIKATOR		ANGGARAN (Rp.)	PENANGGUNG JAWAB
		KELUARAN (OUTPUT)	HASIL (OUTCOME)		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengembangan tenaga kediklatan pada 14 satuan kerja lingkup Pusat Pendidikan dan Latihan (Diklat) Kehutanan</li> <li>- Pengembangan organisasi dan institusi kediklatan pada 14 satuan kerja lingkup Pusat Diklat Kehutanan</li> <li>- Pengembangan sarana dan prasarana kediklatan pada 14 satuan kerja lingkup Pusat Diklat Kehutanan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pusat Diklat Kehutanan</li> </ul>		
	C021 Pembinaan koordinasi/ pelaksanaan money dan pelaporan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sosialisasi pelaksanaan pembangunan Hutan Tanaman Rakyat (HTR)/Hutan Tanaman Industri (HTI) di daerah pada 20 lokasi</li> <li>- Terpantainya pembangunan HTR dan HTI yang dibiayai oleh dana bergulir di 30 lokasi</li> <li>- Seminar/ Workshop/ Lokakarya, 4 kali</li> <li>- RKAKL, RBA, Renja Tahun 2011, penyempurnaan RSB/SPM/Tata Kelola, 6 dokumen</li> <li>- Rencana pengembangan program HTR/HTI untuk 10 lokasi</li> <li>- Terselenggaranya Pengembangan kapasitas SDM, 1 paket</li> <li>- Terselenggaranya kegiatan-kegiatan pembinaan/koordinasi/pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyuluhan kehutanan, yaitu : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terlaksananya evaluasi/aporan kegiatan penyuluhan kehutanan, melalui : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan data penyuluhan</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pembangunan HTR dan HTI yang dibiayai oleh BLU Pusat PZH</li> <li>- Terpenuhi data lapangan pembangunan HTR dan HTI di 30 lokasi</li> <li>- Tersedianya acuan pelaksanaan pembangunan HTR/HTI yang dibiayai BLU</li> <li>- Terselenggaranya kegiatan penyuluhan kehutanan sesuai target dan sasaran, serta meningkatnya kualitas program rencana kerja dan anggaran</li> </ul>	5.316.160.000 1.347.160.000	Ka. Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan
				4.248.885.000	Ka. Pusat Bina Penyuluhan Kehutanan

FUNGSI/ SUB FUNGSI / PROGRAM	KEGIATAN (Kode dan Nama)	INDIKATOR		ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
		KELUARAN (OUTPUT)	HASIL (OUTCOME)		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan laporan kehutanan bulanan/triwulan/tahunan</li> <li>- Penyusunan LAKIP</li> <li>- Monitoring dan evaluasi kegiatan penyuluhan kehutanan</li> <li>- Pengembangan website Pusat Bina Penyuluhan Kehutanan</li> <li>- Lomba Penghijauan dan Konservasi Alam</li> <li>- Pemberian apresiasi kepada pelaku usaha kehutanan</li> <li>- Rapat koordinasi/kerja/dinas/pimpin an/kelompok kerja/konsultasi</li> </ul>			
0024	Pembangunan/ pengadaan/ peningkatan sarana dan prasarana	<p>Kendaraan bermotor roda-2 sebanyak 525 unit bagi Penyuluh Kehutanan yang berada di Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (P3K) dan Badan Pelaksanaan P3K</p> <p>Pagar batas tanah Dephut di Tajur, Cibuluh dan Cibubur 3 paket; renovasi ruang poliklinik, gedung CIFOR Bogor 2 paket</p>	<p>Penyuluhan Kehutanan yang berada di Bakor P3K dan Bapel P3K dapat melaksanakan tugas operasional lapangan dengan baik</p> <p>Terpeliharanya sarana prasarana dan aset Departemen Kehutanan</p>	<p>12.160.600.000</p> <p>8.925.000.000</p>	<p>Ka. Pusat Bina Penyuluhan Kehutanan</p> <p>Ka. Biro Umum</p>
0029	Pembinaan dan pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga dan pengelolaan perlengkapan	<p>Terlenggaranya urusan tata usaha dan rumah tangga dan pengelolaan perlengkapan, berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terselenggaranya pembinaan sistem informasi kearsipan (SIK) di 33 provinsi</li> <li>- Terkelolanya arsip secara professional</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Komputerisasi tata persuratan yang terhubung dengan SKE kearsipan</li> <li>- Keprotokoleran pimpinan departemen</li> </ul>	<p>84.456.818.000</p> <p>84.346.818.000</p>	<p>Ka. Biro Umum</p>



JUDUL FUNGSI/ PROGRAM	(Kode dan Nama)	KELUARAN (OUTPUT)	HASIL (OUTCOME)	ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- pada 221 satuan kerja</li> <li>- Terpenyuhnya operasionalisasi pimpinan departemen (menteri dan para pejabat eselon I)</li> <li>- Beroperasinya kendaraan dinas dan kendaraan angkutan sebanyak 174 unit</li> <li>- Kendaraan dinas baru untuk pimpinan sebanyak 5 unit</li> <li>- Bukti kepemilikan aset tanah Dephut di 3 lokasi</li> <li>- Sertifikat untuk pengelolaan barang dan jasa (PPK dan panitia pengadaan):               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembinaan pengadaan barang dan jasa sebanyak 100 orang</li> <li>- Penyebaran pengadaan barang dan jasa sebanyak 100 orang</li> <li>- Ujian sertifikasi nasional sebanyak 400 orang</li> </ul> </li> <li>- Catatan aset eks Kanwil Dephut di 6 provinsi</li> <li>- Terselenggaranya pembinaan akuntansi BMN di 221 satuan kerja</li> <li>- Sosialisasi pembakuan sarpras di 221 satker</li> <li>- Aplikasi sistem SIMAK on line di 220 satuan kerja</li> <li>- Operasionalisasi sistem komunikasi radio terpadu (SKRT), 1 kegiatan</li> <li>- Operasionalisasi helikopter, 1 kegiatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Berjalan optimal</li> <li>- Penyelesaian aset eks Kanwil Dephut</li> </ul>	110.000.000	Ka. Pusat Bina Penyelulhan Kehutanan
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Teriaksananya Pembinaan dan Urusan Tata Usaha, rumah Tangga serta Pengelolaan Perkantoran :</li> <li>- Pencetakan/penerbitan/pengadaan/laminasi</li> <li>- Kegiatan pembinaan dan konsultasi</li> </ul>	Meningkatnya kinerja dan motivasi pegawai dalam melaksanakan tugas, serta lancarnya administrasi kantor	110.000.000	Ka. Pusat Bina Penyelulhan Kehutanan

TUJUAN/ SUB FUNGSI/ PROGRAM	KEGIATAN (Kode dan Nama)	INDIKATOR KELUARAN (OUTPUT)	HASIL (OUTCOME)	ANGGARAN (Rp)	PEMANGGUNG JAWAB
0032 Pembinaan hukum dan organisasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rancangan Undang-Undang (RUU), 3 dokumen</li> <li>- Peraturan pelaksanaan UU, 3 dokumen</li> <li>- Peraturan pelaksanaan PP, 1 dokumen</li> <li>- RPP, 5 dokumen</li> <li>- Peraturan perundang-undangan, 1 dokumen</li> <li>- Permenhut, 12 dokumen</li> <li>- Fasilitasi Peraturan Pemerintah (PP), 1 dokumen</li> <li>- Analisis/Kajian organisasi dan tatalaksana, 1 judul</li> <li>- Penelaahan hukum, 16 judul</li> <li>- Kajian hukum, 3 judul</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Legisiasi kekhutanan</li> <li>- Pemantapan organisasi</li> <li>- Bantuan hukum</li> </ul>	bidang	8.787.234.000	Ka. Biro Hukum dan Organisasi
0033 Penyelenggaraan / pembinaan informasi publik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksanaan penyuluhan dan penyebaran informasi :</li> <li>- Penyebaran informasi di media elektronik, 2 judul</li> <li>- Pengembangan materi media cetak 7 judul, 28.500 eksemplar</li> <li>- Pameran, 5 kali</li> <li>- Advertorial/kampanye kebijakan kekhutanan, 1 kegiatan</li> </ul>	Tersedianya jenis dan jumlah materi penyuluhan kekhutanan secara memadai		7.867.447.000 2.944.290.000	Ka. Pusat Bira Penyuluhan kekhutanan
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kunjungan jurnalistik, 5 kegiatan</li> <li>- Pertemuan multipihak di pusat, 1 kegiatan</li> <li>- Pertemuan multipihak di regional, 2 kegiatan</li> <li>- Kunjungan kerja DPR RI, 8 kegiatan</li> <li>- Sosialiasi banghnut kepada LSM, asosiasi, perguruan tinggi, Pemda, 10 kegiatan</li> </ul>	Terpublikasikannya kegiatan pembangunan kekhutanan tahun 2010		4.931.450.000	Ka. Pusat Informasi kekhutanan

SUB FUNGSI / PROGRAM	NEULAIAN (Kode dan Nama)	KELUARAN (OUTPUT)	HASIL (OUTCOME)	ANGGARAN (Rp.)	PENANGGUNG JAWAB
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kunjungan kerja pimpinan Dephut dan DPR RI, 5 kegiatan</li> <li>- Dialog TV, 5 kegiatan</li> <li>- Dialog Radio, 7 kegiatan</li> <li>- Pameran, 5 kali</li> <li>- Partisipasi, 12 kali</li> <li>- Advertorial, 12 kali</li> </ul>			
	0035 Pembinaan/penyusunan program rencana kerja dan anggaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersusunnya rencana program, kegiatan dan anggaran, 1 judul</li> <li>- Penyusunan RPPK, Renja Pusbinluh, RKA KL, Renstra, Rencana Kerja PKA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatnya kualitas program, rencana kerja dan anggaran</li> <li>- Meningkatnya kualitas program rencana kerja dan anggaran</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>4.357.100.000</li> <li>3.216.000.000</li> <li>1.309.145.000</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ka. Biro Perencanaan</li> <li>Ka. Pusat Bina Penyuluhan Kehutanan</li> </ul>
	0036 Penatausahaan anggaran penyelenggaraan perbendaharaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Data pengelolaan keuangan lingkup pusat dan daerah, 7 set</li> <li>- Pedoman pengurusan keuangan, 7 pedoman</li> <li>- Tindak lanjut LHP, 7 kasus</li> <li>- Penyelesaian kasus TPTGR, 7 kasus</li> <li>- Analisis pengujian keuangan, 720 judul</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengelolaan perbendaharaan dan pengelolaan keuangan berjalan dengan baik dan lancar</li> </ul>	5.541.950.000	Ka. Biro Keuangan
	0049 Penyelenggaraan/pengembangan SDM	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendidikan dan pelatihan pembentukan penyuluh kehutanan, 3 angkatan</li> <li>- Penataran Tim Penilai Angka Kredit, 2 angkatan</li> <li>- Pelatihan penyuluh pendamping KUP/SPKP, 2 angkatan</li> <li>- <i>In house</i> training, 2 angkatan</li> <li>- Fasilitasi SDM penyuluhan kehutanan dalam rangka mengikuti diklat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terbentuknya 90 tenaga fungsional penyuluhan kehutanan</li> <li>- Meningkatnya kualitas Tim Penilai Angka Kredit sebanyak 60 orang</li> <li>- Meningkatnya kualitas penyuluh kehutanan sebagai</li> </ul>	1.549.090.000	Ka. Pusat Bina Penyuluhan Kehutanan

SUB FUNGSI / PROGRAM	KEGIATAN (Kode dan Nama)	INDIKATOR		ANGGARAN (Rp.)	PENANGGUNG JAWAB
		KELUARAN (OUTPUT)	HASIL (OUTCOME)		
			pendamping KUP/SPKP sebanyak 60 orang - Meningkatkan kapasitas SDM penyuluhan Kehutanan		
	0050 Pengembangan perencanaan administrasi keuangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penanaman modal</li> <li>- PMDN :                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 71 unit HTI patungan</li> <li>- 161 unit IUPHHK-HT</li> <li>- 328 unit IUPHHK-HA</li> <li>- 68 unit pemanfaatan wisata alam</li> </ul> </li> <li>- Kembalinya pinjaman/piutang Rp.28 milyar</li> <li>- Pembayaran handling fee kepada bank penyalur/pelaksana Rp 4,5 M</li> <li>- Penyusunan dokumen pelaksanaan di 1.765 Satker</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatnya PNPB dan pengembalian hutang piutang, tersusunya kebijakan investasi serta bahan pelaksanaan anggaran</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 49.097.120.000</li> <li>- 25.614.110.000</li> </ul>	Ka. Biro Keuangan
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Renstra Dephut 2010-2014, 1 dokumen</li> <li>- Renja 2011, 1 dokumen</li> <li>- DJPA di 245 satuan kerja</li> <li>- LAKIP, 1 dokumen</li> <li>- Evaluasi/laporan (tahunan), 1 dokumen</li> <li>- Data perencanaan, 1 set</li> <li>- Raker Dephut, 1 kegiatan</li> <li>- Rakorenbanghupus, 1 kegiatan</li> <li>- Rakornasbanghuput, 1 kegiatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perencanaan program Kegiatan Departemen Kehutanan menjadi lebih terarah</li> </ul>	23.311.320.000	Ka. Biro Perencanaan
	0051 Pengembangan SDM administrasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan kompetensi SDM aparatur:</li> <li>- Seleksi tugas belajar S2/S3 untuk 200 orang</li> <li>- Seleksi calon peserta diklat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terselenggaranya kegiatan pengembangan SDM dan administrasi kegiatan</li> </ul>	7.760.697.000	Ka. Biro Kepegawaian

FUNGSI/ SUB FUNGSI / PROGRAM	KEGIATAN (Kode dan Nama)	INDIKATOR		ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
		KELUARAN (OUTPUT)	HASIL (OUTCOME)		
	kepegawaian	<ul style="list-style-type: none"> <li>- kepepininan, Manajemen Teknis dan Fungsional Binaan Dephut untuk 200 orang</li> <li>- Pelaksanaan Personnel Assessment Centre (PAC) calon pejabat struktural</li> <li>- Dilkat Assessor untuk 20 orang</li> <li>- Ujian GI/PI/PG untuk 300 orang</li> <li>- Standar kompetensi jabatan pegawai, 1 dokumen</li> <li>- Peningkatan pelayanan mutasi, pensiun dan pegadaaan PNS:</li> <li>- Kenaikan jabatan untuk 250 orang</li> <li>- Penyusunan statistik dan dokumentasi masalah kepegawaian :</li> <li>- 1 program SIMPEG</li> <li>- 1 unit Web site</li> <li>- Sabta Lancana KS untuk 1.100 orang</li> <li>- Purna Karya WB untuk 300 orang</li> <li>- Yayasan Bina Rahardja untuk 550 orang</li> <li>- Pengembalian Taperum untuk 300 orang</li> <li>- Pengembangan dan penilaian jabatan fungsional:</li> <li>- Penyempurnaan peraturan, 1 dokumen</li> <li>- Kelembagaan jabatan fungsional, 1 jabatan</li> <li>- Organisasi profesi pejabat fungsional , 1 jabatan</li> </ul>			
0076 Sistem pengelolaan administrasi keuangan		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan tahunan PNB, 1 dokumen</li> <li>- Penyaluran DBH Rp.1.500,26 juta</li> <li>- Penerimaan PNB :</li> <li>- DR Rp.1.232.520 juta.</li> <li>- IHPH (alam dan tanaman) Rp.1.259 juta</li> <li>- Non kayu Rp.273,4 juta</li> </ul>	Efektifitas pengelolaan dana meningkat	13.425.670.000	Ka. Biro Keuangan

FUNGSI/ SUB FUNGSI / PROGRAM	KEGIATAN (Kode dan Nama)	INDIKATOR		ANGGARAN (Rp.)	PENANGGUNG JAWAB
		KELUARAN (OUTPUT)	HASIL (OUTCOME)		
	0088 Pembinaan/penyele nggaran kerjasama internasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Partisipasi pertemuan/konvensi interna sional, 120 kegiatan</li> <li>- Penyusunan bahan sidang, <i>Internatio nal/ Arrangement/Agreement</i> dan <i>Project Proposal</i>, 20 kegiatan</li> <li>- Sosialisasi/workshop/seminar/publikasi/ monev kegiatan kerjasama internasio nal, 20 kegiatan</li> <li>- Penguatan dan pengembangan hubungan kerjasama luar negeri, 10 kegiatan</li> </ul>	Hubungan kerjasama internasional meningkat	10.937.000.000	Ka. Pusat Kerjasama Luar Negeri
	0095 Penyelenggaraan/ peningkatan akuntansi pemerintah dan KMN	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan keuangan (Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan catatan atas laporan keuangan (CALK) tingkat UAPA (Dephut), 12 judul</li> <li>- Laporan keuangan (Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan CALK tingkat UAPPA-E1 (Setjen), 6 judul</li> <li>- Pengelolaan data pembukuan sesuai jumlah eselon, 14 dokumen</li> <li>- Sistem informasi manajemen dan akuntansi, 1 unit</li> <li>- Rencana aksi perbaikan laporan keuangan tingkat departemen dan eselon I atas LHP BPK-RI, 14 dokumen</li> <li>- Penyebaran petugas penatausahaan BMN Lingkup Dephut, 1 paket</li> <li>- Honor Simak BMN lingkup Dephut Pusat, 105 orang</li> </ul>	<p>Terlaksananya pengelolaan keuangan departemen yang kredibel (opini audit BPK-RI yang lebih baik)</p> <p>Terkelolanya barang milik/kekayaan negara lingkup Dephut</p>	10.755.820.000 5.851.620.000	Ka. Biro Keuangan
				4.904.200.000	Ka. Biro Umum

FUNGSI/ SUB FUNGSI / PROGRAM	KEGIATAN (Kode dan Nama)	INDIKATOR		ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
		KELUARAN (OUTPUT)	HASIL (OUTCOME)		
	4001 Pengendalian pembangunan kehutanan (***)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fasilitasi koordinasi perencanaan, pemberian bimbingan, pemantauan dan evaluasi, 4 regional</li> <li>- Fasilitasi koordinasi tematik, 4 regional</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terkoordinasikannya perencanaan, pemberian bimbingan, pemantauan dan evaluasi</li> <li>- Terkoordinasikannya pembangunan kehutanan</li> <li>- Terkoordinasikannya penanganan permasalahan pembangunan kehutanan regional</li> </ul>	10.268.580.000	Ka. Pusat Pengendalian Pembangunan Regional I, II, III dan IV
	4002 Pembinaan standarisasi dan Lingkungan (***)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Administrasi kegiatan : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan kegiatan Pustanling, 2 judul</li> </ul> </li> <li>- Pengembangan standar produk Kehutanan : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) produk kehutanan, 10 judul.</li> <li>- Modul instruksional (pengukuran dan pengujian hasil hutan, informasi produk hasil hutan), 1 paket.</li> <li>- Uji validasi rancangan standar produk kehutanan, 1 paket.</li> <li>- Harmonisasi standar regional/internasional, 3 judul.</li> </ul> </li> <li>- Pengembangan Standar Pengelolaan Hutan Lestari dan Jasa Lingkungan : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rancangan Standar Perdagangan Karbon Sukarela, 1 judul.</li> </ul> </li> <li>- Pengembangan kemitraan dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, 1 paket.</li> <li>- Rancangan Standar Legalitas Kayu di tingkat regional, 1 judul.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan daya saing produk hasil hutan Indonesia di pasar internasional.</li> <li>- Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap standar nasional.</li> <li>- Meningkatnya keberterimaan dan pengakuan standar nasional oleh masyarakat tingkat regional dan internasional.</li> <li>- Meningkatnya komitmen para pihak dalam melaksanakan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim</li> <li>- Meningkatnya kompetensi dan</li> </ul>	4.244.763.000	Ka. Pusat Standarisasi Lingkungan

SUB FUNGSI / PROGRAM	KEGIATAN (Kode dan Nama)	INDIKATOR KELUARAN (OUTPUT)	HASIL (OUTCOME)	ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengembangan Standar Kompetensi Kerja Bidang Kehutanan :</li> <li>- Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Kehutanan, 3 judul.</li> <li>- Peningkatan kapasitas Komite/Panitia Teknis Perumusan Standar, 1 paket</li> <li>- Peningkatan Sadar Mutu &amp; Lingkungan : SNI telah disosialisasikan, 10 judul               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendampingan sertifikasi penerapan standar nasional/internasional, 5 unit</li> <li>- Pendampingan/persiapan sertifikasi hutan rakyat, 5 unit</li> <li>- Sosialisasi standar SNI dan standar internasional, 2 lokasi</li> <li>- Safari penyegaran/ peningkatan teknis penguji/pengawas penguji hasil hutan, 2 lokasi</li> <li>- Sosialisasi pengelolaan hutan lestari (PHL)/ pengelolaan hutan berbasis masyarakat lestari (PHBML), 4 lokasi</li> <li>- Penataran penerapan standar, 1 paket</li> <li>- Publikasi standar, 2 judul</li> </ul> </li> <li>- Pengembangan Pengendalian Dampak Lingkungan :               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sosialisasi pengendalian lingkungan, 1 paket</li> <li>- Penataran lingkungan, 1 paket</li> <li>- Apresiasi masyarakat terhadap sumberdaya air dan hutan meningkat, 4 propinsi</li> <li>- Apresiasi masyarakat terhadap perubahan iklim meningkat, 4 propinsi</li> <li>- Inisiatif dan apresiasi masyarakat terhadap sumber daya air dan hutan</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- profesionalisme tenaga kerja sektor kehutanan.</li> <li>- Sistem pengembangan an SNI dan standar pengelolaan hutan lestari berjalan dengan baik</li> <li>- Adanya unit manajemen/instansi siap untuk disertifikasi</li> <li>- Adanya unit manajemen hutan rakyat yang bersertifikasi</li> <li>- Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang SNI dan standar Internasional</li> <li>- Meningkatnya pemahaman pengusaha dan masyarakat tentang pengelolaan hutan lestari</li> <li>- Meningkatnya keahlian masyarakat dalam penerapan standar</li> <li>- Masyarakat paham dan berperan serta/</li> </ul>		



FUNGSI/ SUB FUNGSI / PROGRAM	KEGIATAN (Kode dan Nama)	INDIKATOR KELUARAN (OUTPUT)	HASIL (OUTCOME)	ANGGARAN (Rp)	PEMANGGUNG JAWAB
Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara	Indikator kinerja utama: Laporan hasil audit (LHA) Reguler sebanyak 220 laporan, laporan tindak lanjut hasil audit sebanyak 60 laporan, 33 laporan audit khusus, serta pengembangan kapasitas tenaga audit/fungsional auditor melalui diklat dan bimbingan teknis sebanyak 120 orang.	meningkat, 4 propinsi - Inisiatif dan apresiasi masyarakat dalam menyikapi perubahan iklim meningkat, 4 propinsi - Perbaikan lingkungan, 4 propinsi - Data kemampuan karyawan lingkup kehutanan dalam pengelolaan lingkungan - Apresiasi masyarakat terhadap sumberdaya air dan hutan	peduli dalam pengelolaan lingkungan	19.362.100.000	Itjen Dephut
	0084 Penyenggaraan dan pengawasan pemeriksaan aparatur negara (internal)	- 220 laporan LHA Reguler - 33 laporan LHA khusus - 16 laporan review laporan keuangan - 60 laporan tindak lanjut hasil audit departemen - 40 laporan pencermatan kegiatan - 30 laporan identifikasi - Diklat teknis/fungsional PNS untuk 120 orang - Pengembangan SDM untuk 20 orang - Pembinaan pegawai Itjen untuk 220 orang - Buletin pengawasan, 4 edisi	- Menurunnya jumlah dalam pelaksanaan tugas untuk 2010 - Jumlah tunggakan kasus/temuan hasil pemeriksaan berkurang - Bertambahnya pengetahuan PNS lingkup Itjen	19.362.100.000	Sek. Itjen Dephut
<b>PENELITIAN DASAR DAN PENGEMBANGAN IPTEK</b>					
Penelitian dan Pengembangan Iptek	Indikator kinerja utama: Data dan informasi teknologi, modelling, pedoman, hasil kajian dan hasil rekayasa alat terkait dengan landsekap hutan, pengelolaan hutan alam, pengelolaan hutan tanaman, pengelolaan biodiversitas, hasil hutan bukan kayu, pengelolaan DAS, perubahan iklim, pengolahan hasil hutan dan kebijakan kehutanan.			1.10.826.500.000	Kepala Badan Litbang Kehutanan

FUNGSI/ SUB FUNGSI/ PROGRAM	KEGIATAN (Kode dan Nama)	INDIKATOR		ANGGARAN (Rp.)	PENANGGUNG JAWAB
		KELUARAN (OUTPUT)	HASIL (OUTCOME)		
	0027 Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan	- Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan di satuan kerja Pusat Litbang Kehutanan	- Penyelenggaraan administrasi dan pengelolaan keuangan berjalan dengan tertib dan lancar	900.000.000	Sek. Badan Litbang Kehutanan
	0051 Pengembangan SDM dan administrasi kepegawaian	- Pengembangan SDM dan administrasi kepegawaian di satuan kerja Pusat Litbang Kehutanan	- Penyelenggaraan pengembangan SDM dan administrasi kepegawaian berjalan dengan tertib	3.442.268.000	
	0065 Penyelenggaraan Pembinaan Teknis Administrasi	- Pembinaan teknis administrasi di satuan kerja Pusat Litbang Kehutanan	- Penyelenggaraan teknis administrasi berjalan dengan tertib	800.000.000	
	0081 Pengadaan Kendaraan	- Kendaraan untuk satuan kerja Litbang Kehutanan di Bogor, Sleman dan Manado	- Kegiatan operasional perkantoran menjadi lebih lancar	1.035.200.000	
	0095 Penyelenggaraan /peningkatan akuntansi pemerintah dan KMN	- Peningkatan akuntansi pemerintah dan kekayaan milik negara di satuan kerja Pusat Litbang Kehutanan	- Sistem akuntansi pemerintah dan KMN menjadi lebih baik	967.307.000	
	0104 Kerjasama Antar Instansi Pemerintah/Lembaga	- Kerjasama antar instansi pemerintah/swasta/lembaga di satuan kerja Pusat Litbang Kehutanan	- Kegiatan kerjasama antar instansi pemerintah/swasta/lembaga tercapai	2.000.000.000	
	4035 Sistem Penunjang Kelitbangan dan Penerapan Hasil Litbang Kehutanan	- Sistem Penunjang Kelitbangan dan Penerapan Hasil Litbang Kehutanan di 13 satuan kerja Litbang Kehutanan	- Kegiatan kelitbangan dan penerapan hasil litbang menjadi lebih baik	7.741.825.000	

FUNGSI/ SUB FUNGSI / PROGRAM	KEGIATAN (Kode dan Nama)	INDIKATOR KELUARAN (OUTPUT)		HASIL (OUTCOME)	ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
	4043 Penelitian dan Pengembangan Kehutanan (**)	Landsekap Hutan : - Tersusunnya IPTEK hasil penelitian dan pengembangan kehutanan integrative, 9 paket (**) - Bahan penyusunan modeling lansekap DAS, 1 paket - Bahan penyusun modeling lansekap perkotaan, 1 paket	Pengelolaan Hutan Alam : - Bahan penyusunan pedoman pengelolaan hutan alam bekas tebangan, 1 paket - Teknik dan Sistem Silviculture menurut Tipologi LOF ( <i>Logged Over Forest</i> ), 1 paket	- Tersedianya data dan informasi Penyusunan DSS I Landsekap Berbasis DAS - Tersedianya data dan informasi Penyusunan DSS lansekap perkotaan	31.244.000.000	- Ka. Pusat Litbang Hutan dan Konservasi Alam - Ka. Pusat Litbang Hasil Hutan - Ka. Pusat Litbang Hutan Tanaman - Ka. Pusat Penelitian Sosek dan Kebijakan Kehutanan
		Pengelolaan Hutan Tanaman: - Teknologi Peningkatan Produktifitas hutan tanaman penghasil kayu pertukangan untuk jenis unggulan dan jenis alternatif, 1 paket - Teknologi Peningkatan Produktifitas hutan tanaman penghasil kayu pulp untuk jenis unggulan dan jenis alternatif, 1 paket - Teknologi peningkatan produktifitas hutan tanaman penghasil kayu energi, 1 paket - Hasil kajian optimalisasi pengelolaan hutan tanaman dengan system Agroforestry, 1 paket		- Tersedianya data dan informasi pendukung Penyusunan Pedoman Pengelolaan Hutan Alam Bekas Tebangan - Tersedianya data dan informasi Penyusunan Teknik Dan Sistem Silviculture Menurut Tipologi LOF Tersedianya data dan informasi: - penyusunan paket IPTEK peningkatan produktifitas Hutan Tanaman Penghasil Kayu Pertukangan untuk Jenis Unggulan dan Jenis Alternatif - pendukung penyusunan paket IPTEK peningkatan produktifitas Hutan Tanaman Penghasil Kayu Pulp untuk Jenis		

SUB FUNGSI / PROGRAM	KEGIATAN (Kode dan Nama)	INDUKALOK KELUARAN (OUTPUT)	HASIL (OUTCOME)	ANGGARAN (Rp.)	PENANGGUNG JAWAB
			<p>Unggulan dan Jenis Alternatif</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pendukung paket IPTEK peningkatan produktifitas Hutan Tanaman Penghasil Kayu Energi</li> <li>- pendukung paket IPTEK Pengelolaan Hutan Tanaman dengan System Agroforestry</li> </ul>		
		<p>Biodiversitas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Teknologi konservasi jenis secara ex situ dan in situ, 1 paket</li> <li>- Bahan penyusunan model pengelolaan kawasan konservasi secara kolaboratif, 1 paket</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terlaksananya proses Pengembangan Teknologi Konservasi Jenis Secara Ex Situ dan In Situ</li> <li>- Terlaksananya proses Pengembangan Model Pengelolaan Kawasan Konservasi secara Kolaboratif</li> </ul>		
		<p>Hasil Hutan Bukan Kayu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Teknologi pengelolaan HHBK (Food, Energi dan bahan untuk obat-obatan) dan HHBK lainnya, 1 paket</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terlaksananya proses Pengembangan Teknologi Pengelolaan HHBK (Food, Energi dan Bahan Untuk Obat-Obatan)</li> </ul>		
		<p>Pergeolaan DAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bahan penyusunan model optimasi teknologi pengelolaan DAS, 1 paket</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terlaksananya proses Pengembangan Optimasi Teknologi Pengelolaan DAS</li> </ul>		

FUNGSI/ SUB FUNGSI/ PROGRAM	KEGIATAN (Kode dan Nama)	KELUARAN (OUTPUT) INDIKATOR	HASIL (OUTCOME)	ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
		<p>Perubahan Iklim:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hasil kajian Strategi Mitigasi Kehutanan, 1 paket</li> <li>- Hasil penelitian Perubahan Iklim, 1 paket</li> <li>- Perhitungan Emisi Kehutanan (Inventarisasi), 1 paket</li> <li>- Strategi Adaptasi Biokologi dan Sosial Ekonomi Budaya Terhadap Perubahan Iklim, 1 paket</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terlaksananya proses Penyusunan Strategi Mitigasi Kehutanan</li> <li>- Terlaksananya proses Pengembangan Teknologi Perhitungan Emisi Kehutanan (Inventarisasi)</li> <li>- Terlaksananya proses Penyusunan Strategi Adaptasi Biokologi dan Sosial Ekonomi Budaya terhadap perubahan iklim</li> </ul>		
		<p>Pengolahan Hasil Hutan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hasil penelitian sifat dasar kayu dan non kayu, 1 paket</li> <li>- Hasil kajian pemanfaatan dan penyempurnaan bahan kayu dan non kayu, 1 paket</li> <li>- Hasil rekayasa alat dan bahan industri kehutanan berbasis teknologi tepat guna dan ramah lingkungan, 1 paket</li> <li>- Hasil kajian standarisasi produk panel kayu baru (kayu potensial), pulp dan kertas, 1 paket</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terlaksananya proses Pengembangan Optimalisasi Penyempurnaan Sifat Dasar Kayu dan Non Kayu</li> <li>- Terlaksananya proses Pengembangan Optimalisasi Pemanfaatan dan Penyempurnaan Bahan Kayu Dan Non Kayu</li> <li>- Terlaksananya proses Pengembangan Alat dan Bahan Industri Kehutanan Berbasis</li> </ul>		

FUNGSI/ SUB FUNGSI/ PROGRAM	KEGIATAN (Kode dan Nama)	INDIKATOR KELUARAN (OUTPUT)	HASIL (OUTCOME)	ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
		<p>Teknologi Tepat Guna dan Ramah Lingkungan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terlaksananya proses Pengembangan Produk Panel Kayu Baru (Kayu Potensial), Pulp dan Kertas</li> </ul>	<p>- Terlaksananya proses Penyusunan Strategi Penguatan Tata Kelola (<i>Good Governance</i>) Kehutanan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terlaksananya Proses Penyusunan Strategi Penguatan Tata Kelola Industri dan Perdagangan Hasil Hutan</li> </ul>		
	<p>4044 Perencanaan, Evaluasi, Kerjasama dan Peningkatan Sarana Litbang (**)</p>	<p>Kebijakan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hasil kajian Penguatan tata kelola (good governance) kehutanan, 1 paket</li> <li>- Hasil kajian Penguatan tata kelola industri dan perdagangan hasil hutan, 1 paket</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terlaksananya mekanisme koordinasi penyelenggaraan kegiatan Litbang yang lebih efektif</li> <li>- Tersusunnya sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan</li> <li>- Tersusunnya rencana jangka pendek dan jangka panjang</li> <li>- Terlaksananya tugas pelaksanaan sesuai dengan standar</li> </ul>	<p>50.024.000.000</p>	<p>Sek. Badan Litbang Kehutanan</p>

FUNGSI/ SUB FUNGSI/ PROGRAM	KEGIATAN (Kode dan Nama)	KELUARAN (OUTPUT)	INDIKATOR	HASIL (OUTCOME)	ANGGARAN (Rp.)	PENANGGUNG JAWAB
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- MoU Kerjasama dengan 8 mitra lembaga luar negeri dan dengan 14 mitra lembaga dalam negeri</li> <li>- Peningkatan sarana dan prasarana, 5 paket</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>ISO</li> <li>- Peningkatan kualitas SDM</li> <li>- Terbangunnya jejaring kerja litbang baik nasional maupun internasional</li> <li>- Terlaksananya optimasi pemanfaatan peralatan dan akreditasi laboratorium, bengkel rekayasa, alat kantor, sarana transportasi, pemanfaatan hutan-hutan penelitian</li> </ul>		
	4045 Penerapan Hasil Litbang Kehutanan (**)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Desiminasi dan pemasyarakatan hasil litbang kehutanan, 20 paket (**)</li> <li>- Laporan desiminasi hasil penelitian di bidang kehutanan, 1 paket</li> <li>- Gelar Teknologi, 20 kali</li> <li>- 6 jurnal hasil Litbang</li> <li>- Seminar/Ekspose hasil-hasil Litbang, 20 kali.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terselenggaranya dan penyebarluasan hasil pemanfaatan litbang</li> </ul>	12.692.000.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kapus Litbang Hutan dan Kons. Alam</li> <li>- Kapus Litbang Hasil Hutan</li> <li>- Kapus Litbang Hutan Tanaman</li> <li>- Kapuslit Sosek dan Kebijakan Kehutanan</li> </ul>
<b>KETERTIBAN DAN KEAMANAN</b>						
KEPOLISIAN						
Pemantapan Keamanan Dalam Negeri	<p>Indikator kinerja utama: Menurunnya tindak pidana dibidang kehutanan sebesar 50% dari tindak pidana yang terjadi tahun 2009, meningkatnya kapasitas SDM bidang pengamanan hutan dan sarana dan prasarana bidang pengamanan hutan serta meningkatnya kepedulian dan peran serta masyarakat dalam pengamanan hutan.</p>					
	105.028.699.000					Dirjen PHKA

FUNGSI/ SUB FUNGSI/ PROGRAM	KEGIATAN (Kode dan Nama)	KELUARAN (OUTPUT)	INDIKATOR	HASIL (OUTCOME)	ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
	4055 Pengamanan Kawasan Hutan (*)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyelesaian 50% kasus tindak pidana kehutanan yang ditangani oleh Polhut/PPNS sampai dengan P.21 untuk tahun 2010 (*)</li> <li>- Penyelesaian 25% tunggakan kasus tindak pidana kehutanan tahun 2009 yang ditangani oleh Polhut/PPNS s.d dengan P.21 (*)</li> <li>- Peningkatan sarana dan prasarana pengamanan hutan di 77 UPT TN dan KSDA, dan Kabupaten/Kota (*)</li> <li>- Operasi pengamanan hutan di pelabuhan, di bandara dan di 50 TN serta 27 KSDA, sebanyak 924 kali (*)</li> <li>- Peningkatan kualitas SDM pengamanan hutan :</li> <li>- 200 Polhut (*)</li> <li>- 120 PPNS (*)</li> <li>- Pembentukan 33 kelompok/unit Masyarakat Mitra Polhut (MMP) (*)</li> <li>- 462 kali operasi repressif/gabungan</li> <li>- 946 kali operasi represif TSL</li> <li>- Penyelesaian Penanganan perambahan di 12 propinsi</li> <li>- Masyarakat dalam pengamanan hutan meningkat/pembentukan Pam Swakarsa sebesar 10%</li> <li>- Sosialisasi dan kampanye di pusat dan daerah di 78 unit kerja</li> <li>- Data register perkara dan up date data base PPH sebanyak 78 set</li> <li>- Kerjasama pamhut nasional, regional dan internasional, 5 kali</li> <li>- Pembentukan FK-PPNS, IPKI di 5 propinsi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menurunya tindak pidana kehutanan sebesar 50% dari 2009</li> <li>- Meningkatnya kapasitas SDM bidang pengamanan hutan</li> <li>- Meningkatnya sarana dan prasarana bidang pengamanan hutan</li> <li>- Meningkatnya kepedulian dan peran masyarakat dalam pengamanan hutan</li> </ul>	105.028.699.000 (11.611.126.000)	Dir. Penyidikan dan Perlindungan Hutan	



FUNGSI/ SUB FUNGSI / PROGRAM	KEGIATAN (Kode dan Nama)	INDIKATOR		ANGGARAN (Rp.)	PENANGGUNG JAWAB	
		KELUARAN (OUTPUT)	HASIL (OUTCOME)			
PERTANJIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN, KELAUTAN Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan		Indikator kinerja utama: Terbentuknya/penetapan 10% dari kawasan hutan produksi menjadi areal kesatuan pengelolaan hutan produksi (KPHP), tersedianya calon areal pemanfaatan hasil hutan di 25 propinsi, peningkatan hasil hutan sebanyak 1% dari tingkat produksi tahun 2009, pembuatan tanaman HTI dan HTR baru seluas 1,5 juta Ha, peningkatan PNBP dari pemanfaatan kayu sebesar 5% dibanding penerimaan tahun 2009, pembuatan tanda batas luar kawasan hutan sepanjang 2.000 Km, pembuatan tanda batas fungsi kawasan hutan sepanjang 1.400 Km, penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan non kehutanan diperoleh PNBP sebesar Rp 200 Milyar, penetapan wilayah KPHP dan KPHL di 4 propinsi, penetapan wilayah KPHK sebanyak 20 unit atau propinsi.			322.652.500.000	- Dirjen BPK - Dirjen Planologi Kehutanan - Sekjen Dephut
	0024 Pembangunan/Pen gadaan/Peningkata n Sarana dan Prasarana	Tanah dan pembangunan gedung kantor dan rumah dinas pejabat Tersedianya kendaraan roda 4/roda 2 dan peralatan kantor	Terbangunnya gedung yang mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan pembangunan	16.436.600.00	Sek. Ditjen BPK	
	4006 Pengembangan Pengelolaan Pemanfaatan Hutan Alam (*)	Produksi HH kayu/HHBK/Jasing meningkat sebesar 1 % dari tahun 2009 (*) Unit IUPHHK bersertifikat PHPL meningkat sebesar 10% dari tahun 2009 (*) 10% produksi penebangan pada hutan produksi bersertifikat SVLK	Meningkatnya produksi dan diversifikasi hasil hutan, bertambahnya 10% IUPHHK yang memiliki sertifikat PHPL dan produksi penebangan pada hutan produksi bersertifikat SVLK sebesar 10%	39.000.000.000	Dir. Bina Pengembangan Hutan Alam	
4009 Pengendalian Peredaran Hasil Hutan (**)	PNBP kehutanan (kayu dan bukan kayu) meningkat sebesar 5% dari tahun 2009 (**) Terimplementasinya SIPUHH secara on-line di 60 unit manajemen IUPHHK dan IUPHHK sehingga data dan informasi peredaran HH akurat dan tepat waktu (**) Tersosialisasikannya SVLK di 32 provinsi	Pelaksanaan kegiatan penatausahaan hasil hutan dan iuran kehutanan berjalan dengan tertib sesuai ketentuan	41.015.979.000	Dir. Bina Iuran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan		

FUNGSI/ SUB FUNGSI / PROGRAM	KEGIATAN (Kode dan Nama)	INDIKATOR		ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
		KELUARAN (OUTPUT)	HASIL (OUTCOME)		
	4010 Pembinaan dan Pengendalian Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (***)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersusunnya program dan anggaran pada 57 unit kerja</li> <li>- Data pelaksanaan kegiatan Ditjen BPK terparitau secara periodik pada 57 unit kerja</li> <li>- Penyusunan dan dipatuhinya ketentuan-ketentuan hukum bidang BPK</li> <li>- Sarana kerja untuk mendukung tugas-tugas pada 24 unit/satuan kerja</li> </ul>	Kelembagaan Ditjen BPK lebih efektif mendukung penyelenggaraan PHPL	46.465.850.000	Sek. Ditjen BPK
	4011 Pengkukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan (*)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Draft final peta penunjukan dan penetapan kawasan hutan di propinsi Riau dan Kalteng, 2 judul (*)</li> <li>- Data penetapan kawasan hutan yang sudah temu gelang di 33 propinsi, 33 judul (*)</li> <li>- Sistem informasi pengukuhan kawasan hutan, 1 kegiatan (*)</li> <li>- Data hasil identifikasi dan tindak lanjut permasalahan kawasan hutan di 20 propinsi, 20 buku (*)</li> <li>- Laporan tindak lanjut hasil pencermatan permasalahan perubahan fungsi di 4 lokasi, 4 judul (*)</li> <li>- Peta hasil telaahan permohonan perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan di 20 lokasi, 20 judul (*)</li> <li>- Peta telaahan data kawasan hutan, 200 lbr</li> <li>- Peta penilaian dan pedoman tata batas areal kerja IUPHH/IPPA, 50 peta/1 pedoman</li> <li>- Hasil sosialisasi hasil pengukuhan kawasan hutan, 2 prov</li> </ul>	Tertatanya fungsi dan kepastian kawasan hutan berdasarkan penunjukan kawasan hutan dan perairan	46.500.000.000	Dir. Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan

FUNGSI/ SUB FUNGSI / PROGRAM	KEGIATAN (Kode dan Nama)	INDIKATOR KELUARAN (OUTPUT)	HASIL (OUTCOME)	ANGGARAN (Rp.)	PENANGGUNG JAWAB
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Data pengumpulan dan digitasi data spasial kws hutan, 31 lokasi</li> <li>- Dokumen integrasi data spasial KH, 33 provinsi</li> <li>- Dokumen analisis dan penyajian data dan informasi pengukuran, 1 judul</li> <li>- Data dan informasi multimedia bidang pengukuran dan penatagunaan kawasan hutan, 33 prov</li> <li>- Hasil tata batas kawasan hutan sepanjang 3400 km**)</li> <li>- Hasil penyelesaian permasalahan perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan, 112 lokasi</li> <li>- Data monitoring dan evaluasi serta bimbingan teknis perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan, 15 lokasi</li> <li>- Dokumen updating data perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan, 1 judul</li> </ul>			
4012 Pembentukan Wilayah Pengelolaan dan Perubahan Kawasan Hutan (***)		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peta hasil verifikasi lokasi dlm rangka pemetaan areal Hutan Kemasyarakatan (Hkm), 15 lembar.</li> <li>- Peta hasil evaluasi pencadangan areal Hutan Tanaman Rakyat, 20 lembar</li> <li>- Peta hasil verifikasi lokasi dalam rangka penyiapan areal pemanfaatan KH (LUPHHK/HA-HT), 100 Lbr</li> <li>- Data base wilayah pengelolaan dan pemanfaatan KH di 33 propinsi</li> <li>- Data sinkronisasi data dan informasi wilayah pengelolaan dan pemanfaatan KH, 33 prov</li> </ul>	Pemanfaatan kawasan hutan sesuai dengan fungsi, peruntukan dan peraturan yang berlaku	36.107.700.000	Dir. Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Kawasan Hutan

FUNGSI/ SUB FUNGSI/ PROGRAM	KEGIATAN (Kode dan Nama)	INDIKATOR KELUARAN (OUTPUT)	HASIL (OUTCOME)	ANGGARAN (Rp.)	PENANGGUNG JAWAB
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Buku penyajian data dan informasi wilayah pengelolaan dan pemanfaatan KH, 4 Judul</li> <li>- Peta pelayanan wilayah pengelolaan dan pemanfaatan KH, 100 lbr.</li> <li>- Peta telaah permohonan penggunaan kawasan hutan, 370 lb</li> <li>- Dokumen penyusunan implementasi dan sertifikasi sistem manajemen mutu berbasis standar internasional ISO 9001-2009, 1 dokumen/1 sertifikat.</li> <li>- Data hasil sosialisasi peraturan dibidang penggunaan, 10 prov</li> <li>- Pengembangan dan pemeliharaan aplikasi SI-PPKH, 1 Aplikasi</li> <li>- Draft peraturan bidang penggunaan kawasan hutan di 1 Judul</li> <li>- Data hasil supervisi perhitungan dan perkembangan baseline PNPB, 40 Lokasi</li> <li>- Peraturan di bidang PNPB, 1 judul</li> <li>- Data hasil penyelesaian lahan kompensasi penggunaan KH, 10 Unit</li> <li>- Sistem money PNPB, 1 Unit</li> <li>- PNPB penggunaan kawasan hutan sebesar Rp 200 Milyar</li> <li>- Monev PNPB di 17 BPKH</li> </ul>	<p>Penggunaan kawasan hutan sesuai dengan fungsi, peruntukan dan peraturan yang berlaku</p>		Dir. Penggunaan Kawasan Hutan
	4034 Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) (*)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Draft SK penetapan wilayah KPHP dan KPHL di 4 propinsi, 4 judul (*)</li> <li>- Data fasilitasi implementasi pembangunan KPH di 33 propinsi, 33 judul (*)</li> <li>- Data monitoring dan evaluasi pembangunan KPH di 15 propinsi, 15 judul (*)</li> </ul>	Adanya kepastian wilayah kelola KPH	10.210.000.000	Dir. Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Kawasan Hutan

FUNGSI/ SUBI FUNGSI/ PROGRAM	KEGIATAN (Kode dan Nama)	INDUKA LOK KELUARAN (OUTPUT)	HASIL (OUTCOME)	ANGGARAN (Rp.)	PENANGGUNG JAWAB
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat dan peta usulan penetapan wilayah KPHP dan KPHL di 4 propinsi, 4 judul</li> <li>- Surat dan peta arahan pencadangan Wilayah KPHP dan KPHL di 4 Propinsi, 4 Judul</li> <li>- Draft final peraturan pembangunan KPH, 2 judul</li> <li>- Data evaluasi wilayah KPH, 5 propinsi</li> <li>- Data penilaian pembentukan kelembagaan KPHP dan KPHL, 20 lks/Judul</li> <li>- Surat dan peta arahan pencadangan Wilayah KPHK di 20 Lokasi, 20 Judul</li> <li>- Surat keputusan dan peta penetapan wilayah KPHK di 20 Lokasi, 20 Judul</li> </ul>			
	4038 Pengembangan Hutan Tanaman dan Hutan Tanaman Rakyat (*)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terwujudnya pemberian ijin HTI/HTR pada areal seluas 1 juta ha sehingga secara kumulatif menjadi 12,4 juta ha pada akhir tahun 2010 (*)</li> <li>- Penanaman kumulatif seluas 6 juta Ha dg penambahan luas tanaman tahun 2010 sebesar 800.000 ha (HTI=600.000 ha dan HTR=200.000) (*)</li> <li>- Tercapainya pemberian sertifikat PHPL kepada 10 unit manajemen hutan tanaman</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kinerja IUPHHK-HT dan intensitas pengelolaan hutan produksi</li> </ul>	27.058.000.000	Dir. Bina Pengembangan Hutan Tanaman
	4049 Pengembangan Hutan Tanaman Industri dan Hutan Tanaman Rakyat (***)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembangunan HTI seluas 21.310 Ha</li> <li>- Pembangunan HTR seluas 31.966 Ha</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terbangunnya HTI seluas 21.310 Ha</li> <li>- Terbangunnya HTR seluas 31.966 Ha</li> </ul>	625.000.000.000 (Anggaran 999)	Ka. Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan

FUNGSI/ SUB FUNGSI/ PROGRAM	KEGIATAN (Kode dan Nama)	INDIKATOR KELUARAN (OUTPUT)	HASIL (OUTCOME)	ANGGARAN (Rp.)	PENANGGUNG JAWAB
	4051 Pengelolaan Hutan Produksi Yang Tidak Dibeabani Hak/Ijin Pemanfaatan (**)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rencana pengelolaan 25 unit KPHP (**)</li> <li>- Usulan pemanfaatan hutan produksi dalam bentuk unit-unit usaha di 26 propinsi (**)</li> <li>- Data dan informasi periodik mengenai pengelolaan pemanfaatan dan penggunaan HP di 8 propinsi</li> <li>- Rencana pengembangan investasi usaha pemanfaatan hutan produksi yang belum dibebani hak di 8 propinsi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Areal HP yang tidak dibebani hak tertata dalam kesatuan pengelolaan dan pemanfaatan usaha</li> <li>- Investasi di bidang pemanfaatan hutan produksi meningkat</li> </ul>	26.410.913.000	Dir. Bina Rencana Pemanfaatan Hutan Produksi
	4052 Restrukturisasi Industri Primer Kehutanan (*)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Evaluasi terhadap 40 unit IPHHK kapasitas &gt; 6.000 m<sup>3</sup>/th (*)</li> <li>- Meningkatkan Produk industri hasil hutan yang bersertifikat SVLK sebesar 10% dari tahun 2009 (*)</li> <li>- Meningkatkan efisiensi penggunaan bahan baku industri (rata-rata) sebesar 60% (*)</li> <li>- Tersedianya data IPHHK di 10 propinsi</li> <li>- Meningkatkan pemenuhan bahan baku dari hutan tanaman sebesar 15% dari tahun 2009(*)</li> <li>- Meningkatkan industri primer hasil hutan sebanyak 20 unit</li> </ul>	Meningkatnya daya saing industri kehutanan	16.458.158.000	Dir. Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan
	4055 Penilaian kelayakan usaha dan evaluasi kegiatan (***)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembahasan hasil money pembangunan HTR dan HTI, 6 kali</li> <li>- Monitoring dan evaluasi, 20 paket</li> <li>- Cek fisik lapangan proposal pinjaman HTR/HTI di 20 lokasi</li> <li>- Penilaian lapangan oleh LPI</li> <li>- Sosialisasi HTR/HTI</li> <li>- Remunerasi pegawai BLU</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedianya data pembangunan HTR dan HTI</li> <li>- Tersedianya data lapang permohonan pinjaman yang akan disalurkan</li> <li>- Peningkatan kinerja</li> </ul>	9.880.000.000	Ka. Pusat Pembayaan Pembangunan Hutan

FUNGSI/ SUB FUNGSI/ PROGRAM	KEGIATAN (Kode dan Nama)	INDIKATOR KELUARAN (OUTPUT)	HASIL (OUTCOME)	ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- pegawai BLU</li> <li>- Terwujudnya peningkatan pemahaman masyarakat tentang HTR/HTI</li> <li>- Tersedianya data penilaian lapangan yang akurat oleh LPI</li> </ul>		
	4057 Penyusunan anggaran, penyaluran dan pengembalian pinjaman (***)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembinaan penyusunan laporan keuangan debitur di 20 lokasi</li> <li>- Penyempurnaan aplikasi sistem akuntansi dan pelaporan keuangan, 1 paket</li> <li>- Pembinaan kinerja BLU Pusat P2H semester dan tahunan, 2 kali</li> <li>- Monitoring pengelolaan dana pinjaman pembangunan HTR/HTI di 20 lokasi</li> <li>- Pelatihan pembukuan dan laporan keuangan debitur HTR/HTI, 5 paket</li> <li>- Konsultansi manajemen keuangan, 1 paket</li> <li>- Notaris 1 paket</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedianya laporan keuangan debitur yang lebih baik</li> <li>- Tersedianya aplikasi sistem akuntansi dan pelaporan keuangan</li> <li>- Meningkatnya kinerja BLU Pusat P2H</li> <li>- Tertib dan tepat sasaran terhadap dana yang telah disalurkan</li> <li>- Tersedianya tenaga keuangan yang terampil dalam mengelola dana pinjaman</li> <li>- Tertib dalam pengelolaan keuangan dan perundangan</li> </ul>	7.109.300.000	Ka. Pusat Pembinaan Pembangunan Hutan
<b>LINGKUNGAN HIDUP</b>					
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM					
Perindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Indikator kinerja utama: Jumlah hotspot diturunkan sampai dampak asap tidak mengganggu negara tetangga dan tingkat kesehatan masyarakat setempat; Penyelesaian kasus perambahan di kawasan konservasi sebesar 20% dari total areal perambahan; Populasi spesies kunci yang terancam				
				442.525.300.000	Dirjen PHKA

FUNGSI/ SUB FUNGSI/ PROGRAM	KEGIATAN (Kode dan Nama)	KELUARAN (OUTPUT)	INDIKATOR	ANGGARAN (Rp)	PENGANGGUNG DAWAJAB
	<p>punah minimal stabil atau bertambah sesuai kemampuan biologis dan habitat yang tersedia; 50% pemegang Ijin Pemanfaatan Pariwisata Alam (IPPA) telah dapat berusaha dengan sehat dan meningkatkan PNB; Kapasitas kelembagaan satuan kerja lingkup PHKA yang terorganisir dengan baik meningkat dengan signifikan dari angka 20% menjadi 40% diakhir tahun 2010; Direhabilitasinya areal konservasi yang rusak seluas 63.000 Ha melalui RHL bekerjasama dengan Ditjen RLPS.</p>				
4014 Pengendalian Kebakaran Hutan (*)		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hot spot menurun sebesar 10% dari tahun 2008 (*)</li> <li>- Partisipasi masyarakat serta kelembagaan pengendalian kebakaran hutan yang kuat di propinsi rawan kebakaran di 10 propinsi (*)</li> <li>- Sistem informasi peringatan dini di 30 DAOPS (*)</li> <li>- Hot spot di Kalimantan, Sumatera dan Sulawesi menurun sebesar 5% dari tahun 2009</li> <li>- Luas areal yang terbakar berkurang sebesar 10% dari tahun 2009</li> <li>- 20% kasus hukum kebakaran hutan terselesaikan</li> <li>- Pembentukan 40 regu MPA di daerah rawan kebakaran hutan</li> <li>- Penetapan 30% lembaga mandiri DAOPS yang berfungsi sebagai Local Fire Center</li> <li>- Status Manggala Agni meningkat 20%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menurunya kejadian kebakaran hutan di 30 propinsi</li> <li>- Efektif dan efisien upaya pemadaman</li> <li>- Tersesalkannya kasus kebakaran hutan</li> <li>- Terbentuknya 200 regu masyarakat peduli api di daerah rawan kebakaran hutan</li> <li>- Ditetapkannya DAOPS sebagai lembaga mandiri dan meningkatnya status Manggala Agni</li> </ul>	100.000.000.000	Dir. Pengendalian Kebakaran Hutan
4015 Pengelolaan Taman Nasional dan Kawasan Konservasi Lainnya (KSA/KPA/TB) dan HL (**)		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terlaksananya pengelolaan 29 TN di luar TN Model yang optimal (**)</li> <li>- Meningkatkan pengelolaan kawasan konservasi lainnya (SM, CA, TB dan TWA) (**)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mantapnya dan dilakukannya batas KPA, KSA, TB dan HL, khususnya di 21 TN model dan yang</li> </ul>	110.000.000.000 10.363.390.000 (hibah LN)	Dir. Konservasi Kawasan



SUB FUNGSI / PROGRAM	KEGIATAN (Kode dan Nama)	INDIKATOR	HASIL (OUTCOME)	ANGGARAN (Rp.)	PENANGGUNG JAWAB
	(KSA/KPA/TB) dan HL (**) - Tersusunnya rencana pengelolaan pada kawasan konservasi (KPA/KSA/TB) dan HL (**) - Terkelolanya kawasan konservasi esensial (**) - Mantap dan diakuinya batas 5 TN Model dan TN yang berstatus global, 1 unit satuan kerja - Tata batas partisipatif KPA/KSA yang berbatasan dengan wilayah pembangunan prioritas di 3 lokasi - Rencana pengelolaan berbasis resort dan mendapat dukungan para pihak secara sinergis di 40 resort - Analisis gap ekologis jaringan kawasan konservasi di 20 unit satuan kerja - Pengembangan sistem monitoring kawasan konservasi dan HL di PHKA, 0,2% - Rencana zonasi/blok pengelolaan berbasis resort dan mendapat dukungan para pihak secara sinergis, 1 judul - Pembentukan dan beroperasinya lembaga pembiayaan kawasan konservasi yang berkelanjutan di Ditjen PHKA atau di BB KSDA/TN, 1 unit - Juknis pengelolaan kawasan secara efektif berbasis resort, 1 judul - Juknis evaluasi keefektifan pengelolaan kawasan berbasis resort, 1 judul - Juknis pengelolaan dan pembinaan habitat, 1 judul - Juknis restorasi habitat, 1 judul - Peningkatan habitat satwa kunci di KPA/KSA di 10 lokasi	- berstatus Cagar Biosfer, World Heritage dan situs RAMSAR - Mantapnya kelengkapan kawasan konservasi termasuk 21 TN model dan pengelolaan berbasis resort - Tersedianya perangkat kebijakan untuk pengelolaan ekosistem esensial (EE) di luar KPA, KSA, HL dan TB - Pengelolaan kawasan EE (Karst, danau, sungai) dilaksanakan terpadu - Habitat satwa migran dan EE terkelola dengan baik - Terkelolanya kawasan konservasi laut yang terletak di pulau-pulau luar terpencil - Terkelolanya KK (mangrove, padang lamun, terumbu karang) laut sebagai penunjang kehidupan			

FUNGSI/ SUB-FUNGSI PROGRAM	KEGIATAN (Kode dan Nama)	INDIKATOR KELUARAN (OUTPUT)	HASIL (OUTCOME)	ANGGARAN (Rp.)	PENANGGUNG JAWAB
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kejian sejarah perambahan, 1 judul</li> <li>- Kolaborasi daerah penyangga, 1 kegiatan</li> <li>- Penunjukkan 2 unit KPA/KSA baru</li> <li>- Identifikasi dan terinventarisasinya ekosistem esensial di 10 propinsi</li> <li>- Sistem informasi di Pusat-UPT di 5 unit satuan kerja</li> <li>- Inventarisasinya habitat migrasi satwa di 6 UPT</li> <li>- Juknis pengelolaan hutan lindung, 1 judul</li> <li>- Studi trust fund, 1 judul</li> </ul>			
	4016 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistemnya (**)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengelolaan spesies terancam punah ex situ dan in situ (**)</li> <li>- Investasi dalam pemanfaatan TSL yang berdampak pada penambahan penerimaan PNBP dan tenaga kerja meningkat sebesar 1% dari tahun 2009 (**)</li> <li>- Penanganan kejadian konflik manusia dengan satwa dilindungi (harimau, gajah, banteng, komodo, beruang, dsb) di 10 lokasi (**)</li> <li>- Infrastruktur penelitian distribusi dan populasi 5 spesies terancam punah</li> <li>- Data base spesies terancam punah dan terbaru, 1 unit</li> <li>- Pembinaan populasi dan habitat di 10 lokasi</li> <li>- Jumlah penangkar baru meningkat 10 unit</li> <li>- Pemanfaatan dan peredaran 700 spesies TSL</li> <li>- Pengelolaan 35 lembaga konservasi prioritas (kebun binatang, taman safari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan populasi dan kelestarian 25 spesies prioritas terancam punah</li> <li>- Peningkatan investasi 5% dan PNBP 1% dalam pemanfaatan dan penangkaran TSL di sekitar kawasan konservasi serta nilai produk TSL</li> <li>- Penyerapan tenaga kerja 3% dibidang pemanfaatan TSL</li> <li>- Peningkatan pengelolaan 35 lembaga konservasi yang terakreditasi serta penyiapan 1 pengusahaan teman baru</li> <li>- Peningkatan dukungan dan</li> </ul>	30.000.000.000	Dir. Konservasi Keanekaragaman Hayati

FUNSI/ SUB FUNGSI / PROGRAM	KEGIATAN (Kode dan Nama)	INDIKATOR		ANGGARAN (Rp.)	PENANGGUNG JAWAB
		KELUARAN (OUTPUT)	HASIL (OUTCOME)		
		<p>dan taman satwa di 7 unit satuan kerja</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Produk hasil penangkaran meningkat 0,2%</li> <li>- Penyerapan tenaga kerja langsung sebanyak 150 orang</li> <li>- Operasionalisasi perburuan satwa buru pada pengusahaan taman buru, 1 unit</li> <li>- Lembaga konservasi terakreditasi/tersertifikasi meningkat, 4 unit</li> <li>- Infrastruktur PKG Terbarui, 1 unit PKG</li> <li>- Pengelolaan lembaga konservasi non komersial berbasis kemitraan, 3 unit</li> <li>- Koordinasi dan sosialisasi kesepakatan internasional dibidang Kehati, 20 kali</li> <li>- Partisipasi aktif Ditjen PHKA dalam agenda internasional bidang kehati, 5 kali</li> <li>- Infrastruktur pengelolaan populasi spesies terancam punah tersedia dan terbarui, 3 judul</li> </ul>	<p>pelaksanaan kesepakatan internasional dibidang konservasi kehati</p>		
	4017 Pembangunan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam (**)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah kunjungan wisata alam meningkat sebesar 12% dari tahun 2009 (**)</li> <li>- PNB di bidang Jasa lingkungan dan wisata alam meningkat sebesar 20% dari tahun 2009 (**)</li> <li>- Pembentukan 60 unit kelembagaan usaha ekonomi masyarakat di sekitar kawasan konservasi melalui Desa Model Konservasi (MDK) (**)</li> <li>- Pembentukan kader konservasi di 77 UPT PHKA sebanyak 750 orang (**)</li> <li>- Juknis inventarisasi potensi, pengaturan pemanfaatan, penilaian kinerja/monev</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan PNB dari pemanfaatan wisata alam</li> <li>- Adanya PNB jasa lingkungan (air, karbon dan panas bumi)</li> <li>- Penyerapan tenaga kerja pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam</li> <li>- Peningkatan kesadaran dan</li> </ul>	90.000.000.000	Dir. Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam

SUB FUNGSI / PROGRAM	KEGIATAN (Kode dan Nama)	KELUARAN (OUTPUT)	HASIL (OUTCOME)	ANGGARAN (Rp.)	PENANGGUNG JAWAB
		<p>di bidang jasa lingkungan hutan dan wisata alam, 10 judul</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- SKB Menhut dan Mendiknas tentang Hari Konservasi Alam, 1 dokumen</li> <li>- Penyerapan tenaga kerja sebanyak 200 orang</li> <li>- Tersusunnya data base potensi JL, WA, BCA dan PM, KPA/KSA di 15 unit satuan kerja</li> <li>- Meningkatnya investasi kegiatan pemanfaatan pariwisata alam sebesar 2% dari tahun 2009</li> <li>- Rencana pengembangan JLWA yang dapat mendukung pembangunan wilayah dan ekonomi masyarakat setempat, 1 judul</li> <li>- Penyebaran bahan promosi JL, WA, BCA dan PM di 77 unit satuan kerja</li> <li>- Inventarisasi ADC-ADTWA di 12 unit KPA</li> <li>- Monitoring kegiatan ijin perusahaan pariwisata alam di 7 lokasi IPPA</li> </ul>	<p>participasi masyarakat tentang KSDAH dan Ekosistemnya</p>		
4018 Perencanaan dan Pengendalian Pengelolaan Kawasan Konservasi		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Renstra 2010 – 2014 Ditjen PHKA dan Renstra UPT, 84 dokumen</li> <li>- Renja Tahun 2011 lingkup PHKA Pusat dan Daerah, 84 dokumen</li> <li>- Standar biaya kegiatan tahun 2011, 1 dokumen</li> <li>- Rencana Pengelolaan Kawasan Pelestarian Alam (KPA), Kawasan Suaka Alam (KSA) dan HL, 50 unit</li> <li>- Koordinasi pemantapan program dan kegiatan pembangunan bidang PHKA 2011, 6 kali</li> </ul>	<p>Meningkatnya jumlah rencana jangka panjang pengelolaan kawasan konservasi</p> <p>Tersedianya dokumen perencanaan kegiatan dan anggaran bidang PHKA</p> <p>Terkendalinya pelaksanaan program dan pembangunan PHKA yang tertib</p>	22.525.300.000	Sek. Ditjen PHKA

SUB FUNGSI / PROGRAM	KEGIATAN (Kode dan Nama)	INDIKATOR		ANGGARAN (Rp.)	PENANGGUNG JAWAB
		KELUARAN (OUTPUT)	HASIL (OUTCOME)		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Asistensi penyusunan program, kegiatan dan anggaran bidang PHKA tahun 2011, 4 kali</li> <li>- Monitoring pelaksanaan program dan kegiatan bidang PHKA, 4 kali</li> <li>- Evaluasi pelaksanaan Renja 2010 dan Renstra 2010 – 2014, 1 kali</li> <li>- Pembinaan UPT oleh SPI, 5 kali</li> <li>- Pembinaan Administrasi Keuangan, 5 kali</li> </ul>	administrasi		
	4054 Pengelolaan Taman Nasional Model (*)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengelolaan Taman Nasional berbasis resort untuk 20 TN di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Bali, NTB, NTT, Sulawesi dan Papua (*)</li> <li>- Pengembangan pengelolaan TN dalam rangka Dept Nature Swap (DNS) (*)</li> <li>- Sistem monitoring kawasan konservasi dan HL (*)</li> <li>- Sistem monitoring dan evaluasi perambahan kawasan berbasis GIS/Remote Sensing di 10 TN Prioritas (*)</li> <li>- Penataan batas, zonasi dan review RPTN Model di 4 TN</li> <li>- Studi trust fund di 5 TN</li> <li>- Penerimaan PNPB wisata alam di 10 TN</li> <li>- Restorasi dan rehabilitasi di 10 TN</li> <li>- Pengembangan daerah penyangga di 10 TN</li> <li>- Pembinaan habitat flag spesies di 10 TN</li> <li>- Peningkatan Sarpras pengelolaan dan pemanfaatan di 21 TN</li> <li>- Peningkatan kualitas SDM pengelola</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beroperasinya TN Model yang dikelola dengan berbasis resort berjalan lebih efektif.</li> <li>- Peningkatan pendapatan masyarakat disekitar kawasan TN melalui program MDK</li> <li>- Penataan batas, zonasi dan review RPTN di 21 TN Model</li> <li>- Publikasi dan pengelolaan sistem informasi konservasi alam di TN Model berjalan optimal</li> <li>- Teriaksana kolaboratif management yang mendukung pengelolaan TN.</li> </ul>	90.000.000.000 3.588.910.000 (hibah LN)	Dir. Konservasi Kawasan

SUB FUNGSI / PROGRAM	KEJAJARAN (Kode dan Nama)	KELUARAN (OUTPUT)	HASIL (OUTCOME)	ANGGARAN (Rp.)	PENANGGUNG JAWAB
Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam		Taman Nasional melalui (Pelatihan, Penyegaran, BinteK dst) sebanyak 600 orang - Pengelolaan kolaboratif di 5 TN		747.792.600.000	Dirjen RLPs
Indikator kinerja utama: Penyusunan rencana pengelolaan DAS Terpadu untuk 18 unit DAS prioritas, pengembangan sumber benih pada 6 region, fasilitasi penanaman pohon 320 juta batang, rehabilitasi hutan dan lahan seluas 100.000 ha, penetapan area kerja hutan kemasyarakatan (HKM) seluas 420.000 ha dan fasilitasi teknik konservasi tanah dan air sebanyak 4.500 unit.					
0079 Pembangunan Gedung		2 unit gedung kantor UPT, renovasi 1 unit rumah dinas Kepala UPT, dan 2 unit rumah dinas pejabat eselon IV UPT	Tersedianya gedung kantor dan rumah dinas pejabat UPT	1.440.000.000	Sek. Ditjen RLPs
0080 Pengadaan Tanah		Tanah kavling untuk pembangunan 1 unit kantor UPT dan 2 unit rumah pejabat eselon IV UPT, 3 persil	Tersedianya tanah untuk gedung kantor UPT dan rumah dinas	1.000.000.000	Sek. Ditjen RLPs
0081 Pengadaan Kendaraan		2 unit kendaraan roda-2 dan 9 unit kendaraan roda-4	Lancarnya pelaksanaan administrasi perkantoran UPT baru	3.560.000.000	Sek. Ditjen RLPs
4019 Rehabilitasi Lahan Kritis DAS Prioritas (*)		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penanaman dalam rangka rehabilitasi hutan dan lahan di DAS Prioritas I seluas 100.000 Ha (*)</li> <li>- Sosialisasi dan desiminasi pedoman rencana RHL DAS/Sub DAS Prioritas (rencana teknik RHL DAS, rencana tahunan pengelolaan dan rencana RHL desa) di 36 BPDAS</li> <li>- Pola umum, kriteria dan standar rehabilitasi dan reklamasi hutan, 1 judul</li> <li>- Pedoman rencana RHL DAS/Sub DAS prioritas (rencana teknik RHL DAS, rencana pengelolaan dan rencana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyiapan kapasitas bentuk dan sosialisasi desiminasi pedoman perencanaan RHL</li> <li>- Tersedianya pola umum, kriteria dan standar rehabilitasi dan reklamasi hutan</li> <li>- Sosialisasi pedoman rencana RHL DAS/Sub DAS prioritas (rencana teknik RHL DAS,</li> </ul>	500.000.000.000	Dir. Bina Rehabilitasi Hutan dan Lahan

FUNGSI/ SUB FUNGSI / PROGRAM	KEGIATAN (Kode dan Nama)	INDIKATOR  KELUARAN (OUTPUT)	HASIL (OUTCOME)	ANGGARAN (Rp.)	PENANGGUNG JAWAB
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- tahanan dan rencana RHL Desa) di 33 lokasi</li> <li>- Rencana RHL DAS/Sub DAS Prioritas (rencana teknis RHL DAS) di 36 BPDAS</li> <li>- Rencana pengelolaan dan rencana tahanan dan rencana RHL Desa di 36 BPDAS</li> <li>- BinteK dan monitoring penyusunan rencana RHL DAS/Sub DAS prioritas di 33 propinsi/kab/kota</li> <li>- Fasilitasi rehabilitasi kawasan hutan (reboisasi) seluas 370.400 Ha</li> <li>- Fasilitasi penghijauan dan pembuatan hutan rakyat, 1 paket</li> <li>- Fasilitasi rehabilitasi hutan mangrove (dalam dan luar kawasan), 1 paket</li> <li>- Fasilitasi pemb.DAM pengendali, 1 paket</li> <li>- Fasilitasi pemb. DAM penahan, 1 paket</li> <li>- Fasilitasi pemb.Gully plug, 1 paket</li> <li>- Fasilitasi pembangunan embung air, 1 paket</li> <li>- Fasilitasi pembangunan sumur resapan, 1 paket</li> <li>- Monitoring dan evaluasi rehabilitasi dan reklamasi hutan di 33 propinsi</li> <li>- Pelatihan RHL/pendampingan di 36 BPDAS</li> <li>- Pokja Gerhan di 33 propinsi</li> <li>- Pokja revitalisasi PLG di 1 propinsi</li> <li>- Bimbingan teknis RHL di 33 propinsi</li> <li>- Fasilitasi forum reklamasi hutan di 4 regional</li> <li>- Kelompok kerja mangrove daerah di 33 propinsi</li> <li>- RHL model di 36 BPDAS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- rencana pengelolaan dan rencana tahanan dan rencana RHL Desa)</li> <li>- Tersusunnya rencana RHL DAS/Sub DAS Prioritas (rencana teknis RHL DAS)</li> <li>- Terfasilitasinya penyusunan rencana pengelolaan dan rencana tahanan dan rencana RHL Desa</li> <li>- Terfasilitasinya penyusunan rencana RHL DAS/Sub DAS prioritas di setiap propinsi dan kab/kota</li> <li>- Terlaksananya rehabilitasi pada kawasan hutan pada DAS Prioritas</li> <li>- Terlaksananya penghijauan dan hutan rakyat pada DAS Prioritas</li> <li>- Terlaksananya rehabilitasi hutan Mangrove pada DAS Prioritas</li> <li>- Terlaksananya pembuatan bangunan konservasi tanah pada DAS Prioritas</li> <li>- Terselenggaranya</li> </ul>		

FUNGSI/ SUB FUNGSI/ PROGRAM	KEGIATAN (Kode dan Nama)	INDIKATOR KELUARAN (OUTPUT)	HASIL (Outcome)	ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fasilitasi RHL desa di 33 propinsi</li> <li>- Bimbingan teknis penyusunan rencana dan pelaksanaan RHL di 33 propinsi</li> <li>- Fasilitasi reklamasi hutan pada lahan hutan di 6 perusahaan</li> <li>- Bimbingan teknis rehabilitasi hutan mangrove di 33 propinsi</li> <li>- Gerakan penanaman masal tingkat nasional, 1 kali</li> <li>- Gerakan penanaman masal tingkat propinsi, kab/kota di 33 propinsi</li> <li>- Data potensi RHL, kemampuan lahan, kesesuaian, lahan, 1 judul</li> </ul>	<p>money rehabilitasi dan reklamasi hutan pada DAS Prioritas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terlaksananya supervisi evaluasi kegiatan rehabilitasi dan reklamasi hutan pada DAS Prioritas termasuk hutan mangrove</li> <li>- Terwujudnya penguatan kelembagaan rehabilitasi dan reklamasi hutan melalui pelatihan, pendampingan, sosialisasi bimbingan teknis</li> <li>- Terfasilitasinya rehabilitasi dan reklamasi hutan termasuk mangrove di propinsi dan kab/kota</li> <li>- Terfasilitasinya gerakan penanaman masal dalam rangka hari menanam pohon Indonesia</li> <li>- Terbangunnya data dasar data potensi hutan, kemampuan lahan, kesesuaian</li> </ul>		



FUNGSI/ SUB FUNGSI/ PROGRAM	KEGIATAN (Kode dan Nama)	KELUARAN (OUTPUT)	INDIKATOR	HASIL (OUTCOME)	ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
	4020 Perencanaan dan Pembinaan Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial (**)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rencana pengembangan rehabilitasi lahan dan perhutanan sosial, 1 kegiatan (**)</li> <li>- Rencana-rencana kehutanan yang menjadi acuan dalam implementasi kegiatan pembangunan kehutanan dan sektor lain</li> <li>- SDM kehutanan yang berkualitas, kompeten serta terdistribusi secara proporsional</li> <li>- Dana, sarana prasarana yang proporsional untuk mendukung pembangunan kehutanan</li> <li>- Peran aktif Indonesia dalam tataran global bidang kehutanan dan SDAH serta kerjasama internasional yang berkontribusi positif pada pembangunan kehutanan nasional</li> <li>- Penegakan hukum dan penanggulangan kejahatan kehutanan secara efektif</li> <li>- Desentralisasi pembangunan kehutanan yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelestarian hutan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersusunnya Renstra 2010-2014 Direktorat Jenderal RLPS</li> <li>- Tersusunnya RKAKL Ditjen RLPS tahun 2010 pusat dan 45 UPT</li> <li>- Terlaksananya evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan dan anggaran Ditjen RLPS dan 45 UPT</li> <li>- Terselenggaranya pembinaan aparatur dan kelembagaan Ditjen RLPS dan 45 UPT</li> <li>- Terselenggaranya pembinaan administrasi keuangan dan tindak lanjut LHP di pusat dan 45 UPT</li> <li>- Terlaksananya inventarisasi barang milik negara di pusat dan UOT melalui SABMN</li> </ul>	21.000.000.000	Dir. Bina Perhutanan Sosial	
	4039 Pengelolaan DAS (*)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kebijakan pengelolaan DAS yang mempunyai kekuatan hukum : (*)</li> <li>- Undang-undang, 1 dokumen</li> <li>- PP/Perpres/Permenhut, 1 dokumen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedianya kebijakan Pengelolaan DAS yang mempunyai kekuatan hukum</li> </ul>	135.000.000.000	Dir. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai	

SUB FUNGSI PROGRAM	KEJALAN (Kode dan Nama)	KELUARAN (OUTPUT)	HASIL (OUTCOME)	ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pedoman, 1 dokumen</li> <li>- Perencanaan pengelolaan DAS terpadu di 18 unit DAS (*)</li> <li>- Dukungan stakeholder di 10 propinsi (*)</li> <li>- Pembangunan baseline data DAS di 18 unit DAS (*)</li> <li>- 1 unit model PDAS Terpadu (*)</li> <li>- Pemantauan penyelenggaraan PDAS dan Kinerja DAS di 36 BPDAS (*)</li> <li>- Pembentukan dan berfungsinya forum DAS :</li> <li>- 1 unit forum DAS Tingkat Nasional</li> <li>- 10 unit forum DAS Tingkat Propinsi</li> <li>- 3 unit forum DAS Tingkat Kabupaten/kota</li> <li>- Data lahan kritis di setiap BPDAS, 36 buku</li> <li>- Atlas lahan kritis nasional terbaru, 1 buku</li> <li>- 1 unit model DAS mikro di setiap BPDAS</li> <li>- Pengelolaan DAS dan kinerja DAS, 36 laporan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersusunnya perencanaan pengelolaan DAS yang mantap</li> <li>- Meningkatnya dukungan stakeholders</li> <li>- Pembangunan base line data DAS</li> <li>- Tersedianya model PDAS Terpadu</li> <li>- Terpantaunya penyelenggaraan PDAS dan kinerja DAS</li> </ul>		
4040 Perencanaan, Pembangunan dan Kelembagaan Hutan Rakyat (**)		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembangunan hutan rakyat di DAS Prioritas seluas 50.000 Ha (**)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terbangunnya hutan rakyat di DAS prioritas</li> </ul>	25.000.000.000	Dir. Bina Rehabilitasi Hutan dan Lahan
4041 Pengembangan Pemanfaatan HHBK (**)		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembentukan dan berfungsinya 2 unit HHBK solution centre (**)</li> <li>- Pembentukan dan berfungsinya 4 unit sentra HHBK</li> <li>- Penetapan 10 jenis unggulan lokal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terbentuk dan berfungsinya HHBK solution center</li> <li>- Terbentuk dan berfungsinya sentra</li> </ul>	18.000.000.000	Dir. Bina Perhutanan Sosial

SUB FUNGSI/ PROGRAM	KEGIATAN (Kode dan Nama)	KELUARAN (OUTPUT)	HASIL (OUTCOME)	ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fasilitasi produksi HHBK sebanyak 10 jenis</li> <li>- Fasilitas pengembangan ketahanan pangan di 12 propinsi</li> <li>- Areal hutan seluas 8.000 Ha dalam rangka mendukung penanggulangan kerawanan pangan</li> <li>- Areal seluas 75.000 Ha di dalam dan sekitar kawasan hutan dalam mendukung ketahanan pangan sektor kehutanan</li> </ul>	<p>HHBK</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedianya kelompok usaha HHBK</li> </ul> <p>Peran hutan dalam mendukung cadangan pangan</p>		
4042 Perencanaan dan Pengembangan Hutan Kemasayarakatan (*)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penetapan luas areal kerja HKm seluas 420.000 Ha (*)</li> <li>- Fasilitasi 4 kelompok IUPHKM baru (*)</li> <li>- Fasilitasi 10 unit kemitraan HKm (*)</li> <li>- Fasilitasi ketahanan pangan sektor kehutanan di 4 propinsi (*)</li> <li>- Penguatan kelembagaan pemerintahan Kab/Kota dan kelompok dalam HKm di 33 propinsi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fasilitasi 8 lembaga hak pengelolaan hutan desa</li> <li>- Penetapan areal kerja hutan desa seluas 400.000 Ha</li> <li>- Fasilitasi 50 unit kemitraan hutan desa</li> <li>- Penguatan kelembagaan pemerintah kab/kota dan kelompok dalam hutan desa di 33 propinsi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedianya areal kerja HKm</li> <li>- Adanya lembaga usaha HKm</li> <li>- Adanya mitra kerja HKm</li> </ul> <p>Desa memiliki hak pengelolaan hutan</p>	18.792.600.000	Dir. Bina Perhutanan Sosial
4059 Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 14 unit usaha perbenihan tanaman hutan</li> <li>- Fasilitasi usaha perbenihan di 6 ploregion</li> <li>- Pembinaan penguatan kelembagaan tingkat kab/kota di 6 propinsi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedianya regulasi perbenihan tanaman hutan</li> <li>- Terselenggaranya</li> </ul>	24.000.000.000	Dir. Perbenihan Tanaman Hutan	

FUNGSI/ SUB FUNGSI/ PROGRAM	KEGIATAN (Kode dan Nama)	INDIKATOR KELUARAN (OUTPUT)	HASIL (OUTCOME)	ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
Pengembangan Kapasitas Pengelolaan SDA dan LH	Indikator kinerja utama: Terbentuknya 80 unit model penyuluhan di kab/kota yang sudah terbentuk Badan Pelaksana P3K, terbentuknya 26 kelompok masyarakat produktif mandiri (KUP, SPK/PPKSM/Forum Desa), terbentuknya 20 unit model penyuluhan responsif jender di kab/kota yang sudah terbentuk Badan Pelaksana P3K dan prakondisi Pembentukan Organisasi BKSDA di Provinsi (Kep Riau, Bangka Belitung, Banten, Sulawesi Barat, Gorontalo, dan Maluku Utara) di 6 UPT 0021 Pembinaan koordinasi / pelaksanaan money dan pelaporan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Forum perbenihan tanaman hutan tingkat nasional sebanyak 1 unit</li> <li>- Pembangunan kebun benih/sumber benih seluas 1.000 Ha</li> <li>- Pembangunan areal sumberdaya genetik di 3 provinsi</li> <li>- Pengelolaan sumber benih sasaran nasional seluas 4.500 Ha</li> <li>- Pembinaan sertifikasi mutu benih dan mutu benih dan mutu tanaman di 6 bioregion</li> <li>- Review zorasi benih di 6 bioregion</li> <li>- Pembinaan perencanaan perbenihan tanaman hutan di 6 bioregion</li> <li>- BinteK perencanaan tahun yang akan datang di 6 bioregion</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>fasilitasi usaha perbenihan tanaman hutan</li> <li>- Tersedianya kebun benih/sumber benih seluas 1000 ha</li> <li>- Terbangunnya areal sumberdaya genetik nasional dari potensi sumberdaya genetik (TUL) di 3 provinsi</li> <li>- Terkelolanya sumber benih sasaran nasional</li> <li>- Terfasilitasinya kegiatan sertifikasi mutu benih dan mutu bibit tanaman hutan</li> <li>- Tersusunnya zonasi benih tanaman hutan dan perencanaan perbenihan tanaman hutan</li> </ul>	87.486.700.000	Sekjen Dirjen PHKA
	Penilaian lomba PKA di 33 provinsi		Terselenggaranya kegiatan penyuluhan keharuan sesuai target dan sasaran, serta meningkatnya motivasi	825.000.000	Ka. Pusat Bina Penyuluhan Kehutanan

FUNGSI/ SUB-FUNGSI/ PROGRAM	KEGIATAN (Kode dan Nama)	INDIKATOR KELUARAN (OUTPUT)	HASIL (OUTCOME)	ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
	0024 Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarpras	- Kendaraan bermotor roda-2 sebanyak 75 unit bagi penyuluh kehutanan yang berada di Bakor P3K dan bapel P3K	Penyuluhan Kehutanan yang berada di Bakor P3K dan Bapel P3K dapat melaksanakan tugas operasional lapangan dengan baik	1.275.000.000	Ka. Pusat Bina Penyuluhan Kehutanan
	0049 Penyelenggaraan/Pengembangan SDM	- Peningkatan kapasitas penyuluhan dan pengelola penyuluhan kehutanan di propinsi - Pelatihan penjenjangan penyuluh kehutanan, 3 angkatan	Tersedianya SDM penyuluhan kehutanan yang kompeten dan profesional	876.750.000	Ka. Pusat Bina Penyuluhan Kehutanan
	0104 Kerjasama antar instansi pemerintah/swasta/ lembaga	- 3 dokumen MOU kerjasama dan kemitraan penyuluhan kehutanan - Fasilitas pengembangan HPHA - Fasilitas pengembangan IPKINDO - Implementasi 1 jenis inovasi teknologi aplikatif (3 lembaga : Litbang, Diklat, Pusbinluluh)	- Terselenggaranya kerjasama dan kemitraan penyuluhan kehutanan dengan para pihak - Terimplementasinya inovasi teknologi kepada masyarakat atas kerjasama lembaga penelitian, diklat dan pusbinluluh	561.304.000	Ka. Pusat Bina Penyuluhan Kehutanan
	4022 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan dan Ekosistemnya	- Terbentuknya 10 kelompok masyarakat produktif mandiri (KUP, SPKP/PPKSM/ Forum Desa) - Terbentuknya 14 unit model penyuluhan responsif jender di kab/kota yang sudah	- Tercapatnya kepastian lokasi model penyuluhan kehutanan terpadu (demplot)	7.772.640.000	Ka. Pusat Bina Penyuluhan Kehutanan

SUB FUNGSI PROGRAM	KEGIATAN (Kode dan Nama)	KELUARAN (OUTPUT)	HASIL (OUTCOME)	ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembentukan Badan Pelaksana P3K</li> <li>- Peningkatan kapasitas pengelola KUP/SPKP dan PK swadaya masyarakat</li> <li>- Kampanye Indonesia Menanam</li> <li>- Pengembangan percontohan pemberdayaan masyarakat</li> <li>- Pemberdayaan masyarakat sasaran di 33 provinsi (pendampingan KMPM, 66 unit KUP, 33 unit SPKP, peningkatan ketrampilan masyarakat, 33 unit KMDM, pengembangan percontohan pemberdayaan masyarakat, dll)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terbangunnya model penyuluhan kehutanan dan kelompok masyarakat produktif mandiri yang beranggotakan wanita tani</li> <li>- Meningkatnya kelompok masyarakat mandiri dan meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan serta kesadaran masyarakat</li> </ul>	17.689.306.000	
4023 Pembinaan dan Penyelenggaraan Penyuluhan Kehutanan (***)		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyuluhan dan penyebaran informasi (majalah kenari, pengembangan materi di radio, dan kampanye kebijakan pembangunan kehutanan), 3 kegiatan</li> <li>- Pengembangan SIM melalui penyempurnaan program aplikasi</li> <li>- Temu karya/sarasehan pemenang lomba PKA dan kontes pohon</li> <li>- Temu wicara gubernur/bupati/walikota penggerak pembangunan kehutanan dengan Menteri Kehutanan</li> <li>- Bantuan mengikuti seminar/lokakarya dll</li> <li>- Pengembangan kelembagaan :                         <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengelolaan administrasi ketenagaan penyuluh kehutanan</li> <li>- Penyusunan pedoman/peraturan penyuluhan</li> <li>- Revitalisasi penyuluhan kehutanan</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- TerserbiLasnya informasi pembangunan kehutanan melalui majalah kenari, pengembangan materi di radio, dan kampanye kebijakan pembangunan kehutanan</li> <li>- Tersedianya SIM penyuluhan kehutanan</li> <li>- Meningkatnya kualitas SDM penyuluhan kehutanan dan sinergisnya hubungan antara pusat dan</li> </ul>	17.689.306.000	Ka. Pusat Bina Penyuluhan Kehutanan

SUB FUNGSI / PROGRAM	KEGIATAN (Kode dan Nama)	INDIKATOR KELUARAN (OUTPUT)	HASIL (OUTCOME)	ANGGARAN (Rp)	PEMANGGUNG JAWAB
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Operasional penyuluhan kehutanan di 33 provinsi</li> <li>- Updating data penyuluh kehutanan</li> <li>- Penyempurnaan SK Menpan No. 130/2002 ttg batas usia pensiun kehutanan terpadu sebanyak 33 unit</li> <li>- Terselenggaranya kegiatan penyuluhan kehutanan di 33 provinsi (BOP, administrasi umum, peningkatan kapasitas SDM, HPHA, pengembangan materi, monav, GBPP, KIM dll)</li> </ul>	<p>daerah dalam pencapaian visi dan misi pembangunan kehutanan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan pelayanan penyuluhan kehutanan, kualitas pengeloa penyuluhan, serta peningkatan prestasi kerja penyuluh dilapangan sehingga diharapkan proses pembangunan kehutanan berjalan dengan baik</li> <li>- Meningkatkan pelayanan penyuluhan kehutanan, kualitas SDM penyuluh kehutanan, serta kegiatan penyuluhan kehutanan terselenggara sesuai target dan sasaran sehingga diharapkan proses pembangunan kehutanan tercapai secara optimal</li> </ul>	58.486.700.000 <i>14.715.800.000 (hibah LN)</i>	Sek. Ditjen PHKA
4024 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDAH dan Ekosistemnya (***)	Peraturan pemerintah/ peraturan menteri kehutanan/Keputusan Dirjen dibidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, 1 judul	Sosialisasi peraturan perundangan, 10 kali	Tersedia dan terbaharunya peraturan pendukung pengelolaan kawasan konservasi Kualitas SDM pengelolaan		

SUB-FUNGSI / PROGRAM	KEGIATAN (Kode dan Nama)	KELUARAN (OUTPUT)	HASIL (OUTPUT/COMB)	ANGGARAN (Rp)	PEVANGGUNG DAHAB
<p>PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP LAINNYA</p> <p>Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup</p>	<p>Indikator kinerja utama: Pembuatan rencana makro kawasan sebanyak 1 judul, dan pembuatan informasi produk domestik regional bruto (PDRB) hijau pada 17 propinsi.</p> <p>4025 Pengembangan Rencana dan Statistik Kehutanan (***)</p>	<p>BKSDA di Provinsi (Kep Riau, Bangka Belitung, Banten, Sulawesi Barat, Gorontalo, dan Maluku Utara) di 6 UPT Pembentukan Organisasi setingkat Pos (eselon V), di Kep. Kapoposang, Kep. Pieh, P. Marsegu, 3 pos Peningkatan Sarana prasarana fisik pengelolaan (kantor seksi, Resort dan pos jaga dst), 45 unit - Peningkatan kualitas SDM pejabat fungsional di 77 UPT</p>	<p>meningkat Terlaksananya usulan pembentukan organisasi KSDA di provinsi baru</p>	<p>110.146.800.000</p> <p>43.255.345.000</p>	<p>Dirjen Planologi Kehutanan</p> <p>Dir. Perencanaan Kawasan hutan</p>
<p>PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP LAINNYA</p> <p>Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup</p>	<p>Indikator kinerja utama: Pembuatan rencana makro kawasan sebanyak 1 judul, dan pembuatan informasi produk domestik regional bruto (PDRB) hijau pada 17 propinsi.</p> <p>4025 Pengembangan Rencana dan Statistik Kehutanan (***)</p>	<p>BKSDA di Provinsi (Kep Riau, Bangka Belitung, Banten, Sulawesi Barat, Gorontalo, dan Maluku Utara) di 6 UPT Pembentukan Organisasi setingkat Pos (eselon V), di Kep. Kapoposang, Kep. Pieh, P. Marsegu, 3 pos Peningkatan Sarana prasarana fisik pengelolaan (kantor seksi, Resort dan pos jaga dst), 45 unit - Peningkatan kualitas SDM pejabat fungsional di 77 UPT</p>	<p>meningkat Terlaksananya usulan pembentukan organisasi KSDA di provinsi baru</p>	<p>110.146.800.000</p> <p>43.255.345.000</p>	<p>Dirjen Planologi Kehutanan</p> <p>Dir. Perencanaan Kawasan hutan</p>



FUNGSI/ SUB FUNGSI / PROGRAM	KEGIATAN (Kode dan Nama)	INDIKATOR		ANGGARAN (Rp.)	PENANGGUNG JAWAB
		KELUARAN (OUTPUT)	HASIL (OUTCOME)		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jaringan komunikasi data kehutanan, 1 LAN</li> <li>- Aplikasi Data Warehouse Kehutanan, 1 Aplikasi</li> <li>- Data implementasi kebijakan pemerintah di bidang teknologi informasi (FOSS), 1 judul</li> <li>- Pedoman sistem informasi kehutanan, 1 judul</li> </ul>			
	4026 Inventarisasi Hutan dan Pengembangan Informasi SDA dan LH (**)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peta dasar tematik kehutanan secara digital skala 1:100.000 sebanyak 750 lembar (**)</li> <li>- Data hasil pemutakhiran data informasi SDH, 6 judul (**)</li> <li>- Data inventarisasi SDH dan sosial budaya di 12 lokasi, 12 buku (**)</li> <li>- Buku NSDH daerah/Propinsi dan Nasional, 1 buku (**)</li> <li>- Data SDH secara spasial dan non spasial, 2 judul (**)</li> <li>- Model penghitungan karbon tegakan hutan di 2 lokasi, 2 judul (**)</li> <li>- Basis data citra seluruh Indonesia, 2 judul (**)</li> <li>- Hasil bimbingan inventarisasi hutan di seluruh Indonesia, 17 BPKH</li> <li>- Bahan rencana produksi kayu nasional, 1 judul</li> <li>- Petunjuk teknis inventarisasi sosial budaya, 1 judul</li> <li>- Aplikasi NSDH berbasis internet, 1 aplikasi</li> <li>- Hasil bimbingan teknis pemetaan SDH, 33 prov</li> </ul>	Tersedianya data dan informasi SDH spasial dan non spasial seluruh Indonesia yang akurat dan berkualitas	46.777.013.000	Dir. Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan

FUNGSI/ SUB FUNGSI / PROGRAM	KEGIATAN (Kode dan Nama)	INDIKATOR		ANGGARAN (Rp.)	PENANGGUNG JAWAB
		KELUARAN (OUTPUT)	HASIL (OUTCOME)		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Petunjuk Teknis penyajian peta kehutanan, 1 judul</li> <li>- Informasi spasial tematik kehutanan, 2 judul</li> <li>- Citra resolusi sangat tinggi pada lokasi KPHP/L, 25 Lokasi</li> <li>- Data dan Informasi Quick account potensi SDH Indonesia, 2 judul</li> <li>- Hasil pengembangan dan pengujian pedoman penafsiran citra optis, 1 judul</li> <li>- Data dan informasi penutupan lahan, 1 tema</li> <li>- Pedoman panafsiran citra radar (1 judul)</li> <li>- Struktur basis data citra tingkat unit pengelolaan, 1 tema</li> <li>- Data unit pengelolaan yang up to date pada Web Dephut, 35 lokasi</li> <li>- Hasil telaahan penutupan lahan terhadap area/calon lokasi permohonan IUPHHK-HA/HT dengan resolusi sedang, 50 lokasi</li> <li>- Jaringan data spasial, 1 jaringan</li> <li>- Hasil bimbingan teknis pengelolaan jaringan data spasial kehutanan, 17 BPKH</li> <li>- Hasil pengelolaan basis data spasial kehutanan, 1 tema</li> <li>- Hasil integrasi data spasial kehutanan pusat dan daerah, 8 prov</li> <li>- Hasil sinkronisasi pemanfaatan basis data spasial untuk pembangunan Kehutanan, 1 judul</li> </ul>			
	4027 Perencanaan dan Pembinaan	- Dokumen penyempurnaan sistem administrasi kepegawaian dan sistem kepegawaian dan mutasi (career plan)	Terwujudnya kelembagaan mantap yang dalam	20.114.442.000	Sek. Ditjen Planologi Kehutanan

SUB FUNGSI / PROGRAM	INDUKSI (Kode dan Nama)	KELUARAN (OUTPUT)	HASIL (OUTCOME)	ANGGARAN (Rp.)	PENANGGUNG JAWAB
	Prakondisi Pengelolaan Hutan (***)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- pegawai, 1 dokumen</li> <li>- Dokumen pengelolaan dan penyegaran administrasi kepegawaian/kepengurusan umum, 1 dokumen</li> <li>- Laporan hasil konsultasi masalah kepegawaian dengan instansi/lembaga terkait (kantor regional BKN), 1 Judul</li> <li>- Laporan penilaian angka kredit jabatan fungsional sebanyak 350 orang, 1 judul</li> <li>- Dokumen pengelolaan data pengembangan pegawai lingkup Ditjen Planhut, 1 dokumen</li> <li>- Dokumen hasil pendidikan program D1 Tenaga Teknis Pengukuran dan Peretaan sebanyak 50 orang, 1 judul</li> <li>- Dokumen penyempurnaan prosedur kerja, 1 judul</li> <li>- LAKIP Ditjen Planologi kehutanan, Eselon II, UPT lingkup Ditjen Planologi Kehutanan, 24 judul</li> <li>- Data dan informasi bidang planologi kehutanan tahun 2010, 1 judul</li> <li>- Renja Ditjen Planhut tahun 2011, 1 judul</li> <li>- Penyempurnaan Renstra Ditjen Planhut 2010-2014</li> <li>- Data rencana kegiatan dan anggaran, 1 Judul</li> <li>- Data koordinasi keterpaduan kegiatan dan anggaran keplanologi, 1 kegiatan</li> <li>- Dokumen bimbingan dan pengendalian administrasi: keuangan di 23 satuan kerja</li> <li>- Dokumen Pembinaan administrasi dan pengelolaan perlengkapan, 3 kegiatan</li> <li>- Dokumen penyelesaian permasalahan</li> </ul>	mendukung pelayanan prima bidang Planologi		

FUNGSI / SUB FUNGSI / PROGRAM	KEGIATAN (Kode dan Nama)	INDUKATOR		ANGGARAN (Rp.)	PENANGGUNG JAWAB
		KELUARAN (OUTPUT)	HASIL (OUTCOME)		
<b>PENDIDIKAN</b>					
<b>PENDIDIKAN MENENGAH</b>					
Pendidikan Menengah	Indikator kinerja utama: Penyelenggaraan SMK Kehutanan kelas I sebanyak 288 orang, kelas II sebanyak 288 orang, kelas III sebanyak 168 orang.	25.000.000.000	Sekjen Dephut		
	xxxx Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan (***)	25.000.000.000	Tersedianya tenaga teknis menengah kehutanan	Ka. Pusat Diklat Kehutanan	
<b>PENDIDIKAN KEDINASAN</b>					
Pendidikan Kedinasan	Indikator kinerja utama: Penyelenggaraan diklat bagi 5.530 orang dan lulusan program doktor (S3) sebanyak 15 orang dan Magister (S2) sebanyak 50 orang.	53.953.600.000	Sekjen Dephut		
	4047 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (***)	53.953.600.000	- Tersedianya aparatur kehutanan yang telah mengikuti diklat kehutanan sehingga mampu berperan secara profesional dalam pembangunan kehutanan - Meningkatkan pengetahuannya, dan kemampuan	Ka. Pusat Diklat Kehutanan	

FUNGSI/ SUB FUNGSI / PROGRAM	KEGIATAN (Kode dan Nama)	INDIKATOR		ANGGARAN (Rp.)	PENANGGUNG JAWAB
		KELUARAN (OUTPUT)	HASIL (OUTCOME)		
		50 orang Penyempurnaan sarpras diikat di 9 satuan kerja	peran serta masyarakat dlm pem. Kehtan - Bertambahnya pengetahuan dan kemampuan pegawai Dephut dengan kualifikasi pendidikan lulusan S2 dan S3		

**MENTERI KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA,**

**H.M.S. K A B A N**